

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM

Guru dalam khazanah Islam memiliki beberapa kompetensi dasar yaitu, sebagai ustad (profesor) yang memegang teguh komitmen profesi, sebagai guru yang bermakna optimal dalam transfer ilmu teoritis dan hikmah ilmu, sebagai murrabi yang mampu menciptakan dan mengatur pendidikan ke arah lebih baik, sebagai mudarris yang berarti memberantas kebodohan mereka, dan sebagai muaddib yang berarti guru sebagai orang yang beradab untuk membangun peradaban masa depan

Buku ini adalah hasil pemikiran yang telah diterbitkan dalam jurnal, semoga bermanfaat.



PTIQ
PRESS



Dr. Ahmad Zain Samoto, M.PdI, M.A

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM

PTIQ
PRESS

Dr. Ahmad Zain Samoto, M.PdI, M.A

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM

PTIQ
PRESS

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM

Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.PdI, M.A.



PTIQ PRESS
JAKARTA
2019



Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

vi + 240 halaman, 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-602-51724-6-5

Judul: **Dinamika Pendidikan Islam**

Penulis: **Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.PdI, M.A.**

Lay Out & Desain Sampul: Cak Arif



Diterbitkan oleh :

PTIQ Press

Jl. Batan I No. 2, Rt. 5, Rw. 2 Lebak
Bulus, Cilandak Jakarta Selatan
12440

Telepon: +62-21-7690901

Mobile : +62-856-1177-495

E-Mail: ptiqpress@gmail.com

Website: <https://www.ptiq.ac.id/>

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa
pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang All Rights Reserved



Kata Pengantar

Proses menuju perubahan sistem pendidikan nasional banyak menuai kendala serius. Apalagi ketika membicarakan konteks pendidikan nasional sebagai bagian dari pergumulan ideologi dan politik penguasa. Problem-problem yang dihadapi seringkali berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis. Maka, dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, banyak pakar dan praktisi pendidikan mengkritisi pemerintah, dianggap kurang memiliki komitmen yang kuat untuk membenahi sistem pendidikan nasional

Kajian Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Bagaimanapun, hingga hari ini masih banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SD sekalipun. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali.

Masih banyak sekolah yang sangat kekurangan guru pengajar. Masih banyak pula guru (honorar) yang dibayar sangat rendah yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah

Guru dalam khazanah Islam memiliki beberapa kompetensi dasar yaitu, sebagai ustad (profesor) yang memegang teguh komitmen profesi, sebagai guru yang bermakna optimal dalam transfer ilmu teoritis dan hikmah ilmu, sebagai murrabi yang mampu menciptakan dan mengatur pendidikan ke arah lebih baik, sebagai mudarris yang berarti memberantas kebodohan mereka, dan sebagai muaddib yang berarti guru sebagai orang yang beradab untuk membangun peradaban masa depan

Buku ini adalah hasil pemikiran yang telah diterbitkan dalam jurnal, semoga bermanfaat.

Daftar Isi

Kata Pengantar _ iii

Daftar Isi _ v

Dinamika Pendidikan Nasional dalam Perspektif Politik
Pendidikan _ 1

Implikasi Teologis Profesi Guru Dalam Pendidikan _ 25

Kecerdasan Emosional dan Prestasi Belajar: Sebuah
Pengantar Studi Psikologi Belajar _ 37

Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia _ 61

Madrasah Diniyah : Studi Kebijakan Wajib Belajar Di
Purwakarta _ 83

Pemikiran Pendidikan Islam : Doktrin Islam Tentang
Pendidikan __ 99

Pesantren Dan Kurikulum Pembelajaran Dalam Dinamika

Politik Pendidikan Di Indonesia _ **123**

Psikopatologi Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya

Pada Pendidikan _ **169**

Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam _ **195**

Urgensi Peningkatan Mutu Pengelolaan Pesantren Dalam

Era Global _ **219**

Profil Penulis _ 239





Dinamika Pendidikan Nasional dalam Perspektif Politik Pendidikan

Proses menuju perubahan sistem pendidikan nasional banyak menuai kendala serius. Apalagi ketika membicarakan konteks pendidikan nasional sebagai bagian dari pergumulan ideologi dan politik penguasa.

A. Pendahuluan

Jika kita lihat Salah satu dari rumusan tujuan negara Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, karena itu negara sangat bertanggung jawab terhadap terlaksananya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Berbagai upaya telah dirintis sejak awal Indonesia merdeka.

Upaya pertama, dibentuklah Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, seterusnya pada tahun 1946 membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran, dan pada tahun 1947 mengadakan Kongres Pendidikan pertama di Solo, tahun 1947 Kongres Pendidikan kedua di Yogyakarta, dan pada tahun 1950 lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dengan nama Undang-Undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPP), tahun 1954 lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950, tahun 1961 lahir UU No. 22 Tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi, dan barulah pada tahun 1989 lahir Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diiringi dengan seperangkat Peraturan Pemerintah tentang itu, dan tahun 2003 lahir Undang-undang No. 20 Tahun 2003.

Kronologis ini perlu dicantumkan agar kita memahami bahwa kesungguhan pemerintah dalam



menangani pendidikan telah tercermin sejak awal Indonesia merdeka.

Kendatipun sudah banyak kemajuan yang dicapai sejak Indonesia merdeka dalam dunia pendidikan, akan tetapi dalam banyak hal masih perlu dibenahi secara serius. Di antaranya adalah kualitas pendidikan, keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja (*link and match*), pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan lain sebagainya.

Setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad perjalanan bangsa ini, dirasakan bahwa pendidikan belum merupakan prioritas utama sehingga akibatnya dirasakan beberapa kesenjangan dalam kualitas manusia Indonesia. Pada zaman Presiden Soekarno berkuasa, prioritas utama tampaknya yaasg dipikirkan adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan politik, mulai dari perang fisik dan diplomasi menghadapi Belanda, kemudian jatuh banggunya kabinet, pemilihan umum pertama dan sidang-sidang konstituante yang selalu *dead lock*, selanjutnya muncul era konfrontasi dengan Malaysia serta tumbuhnya kekuatan komunis di Indonesia yang puncaknya melahirkan G-30 S PKI. Di era ini dunia pendidikan belum terpikirkan secara serius dan sungguh-sungguh.

Di era pemerintahan orde baru, pada zaman Presiden Soeharto berkuasa prioritas utama adalah pembangunan ekonomi, dengan titik tumpunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dampak negatifnya menimbulkan berbagai hal yang berbau KKN, yang mengantarkan bangsa ini kepada



krisis ekonomi dan moneter seperti yang dirasakan saat sekarang ini.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Proses pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada hentinya. Sebab, jika manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budaya manusia. Dengan ilustrasi ini, maka baik pemerintah maupun masyarakat berupaya untuk melakukan pendidikan dengan standar kualitas yang diinginkan untuk memberdayakan manusia. "Sistem pendidikan yang dibangun harus disesuaikan dengan tuntutan zamannya, agar pendidikan dapat menghasilkan *outcome* yang relevan dengan tuntutan zaman."¹

Indonesia, telah memiliki sebuah sistem pendidikan dan telah dikokohkan dengan UU No. 20 tahun 2003. Pembangunan pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar, yakni; *partama*, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, *kedua*, relevansi pendidikan, *ketiga*, peningkatan kualitas pendidikan, dan *keempat*, efisiensi pendidikan. Secara umum strategi itu dapat dibagi menjadi dua dimensi yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,

¹ Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional [Dalam Percaturan Dunia Global]*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta. 2006, hlm. 11



efektivitas dan produktivitas pendidikan. Sedangkan kebijakan pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah [Nana Fatah Natsir, dalam Hujair AH. Sanaky].² Dari sini, pendidikan dipandang sebagai *katalisator* yang dapat menunjang faktor-faktor lain. Artinya, pendidikan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia [SDM] menjadi semakin penting dalam pembangunan suatu bangsa.

Untuk menjamin kesempatan memperoleh pendidikan yang merata disemua kelompok strata dan wilayah tanah air sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya perlu strategi dan kebijakan pendidikan, yaitu : [a] menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global, [b] menyelenggarakan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan [*accountasle*] kepada masyarakat sebagai pemilik sumberdaya dan dana serta pengguna hasil pendidikan, [c] menyelenggarakan proses pendidikan yang demokratis secara profesional sehingga tidak mengorbankan mutu pendidikan, [d] meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, [e] memberi peluang yang luas dan meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga terjadi diversifikasi program pendidikan sesuai dengan sifat

² Hujair AH Sanaky,, *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Safiria Insania dan MSI, Yogyakarta. 2003, hlm.146

multikultural bangsa Indonesia, [f] secara bertahap mengurangi peran pemerintah menuju ke peran fasilitator dalam implementasi sistem pendidikan, [g] Merampingkan birokrasi pendidikan sehingga lebih lentur [*fleksibel*] untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan masyarakat dalam lingkungan global.³

Empat strategi dasar kebijakan pendidikan yang dikemukakan di atas cukup ideal. Tetapi Muchtar Bukhori, seorang pakar pendidikan Indonesia, menilai bahwa kebijakan pendidikan kita tak pernah jelas. Pendidikan kita hanya melanjutkan pendidikan yang elite dengan kurikulum yang elitis yang hanya dapat ditangkap oleh 30 % anak didik”, sedangkan 70% lainnya tidak bisa mengikuti [Kompas, 4 September 2004]. Dengan demikian, tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi pendidikan, dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, belum terjawab dalam kebijakan pendidikan kita. Kondisi ini semakin mempersulit mewujudkan pendidikan yang *egalitarian* dan SDM yang semakin merata di berbagai daerah.

Proses menuju perubahan sistem pendidikan nasional banyak menuai kendala serius. Apalagi ketika membicarakan konteks pendidikan nasional sebagai bagian dari pergumulan ideologi dan politik penguasa. Problem-problem yang dihadapi seringkali berkaitan dengan kebijakan-kebijakan [*policies*] yang

³ Ibid



sangat strategis. Maka, dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, menurut Suyanto, banyak pakar dan praktisi pendidikan mengkritisi pemerintah, dianggap tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membenahi sistem pendidikan nasional". Artinya, kebijakan-kebijakan pendidikan kita, kurang menggambarkan rumusan-rumusan permasalahan dan "prioritas" yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini, "terutama berkaitan dengan anggaran pendidikan nasional yang semestinya sebesar minimal 20%, diambil dari APBN dan APBD [pasal 31 ayat 4 UUD Amandemen keempat]. Tetapi, sampai sekarang kebijakan strategi belum dapat diwujudkan sepenuhnya, pendidikan nasional masih menyisihkan kegetiran-kegetiran bagi rakyat kecil yang tidak mampu mengecap pendidikan di sekolah" .⁴

Pasca Reformasi tahun 1998, memang ada perubahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan sistem pendidikan tersebut mengikuti perubahan sistem pemerintah yang *sentralistik* menuju *desentralistik* atau yang lebih dikenal dengan otonomi pendidikan dan kebijakan otonomi nasional itu mempengaruhi sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita pun menyesuaikan dengan model otonomi. Kebijakan otonomi di bidang pendidikan [otonomi pendidikan] kemudian banyak membawa harapan akan perbaikan sistem pendidikan kita. Kebijakan tersebut masih sangat baru, maka sudah barang tentu banyak kendala yang masih belum terselesaikan.

⁴ Suyanto, *op. cit*, hlm.xi



Otonomi yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999, yaitu memutuskan suatu keputusan dan atau kebijakan secara mandiri. Otonomi sangat erat kaitannya dengan desentralisasi. Dengan dasar ini, maka otonomi yang ideal dapat tumbuh dalam suasana bebas, demokratis, rasional dan sudah barang tentu dalam kalangan insan-insan yang “berkualitas”. Oleh karena itu, rekonstruksi dan reformasi dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Regional, yang tertuang dalam GBHN 1999, juga telah dirumuskan misi pendidikan nasional kita, yaitu mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu, guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai iptek dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan misi tersebut mesti diterapkan arah kebijakan sebagai berikut, yaitu : [1] perluasan dan pemerataan pendidikan. [2] meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan, [3] melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam bidang kurikulum, [4] memberdayakan lembaga pendidikan formal dan PLS secara luas, [5] dalam realisasi pembaharuan pendidikan nasional mesti berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen, [6] meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh berbagai pihak secara efektif dan efisien terutama dalam pengembangan iptek, seni dan budaya sehingga



membangkitkan semangat yang pro-aktif, kreatif, dan selalu reaktif dalam seluruh komponen bangsa.

Persoalan sekarang, apakah sistem pendidikan yang ada saat ini telah efektif untuk mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern, memiliki kemampuan daya saing yang tinggi di tengah-tengah bangsa lain? Jawabannya tentu belum. Menurut Suyanto, berbicara kemampuan, kita sebagai bangsa nampaknya belum sepenuhnya siap benar menghadapi tantangan persaingan [Suyanto, 2006:11]. Sementara, disatu sisi, “bidang pendidikan kita menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] Indonesia. Tetapi disisi lain, sistem pendidikan kita masih melahirkan *mismatch* terhadap tuntutan dunia kerja, baik secara nasional maupun regional.”⁵

Berbagai problem fundamental yang dihadapi pendidikan nasional saat ini, yang tercermin dalam “realitas” pendidikan yang kita jalan. Seperti persoalan anggaran pendidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, dan persoalan *output* pendidikan kita yang masih sangat rendah kualitasnya. Problem-problem pendidikan yang bersifat metodik dan strategik yang membuahkan *output* yang sangat memprihatinkan. *Output*, pendidikan kita memiliki mental yang selalu tergantung kepada orang lain. *Output* pendidikan kita tidak memiliki mental yang bersifat mandiri, karena memang tidak kritis dan kreatif. Akhirnya, output yang pernah mengenyam pendidikan, malah menjadi “pengangguran terselubung”. Ini artinya,

⁵ Ibid, hlm.21



setiap tahunnya, pendidikan nasional kita memproduksi pengangguran terselubung. Mereka itu, adalah korban dari ketidakberesan sistem pendidikan kita yang masing-masing sedang merangka berbenah. Mungkin saja, kita sebagai insan yang berpendidikan, tentu saja terus atau kebanyakan berharap akan datangnya perubahan “fundamental” terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

2. Pengalaman Pendidikan Pasca Reformasi

Pada saat reformasi digulirkan, masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya, termasuk sektor pendidikan.⁶ Sebab, sektor pendidikan memiliki peran yang strategis dan fungsional dalam upaya mewujudkan perubahan tersebut. Tetapi, kata Tilaar, pendidikan di Indonesia selama ini diatur dengan sistem pendidikan nasional yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik bangsa. Akibatnya, menghasilkan manusia-manusia Indonesia tertekan, tidak kritis, bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengabdikan kepada kepentingan kelompok kecil rakyat Indonesia.⁷

Kebijakan pendidikan kita, berpikir dalam acuan keseragaman. Dapat dikatakan bahwa selama ini kebijakan pendidikan semuanya terpusat. Kurikulum ditetapkan di pusat, tenaga pendidikan ditentukan dari

⁶ Tilaar, H.A.R., , *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Tera Indonesia, Magelang. 1998, hlm. 25

⁷ Hujair AH. Sanaky, op. cit. hlm. 3

pusat, sarana dan prasarana pendidikan diberikan dari pusat, dana pendidikan ditentukan dari pusat, semuanya diseragamkan dari pusat. Maka yang terjadi adalah masyarakat jadi pasif tidak tahu dan tidak dapat berkecimpung di dalam kehidupan pendidikan anak-anak mereka. Padahal, masyarakat memiliki harapan dan dampak terhadap upaya pendidikan di Indonesia, walaupun mereka mempunyai perbedaan dalam status sosial, peranan dan tanggungjawab. Hal yang sangat ironis lagi, adalah menempatkan pendidikan sebagai kerja “*non akademik*”, pendidikan diselenggarakan dengan “otorita” kekuasaan “administratif-birokratis”, belum menempatkan pendidikan sebagai kerja “*akademik*” dan penyelenggaraan pendidikan dibawah “otorita keilmuan”.

Pendidikan nasional juga diselenggarakan secara diskriminasi, jauh dari apa yang diidealkan, yaitu setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan. Dalam kenyataannya pelaksanaan pendidikan kita tidak demokratis, masih terdapat sekolah-sekolah atau perguruan negeri yang dikelola dan dibiayai pemerintah, dan sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan swasta yang dikelola oleh masyarakat dan dibiayai oleh masyarakat sendiri. Perlakuan diskriminatif tersebut, secara psikologis terkesan bahwa “pendidikan” adalah milik pemerintah, dan bukan milik masyarakat. Maka “semangat kebatinan” atau “jiwa” pendidikan telah lepas dari “jiwa masyarakat”. Banyak lembaga pendidikan



formal - dari dasar sampai perguruan tinggi - yang menjadi komunitas atau kelompok tersendiri yang lepas dari masyarakatnya; mereka hanya mementingkan status formal, ijazah dan gelas, bahkan dewasa ini banyak terjadi perdagangan gelas, jenjang dan ijazah. ⁸

Tampaknya, kebijakan pendidikan nasional kita lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah dan bukan kepentingan pembelajar, pasar, dan pengguna jasa pendidikan atau masyarakat. Hal ini didasarkan pada dalih bahwa strategi pendidikan nasional adalah untuk membekali generasi muda agar mampu membawa bangsa dan negara ini cepat sejajar dengan bangsa dan negara lain yang lebih maju. Namun, dalam implikasi perkembangannya tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. ⁹ Pendidikan yang seyogyanya dapat membebaskan “pembelajar” menjadi manusia untuh bermartabat, justru menjadi alat penyiksa. Ironis dan sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Pendidikan yang ada telah tergilas atau terhanyut oleh kekuatan-kekuatan atau sistem-sistem yang lain sehingga secara pasti tidak memungkinkan arah perjalannya dapat menuju ke tujuan pendidikan nasional, apalagi ketercapaian dari tujuan pendidikan nasional itu. ¹⁰

⁸ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Safiria Insania Press dan MSI, Yogyakarta. 2003, hl. 32-33

⁹ Ibid, hlm. 33

¹⁰ Diana Nomida Musnir, *Arah Pendidikan Nasional dalam Perspektif Historis*, dalam Buku: Sindhunata [editor], 2000, *Menggagas Paradigma Baru*

Dari gambaran di atas, mungkin saja, kita perlu berkaca pada pengalaman reformasi pendidikan di Amerika. Paling tidak ada dua aspek penting yang perlu menjadi titik perhatian di sini. *Pertama*; perencanaan pembangunan pendidikan harus bertitiktolak dari suatu penelitian dan penilaian nasional [*national assessment*] tentang status dan kondisi pendidikan yang didasarkan pada suatu standar dan ukuran kemajuan [*benchmark*] yang terbuka [*accountable*], sehingga publik dengan mudah mengikuti kemajuan pendidikan yang ada. *Kedua*; perencanaan pembangunan pendidikan harus memiliki ajang pembahasan [*ground*] yang mampu meliputi seluruh aspek dan permasalahan pendidikan secara tuntas [*exhaustively*], dengan ekspektasi yang terukur, baik secara normatif maupun kuantitatif. Perbandingan ukuran dapat secara internal ditentukan dengan kriteria tertentu, atau secara eksternal dibandingkan dengan kemajuan pendidikan negara-negara lain.

Sementara untuk Indonesia, menurut beberapa pakar dan praktisi pendidikan, reformasi pendidikan dirumuskan dalam "bahasa tamsil" yang sangat "utopis" yang kurang menggambarkan rumusan-rumusan permasalahan dan prioritas pendidikan yang akan dicapai. Akibatnya, muncul berbagai masalah dalam dunia pendidikan kita yang belum teratasi. Permasalahan tersebut antara lain kinerja yang tidak pas dengan tujuan

Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 71



umum pendidikan nasional, produk pendidikan yang belum siap pakai, atau tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan kerja, rangking pendidikan kita di mata dunia yang setara dengan negara-negara miskin atau baru merdeka. Dengan negara jiran Malaysia saja, kita sudah jauh ketinggalan. Dengan kata lain, dalam menyongsong berbagai kecenderungan yang aktual tidak ada alternatif lain selain perlu penataan kembali terhadap dunia pendidikan mulai dari filsafat dan tujuan pendidikan, manajemen pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, dan substansi pengajaran secara nasional, regional dan local [Baca: Muhammad Yacub, From:http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/27/suatu_opinimengenaireformasis.htm].

Sistem pendidikan kita terlihat masih bersifat tambal sulam, mulai dari kebijakan kurikulum, manajemen, sistem pembelajaran, tuntutan kualitas guru, tuntutan fasilitas dan dana pendidikan, kurang memiliki “prioritas” yang ingin dicapai. Sementara secara umum, pendidikan seringkali dipandang sebagai investasi modal jangka panjang yang harus mampu membekali “pembelajar” untuk menghadapi kehidupan masa depannya. Pendidikan harus mampu mencerahkan “pembelajar” dari ketidak tahuan menjadi tahu dan memberdayakan, artinya pendidikan mampu membuat “pembelajar” berhasil dalam kehidupan. Maka, berbicara soal pendidikan adalah bicara “soal kualitas kehidupan “pembelajar”, soal kualitas sumberdaya manusia [SDM], yang akan menjadi tantangan dan



sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk ikutan bergulir sejajar dengan bangsa lain.

Secara ideal, sebenarnya dunia pendidikan kita harus mampu berjalan beriringan dengan dunia luar. Akan tetapi, kendala utama yang dihadapi adalah komitmen pemerintah yang tidak terfokus pada preriotas dalam hal dana pendidikan baik pada masa lalu dan masa kini. Akibatnya idealisme tersebut masih jauh dari impian, jauh dari kenyataan dan hanya menjadi “mitos”. Maka yang menjadi persoalan sekarang apakah pemerintah atau bangsa Indonesia ini sadar bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk menghadapi persaingan dengan dunia luar. Apakah pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki komitmen untuk menentukan sektor pendidikan adalah faktor kunci bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Apabila dilihat dari komitmen pemerintah Indonesia menempatkan anggaran pendidikan dibawah standar yaitu 8% dalam anggaran belanja dan pendapatan negara [APBN] yang semestinya sebesar minimal 20% [baca: Suyanto, 2006:xi], bahkan semua komponen menghendaki, termasuk usulan dari pengurus besar PGRI agar anggaran pendidikan mendapat alokasi 25% dari APBN [*Ibrahim Musa, Ibid, From: <http://202.159.18.43/jp/22ibrahim.htm>*].

Sebab, anggaran pendidikan yang memadai untuk dapat menjadikan SDM bangsa Indonesia berkualitas setarap dengan tingkat pelayanan pendidikan di negara maju hanya tinggal impian. Dengan demikian, dapat



dikatakan bahwa sebenarnya kesadaran pemerintah Indonesia atas masalah pendidikan sangat rendah dibandingkan perhatian pada sector lain.

Dengan rendahnya subsidi anggaran di bidang pendidikan menjadi indikator betapa bidang ini masih jauh dari “ruh” dan harapan reformasi. Oleh karena itu, formula pembiayaan dan subsidi pendidikan yang “berkeadilan” berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang nyata, yaitu dengan memperhatikan jumlah “pembelajar”, kesulitan komunikasi, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan tingkat partisipasi pendidikan. Katakan saja, semakin sulit komunikasi, semakin rendah tingkat kesejahteraan dan sumber pemasukan dana, maka semakin besar subsidi yang dibutuhkan. Tingkat subsidi untuk sekolah di ibukota propinsi, kabupaten, dan desa adalah sebesar 25%, 50%, dan 75% hingga 100% untuk desa terpencil. Selanjutnya subsidi pendidikan untuk satu lembaga pendidikan diberikan sebagai satu paket *block grant* yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan, tidak dipilah-pilah menjadi anggaran rutin untuk gaji, sarana pendidikan, dan BOP/DBO yang penggunaannya diatur secara kaku berdasarkan Juklak dan Juknis dari Departemen [Ibrahim Musa:From: <http://202.159.18.43/jp/22ibrahim.htm>].

Semua komponen bangsa mengakui bahwa pendidikan merupakan prioritas utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Tapi anggaran pendidikan hanya memperoleh alokasi sebesar 8% dalam



anggaran belanja dan pendapatan negara [APBN]. Semuanya menghendaki agar anggaran pendidikan mendapat alokasi 25% dari APBN. Anggaran pendidikan yang memadai untuk menjadikan SDM bangsa Indonesia setara dengan tingkat pelayanan pendidikan di negara maju hanya tinggal impian, hanya mitos. Dapat diperhatikan bahwa alokasi “anggaran pendidikan” seharusnya menjadi urutan utama untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia, tetapi kenyataan anggaran pendidikan selalu terkalahkan untuk kepentingan pembangunan sektor lain terutama untuk sektor ekonomi.

3. Perubahan Paradigma Pendidikan Pasca Reformasi

Pada era reformasi, masyarakat Indonesia menginginkan perubahan dalam semua aspek kehidupan bangsa. Berbagai terobosan telah dilakukan dalam penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan, dengan kata lain diperlukan paradigma-paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan perubahan masyarakat tersebut. Katakan saja, pembaharuan pada sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dan fungsional, juga memerlukan paradigma baru yang harus menekankan pada perubahan cara berpikir dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan.¹¹

Pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional tidak dapat berperan sebagai penggerak dan “loko” pembangunan, bahkan Gass [1984] lewat

¹¹ Hujair AH. Sanaky, op. cit, hlm. 3

tulisannya berjudul *education versus Qualifications* menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: cultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik. Berbagai problem pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan pendidikan nasional yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang bersifat “tambal sulam” [*Erratic*]. Pembaharuan pendidikan nasional yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan.¹²

Paradigma tersebut harus berimplikasi pada perubahan perspektif dalam pembangunan pendidikan, mulai dari perspektif yang menganggap pendidikan sebagai sector pelayanan umum ke perspektif pendidikan sebagai suatu investasi produk yang mampu mendorong pertumbuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Sebab pendidikan bukan bidang yang terlepas dari “kehidupan” lainnya [Baca: Ace Suryadi, From:<http://www.kompas.com>]. Mungkin saja, kita perlu menyimak kembali kata Prof. Proopert Lodge, yang dikutip Suyanto, mengatakan bahwa *life is education, and education is life*. Dari pernyataan Lodge itu mengisyaratkan bahwa, antara pendidikan dengan

¹² Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Adipura, Yogyakarta. 2000, hlm.5-6



kehidupan hampir-hampir tidak dapat dibedakan sama sekali .¹³ Dari pandangan ini, kita tidak heran, jika sering disinyalir bahwa pendidikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan. Maka pendidikan sering menerima akibat buruk dari berbagai perubahan yang terjadi.

Melalui paradigma baru tersebut, paling tidak pendidikan harus mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan. Bahkan, kalau memungkinkan, pendidikan dapat mengubahnya menjadi faktor yang dapat menggerakkan atau mengarahkan perubahan dalam lingkungan tersebut [Baca: Ace Suryadi, From: <http://www.kompas.com>].

Sebab, pendidikan dan kehidupan telah menyatu dalam sebuah kerangka filosofis, bahwa proses pendidikan tidak lain adalah proses memanusiakan manusia. Dengan dasar ini, maka pendidikan dipandang sebagai “katalisator” dan “loko” yang dapat menyebabkan faktor-faktor lainnya berkembang. Hal ini memberikan aksentuasi betapa pembangunan pendidikan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia [SDM] menjadi semakin penting dalam pembangunan suatu bangsa.

Paradigma pendidikan dalam pembangunan yang diikuti para penentu kebijakan [pemerintah] kita dewasa ini memiliki kelemahan, baik teoritis maupun

¹³ Suyanto, *op.cit.* hlm. ix



metodologis. Dalam hal ini, tidak dapat diketemukan secara tepat dan pasti bagaimana proses pendidikan menyumbang pada peningkatan kemampuan individu. Hal ini, memang secara mudah dapat dikatakan bahwa pendidikan formal kita akan mampu mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki sistem dunia kerja yang semakin kompleks. Tetapi, mungkin saja pendidikan kita tidak mampu menjawab tantangan tersebut, sebab pada kenyataannya, kemampuan [kompetensi] yang diterima dari lembaga pendidikan formal tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.¹⁴

Dari pemikiran di atas, maka pengambil kebijakan pendidikan perlu memperhatikan berbagai persoalan yang sedang akan dihadapi bangsa ini. Oleh karena itu, perlu ditempuh berbagai langkah baik dalam bidang manajemen, perencanaan, sampai pada praksis pendidikan ditingkat mikro.

Mengingat Pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar manusia (al-hâjat al-asasiyyah) yang harus dipenuhi oleh setiap manusia seperti halnya pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan perumahan. Pendidikan adalah bagian dari masalah politik (siyâsah) yang diartikan sebagai ri'âyah asy-syu'ûn al-ummah (pengelolaan urusan rakyat) berdasarkan ideologi yang diemban negara.¹⁵

¹⁴ Zamroni, op. cit, hlm. 6

¹⁵ Ahmad Zain Sarnoto, *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*, Jurnal EDUCHILD, Volume 1 No.1 Ferbruari 2012, hlm. 32

Berdasarkan pemahaman mendasar ini, politik pendidikan (siyâsah at-ta'lim) suatu negara sangat ditentukan oleh ideologi (pandangan hidup) yang diemban negara tersebut. Faktor inilah yang menentukan karakter dan tipologi masyarakat yang dibentuknya. Dengan demikian, paradigma pendidikan di Indonesia pasca reformasi, dipengaruhi oleh kebijakan politik pendidikan pemerintah yang dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan kualitas human resources (sumberdaya manusia) yang dicita-citakan.

C. PENUTUP

Berdasarkan data dan berbagai analisis yang terdapat pada uraian tersebut di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia secara drastis, karenanya perubahan masyarakat sesuatu yang alami sifatnya sebagai suatu bagian dari proses dan dinamika perkembangan masyarakat. Sejak manusia berada di planet bumi ini telah terjadi banyak perubahan, termasuk dalam hal ini bidang pendidikan.
2. Dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan adanya pendirian sebagai kebijakan idiologi yang mempunyai visi tertentu terhadap pendidikan. Kaitan dengan pendidikan secara bersamaan muncul permasalahan-permasalahan pendidikan yang perlu



dicarikan pemecahannya, disinilah diperlukan kebijakan politik pendidikan yang memihak kepada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Ade Cahyana, *Indonesia 2010: Merubah Mitos menjadi Realitas Pembangunan*, From: http://www.depdiknas.go.id/jurnal/indonesia_2010_Ade_Cahyana.htm, sabtu, 16/9/2006, jam. 13.10

Ahmad Zain Sarnoto, *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*, Jurnal

EDUCHAILD, Volume 1 No.1 Ferbruari 2012

Danim, Sudaman, *Inovasi pendidikan dalam upaya peningkatan*

profesionalisme tenaga kependidikan, Pustaka Cipta, Bandung, 2002

Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sisdiknas di Indonesia*,

(Jakarta: Kencana, 2004)

Diana Nomida Musnir, *Arah Pendidikan Nasional dalam Perspektif Historis, dalam Buku: Sindhunata [editor], 2000, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, Kanisius, Yogyakarta, 2000*

Dedi Supriadi, *Makna dan Implikasi Undang-undang Sisdiknas terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Buletin PADU Vol.2 No. 2, Agustus 2003*

Hujair AH Sanaky,, *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Safiria Insania dan MSI, Yogyakarta. 2003

_____, 2005, *Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Islam [JPI], Volume XII TH VIII Juni 2005, ISSN: 0853-7437, Jurusan Tarbiyah Fakultas Ilmu Agama UII, Yogyakarta

Ibrahim Musa,, Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, From: <http://202.159.18.43/jp/22ibrahim.htm>, Akses, 5 Juni 2002

Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan, *Rangkuman Filosofi, Kebijaksanaan dan Strategi Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1999, Jakarta, hlm.3

Onno W Purbo, *Pergeseran Drastis Paradigma Dunia Pendidikan, From:*

- <http://bebas.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/education/pergeseran-drastis-paradigma-dunia-pendidikan-1998.rtf>, 7/11/2003
- Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Terjemahan, Utomo Dananjaya, LP3ES, Jakarta. 1995
- Suyanto & Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta. 2000
- Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional [Dalam Percaturan Dunia Global]*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta. 2006
- Soedjiarto, "Memahami Arah Kebijakan GBHN 1999-2004 tentang Pendidikan Sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara bangsa Indonesia", MAKALAH, Primagama-IPSI-PGRI, Yogyakarta. 1999
- Tilaar, H.A.R., , *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21, Tera Indonesia*, Magelang. 1998
- Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Adipura, Yogyakarta. 2000



Implikasi Teologis Profesi Guru Dalam Pendidikan

Guru dalam khazanah Islam memiliki beberapa kompetensi dasar yaitu, sebagai ustad (profesor) yang memegang teguh komitmen profesi, sebagai guru yang bermakna optimal dalam transfer ilmu teoritis dan hikmah ilmu, sebagai murrabi yang mampu menciptakan dan mengatur pendidikan ke arah lebih baik, sebagai mudarris yang berarti memberantas kebodohan mereka, dan sebagai muaddib yang berarti guru sebagai orang yang beradab untuk membangun peradaban masa depan.

A. Pendahuluan

Pendidikan diyakini merupakan salah satu aspek pembangunan bangsa yang sangat penting untuk mewujudkan warga negara yang handal profesional dan berdaya saing tinggi. Pendidikan juga dipandang sebagai investasi penting dalam pembangunan nilai-nilai dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Di samping itu, pendidikan juga diyakini merupakan cara yang paling efektif dalam proses *nation and character building*, yang sangat menentukan perjalanan dan regenerasi suatu bangsa.

Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan pendidikan mencakup berbagai dimensi yang luas dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pendidikan secara faktual merupakan pengalaman belajar seseorang sepanjang hidup. Seperti yang dinyatakan dalam pernyataan resmi Unesco tentang pendidikan untuk semua (*education for all* atau EFA) pada tahun 1990. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa setiap orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan



pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Artinya pendidikan dapat dilakukan dengan tanpa mengenal batas usia, ruang, dan waktu. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang keberlangsungan proses pendidikan. Hal sesuai dengan apa yang telah digariskan pada Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2). Pendidikan juga tidak mengenal pembatasan bentuk dan kegiatan, dalam hal ini pendidikan dapat dilakukan di sekolah, luar sekolah, pondok pesantren, perguruan-perguruan, dan lain sebagainya

B. Makna Guru Dalam Khazanah Pendidikan Islam

Dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru biasa disebut sebagai *ustadz*, *mu'allim*, *murrabbiy*, *mursyid*, *mudarris* dan *mu'addib*. Kata *ustad* sering biasa digunakan untuk memanggil "Profesor". Ini mengandung makna bahwa bahwa seorang guru dituntut untuk "komitmen" terhadap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Seorang dikatakan profesional, bilamana pada dirinya melakat sikap dekatip yang tringgi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja serta sikap *continous improvement*, selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya.

Guru juga sering disebut "*mu'allim*" berasal dari kata dasar *'ilm* yang berarti menangkan hakikat sesuatu.



Dalam setiap ilmu terkandung dimensi teoritis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan siswa untuk mengamalkannya. Ini mengandung makna dituntut untuk mampu mengajarkan kandungan ilmu pengetahuan dan *al-hikmah* atau kebijakan dan kemahiran melaksanakan ilmunipengetahuan dalam kehidupannya. Guru matematika misalnya, akan berusaha mengajarkan hakikat matematika, yaitu mengejar nilai kepastian dan ketepatan dalam mengambil sikap dan tindakan hidupnya, tidak hanya sekedar mengajarkan rumus-rumus matematika. Guru fisika, kimia, biologi tidak hanya sekedar *transfer* rumus-rumus alam-fisika, tetapi bisa mampu menyentuh aspek metafisika untuk membangkitkan kecintaan pada Tuhan dan kearifan untuk menjaga kelastarian alam.

Makna lain sebutan guru disebut "*murrabbiy*" berasal dari kata "*Rabb*". Tuhan sebagai *Rabb al-'alamien* dan *Rab al-Nas*, yakni yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam beserta isinya termasuk manusia. Dilihat dari makna ini maka tugas seorang guru, mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitar. Guru sering pula disebut "*mursyid*" biasa digunakan dalam *Thariqah* (tasawuf).

Imam Syafei pernah meminta nasihat kepada gurunya Imam Waki'. Maka gurunya memberikan peringatan bahwa untuk memperkuat ingatan harus diupayakan meninggalkan perbuatan maksiat.



Bagaimanan hubungan antara ingatan dengan maksiat ? Dalam psikologi , seseorang dikatakan sehat mentalnya bilamana terwujud keserasian antara fungsi-fungsi jiwa atau tidak ada konflik antara satu fungsi jiwa dengan lainnya. Fungsi jiwa antara lain berupa dorongan, perasaan, ingatan, dan pikiran. Jika salah satu fungsinya terganggu, maka akan berpengaruh terhadap fungsi lainnya. Orang yang berbuat maksiat akan terganggu perasaannya. Ia akan memiliki perasaan bersalah dan berdosa, yang pada gilirannya akan mengganggu kekuatan ingatan dan pikirannya. Dengan demikian seorang *Mursyid* berusaha menularkan penghayatan akhlak dan atau kepribadiannya.

Sebutan lain guru disebut *mudarris*, menurut Muhaimin berasal dari kata "*darasa-yadrusu-darsan wa durusan wa dirasatan*" . yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Pengetaghuhan dan ketrampilan seseorang akan cepat usang selaras dengan percepatan kemajuan iptek dan perkembangan zaman, sehingga guru dituntut untuk memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, agar tetap *up to date* dan tidak usang.



Makna lain seorang guru sering disebut pula *mu'addib* berasal dari kata *adab*, yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan lahir dan batin. Kata peradaban juga berasal dari kata dasar *adab*, sehingga gurub harus berperan sebagai orang yang beradab untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa depan

C. Sosok guru yang Islami

Membicarakan pendidikan merupakan permasalahan yang tidak pernah berkesudahan sampai hari kiamat. Dalam dunia pendidikan tentunya ada beberapa sistem yang saling berkaitan satu sama lain sehingga dalam proses pendidikan berjalan dengan baik. Pendidikan adalah suatu *missin sacred* (tugas yang suci), oleh karena itu, segala sistem yang berhubungan dengan pendidikan semestinya konsisten dengan konsekuensi yang digambarkan dalam ajaran Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah).

Pendidik merupakan salah satu sistem yang sangat terpenting dalam proses berjalannya pendidikan. Istilah pendidik dalam bahasa disebut dengan *murabbi* (pendidik, pengasuh, pembimbing, pemelihara) (lihat Kamus al-Munawwir, 1997), oleh karena itu pendidik adalah "orang yang memikul pertanggung jawaban untuk mendidik" (Ahmad D. Marimba, 1987). Namun perlu di tekankan bahwa mendidik bukan sekedar tugas dan tanggung jawab, tetapi merupakan suatu ibadah yang diridhai oleh Allah SWT berdasarkan tuntunan ajaran Islam (al-Qur'an dan hadis) itu sendiri.



Ketika mengkaji bagaimana sosok pendidik yang sesungguhnya (qur'ani)? Pastinya memunculkan beberapa perspektif yang berbeda. Terlepas dari perbedaan pandangan, tentunya Al-Qur'an sebagai dasar segalanya telah mengisyaratkan bagaimana seharusnya seorang pendidik yang baik (qur'ani) dalam menjalankan amanahnya. Secara umum, sosok pendidik yang qur'ani yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an dapat dilihat dari tiga aspek.

Pertama adalah aspek dasar yaitu beriman kepada Allah SWT. Pendidik/guru merupakan salah satu profesi yang mulia dan sangat besar tanggung jawabnya dihadapan Allah SWT. Dalam konteks dakwah, bahwa pendidik tidak jauh beda eksistensinya dengan para Nabi dan Rasul Allah SWT sebagai orang yang diberi amanah untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Dengan demikian seorang pendidik Islam tentunya tidak bisa lepas dari nilai-nilai iman, sebab iman (tauhid) merupakan dasar dan sumber segala kebenaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketika seorang pendidik Islam menjalankan fungsinya sebagai *murabbi* (pendidik) tanpa didasari/dilandasi dengan ajaran iman, maka tentu bisa segala amalnya tidak ada harganya di hadapan Sang Yang Maha Kuasa.

Iman yang dimaksud adalah bukan sekedar konsep atau teoritis, tetapi dibuktikan dengan praktek-praktek Iman. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an:



Artinya: “*demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran*” (QS, Al-Ashr :1-3).

Secara eksplisit teks ayat ini mengisyaratkan bahwa eksistensi manusia selalu dalam posisi kerugian kecuali orang benar-benar beriman, beramal saleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Pendidik/guru merupakan orang yang diberi amanah untuk membimbing dan memberikan nasehat kebenaran kepada seluruh umat, jika tanpa diawali dengan iman, maka tidak ada nilainya karena itu merupakan amal saleh yang sangat mulia.

Kedua adalah aspek proses yakni seorang pendidik dalam melaksanakan amanahnya ia harus memiliki akhlak atau kepribadian yang Islami. Secara sederhana akhlak Islami merupakan “segala perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, dan tidak disengaja, mendarah daging yang bersifat universal berdasarkan ajaran Islam (Al-Qur’an dan Hadis)”. Akhlak kepada Allah merupakan sikap yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk (Abuddin Nata: 2011). Seorang pendidik tentunya bagian dari manusia Allah yang diberi amanah untuk mendidik dan mengarah manusia lainnya kepada ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidik harus meinternalisasikan nilai-nilai akhlak Islam dalam proses melaksanakan tugasnya sebagai *uswatun hasanah* bagi peserta didiknya.

Ahlak kepada manusia adalah hal yang sangat penting bagi seorang pendidik, karena seraca kasap mata ia langsung berhadapan dengan objeknya. Diantara akhlak sama adalah tidak boleh saling membunuh, menyakiti badan (kekerasan), mengambil hak orang lain dengan batil, menceritakan aib sesama (Lihat QS. al-Baqarah: 263) dan masih banyak lagi contoh lainnya tanpa disebutkan satu persatu.

Sebenarnya al-Qur'an sudah cukup jelas memberikan isyarat bagaimana seorang pendidik ketika berintraksi dengan manusia lainnya (masyarakat, orang tua dan peserta didik), namun ini sering diabaikan sehingga melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan akhlak Islami, misalnya seorang dosen melakukan tindakan asusila (pelecehan seksual) terhadap mahasiswanya sendiri (media televisi; Gorontalo, 31 Januari 2012).

Tidak kalah pentingnya akhlak kepada lingkungan yakni sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, manpun benda-benda yang tidak bernyawa. Binatang, tumbuhan dan benda lainnya semuanya ciptaan Allah dan semuanya memiliki ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan seorang pendidik untuk menyadari bahwa semuanya adalah makhluk Allah yang harus diperlakukan secara wajar dan baik.

Pentingnya pembentukan akhlak bagi pendidik, disebabkan adanya anggapan bahwa sirna akhlak Islami seseorang (pendidik) merupakan pintu awal hancurnya sebuah bangsa, baik dari segi politik, sosial, pendidikan



dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan penyair Syauki Bey “selama umat itu akhlaknya baik ia akan tetap eksis, dan jika akhlaknya sirna, maka bangsa itu pun akan binasa”.

Ketiga adalah aspek tujuan yakni tujuan yang ikhlas (semata mengharap ridha Allah SWT). Secara sederhana ikhlas merupakan sikap mental yang selalu rela dengan tulus hati dalam melakukan suatu pekerjaan dengan mengedepankan mengharap ridha Allah semata dibandingkan yang lainnya. Sikap mental pendidik/guru yang *majmumah* (tercela) merupakan salah satu potensi yang dapat mendorong seorang pendidik untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis sehingga dapat menurunkan mutu pendidikan, misalnya selalu datang terlambat, sering tidak hadir, meminta uang kepada siswa/mahasiswa supaya diberikan nilai yang bagus dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi disebabkan adanya sikap mental yang tidak baik sehingga beranggapan bahwa mendidik atau mengajar hanya sekedar melepaskan tanggung jawab dan mencari nafkah.

Padahal dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan bahwa “*Aku (Allah) tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (menyembah)-Ku*” (QS. Adz-Dzariyat: 56), artinya manusia diciptakan sebagai seorang pendidik (guru/dosen) adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar melapaskan tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian, pendidik (guru/dosen) harus berkomitmen bahwa mengajar tidak sekedar



melaksanakan tugas profesi, tetapi satu ibadah yang mengharap ridha Allah SWT.

D. Penutup

Dengan demikian makna guru dalam khazanah Islam memiliki beberapa kompetensi dasar yaitu, sebagai *ustad* (profesor) yang memegang teguh komitmen profesi, sebagai guru yang bermakna optimal dalam transfer ilmu teoritis dan hikmah ilmu, sebagai *murrabi* yang mampu menciptakan dan mengatur pendidikan ke arah lebih baik, sebagai *mudarris* yang berarti memberantas kebodohan mereka, dan sebagai *muaddib* yang berarti guru sebagai orang yang beradab untuk membangun peradaban masa depan. Maka apapun yang kita lakukan dalam menjalankan profesi guru akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Yang Maha Kuasa, apakah kita menjadi guru yang sesuai dengan makna-makna tadi ? atau menjadi guru zalim ? kalau kita bertekad menjadi guru religius profesional, maka kita siap untuk menduduki surga yang "paling nikmat" bersama para Nabi. Sebaliknya, kalau kita menjadi guru zhalim (nagajar asal-asalan), maka kiat siap-siap ditempatkan oleh Allah di keraknya api neraka. Pilihan itu ada pada ketajaman nurani kita sebagai pendidik (*muraby*).



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an.
- Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta; Rajawali Pers, 2011.
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung; Al-Ma'arif, 1974.
- Arifin, Anwar, 2003, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (dalam Undang-Undang SISDIKNAS, POKSI VI FPG DPR RI).
- Hasbullah. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I. Djumhur & Danusaputra. 1979. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu.
- Mahfud, Khoirul 2006, "*Pendidikan Multikultur*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shaleh, Abdul Rachman. 2006. *Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedjo, Muwardi. dkk. 1992. *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam dan UT.
- Yunus, Mahmud. 1985. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zuhairini & Ghofur, Abdul. 2004. *Metodelogi Pembelajaran PAI*. Malang: Universitas Negeri Malang.





Kecerdasan Emosional Dan Prestasi Belajar: Sebuah Pengantar Studi Psikologi Belajar

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. Sedangkan prestasi belajar adalah hasil belajar dari suatu aktivitas belajar yang dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar dalam bidang akademik yang diwujudkan berupa angka-angka dalam rapor.

PENDAHULUAN

Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam prestasi belajarnya. Namun dalam upaya meraih prestasi belajar yang memuaskan dibutuhkan proses belajar.

Proses belajar yang terjadi pada individu memang merupakan sesuatu yang penting, karena melalui belajar individu mengenal lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan disekitarnya. Menurut Irwanto (1997 :105) belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu menjadi mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dengan belajar, siswa dapat mewujudkan cita-cita yang diharapkan.

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya penilaian. Begitu juga dengan yang terjadi pada seorang siswa yang mengikuti suatu pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. Penilaian terhadap hasil belajar seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar

Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Banyak orang yang



berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki *Intelligence Quotient* (IQ) yang tinggi, karena inteligensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Menurut Binet dalam buku Winkel (1997:529) hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif

Dalam proses belajar mengajar di sekolah sering ditemukan siswa yang tidak dapat meraih prestasi belajar yang setara dengan kemampuan inteligensinya. Ada siswa yang mempunyai kemampuan inteligensi tinggi tetapi memperoleh prestasi belajar yang relatif rendah, namun ada siswa yang walaupun kemampuan inteligensinya relatif rendah, dapat meraih prestasi belajar yang relatif tinggi. Itu sebabnya taraf inteligensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Menurut Goleman (2000 : 44), kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional atau *Emotional Quotient* (EQ) yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustrasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (mood), berempati serta kemampuan bekerja sama.



TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian kecerdasan emosional

Istilah “kecerdasan emosional” pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan.

Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ sebagai :

“himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan.” (Shapiro, 1998:8).

Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu peranan lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional.

Keterampilan EQ bukanlah lawan keterampilan IQ atau keterampilan kognitif, namun keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingkatan konseptual maupun di dunia nyata. Selain itu, EQ tidak begitu dipengaruhi oleh faktor keturunan. (Shapiro, 1998-10).

Sebuah model pelopor lain tentang kecerdasan emosional diajukan oleh Bar-On pada tahun 1992 seorang ahli psikologi Israel, yang mendefinisikan kecerdasan



emosional sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan (Goleman, 2000 :180).

Gardner dalam bukunya yang berjudul *Frame Of Mind* (Goleman, 2000 : 50-53) mengatakan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan yang monolitik yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada spektrum kecerdasan yang lebar dengan tujuh varietas utama yaitu linguistik, matematika/logika, spasial, kinestetik, musik, interpersonal dan intrapersonal. Kecerdasan ini dinamakan oleh Gardner sebagai kecerdasan pribadi yang oleh Daniel Goleman disebut sebagai kecerdasan emosional.

Menurut Gardner, kecerdasan pribadi terdiri dari :”kecerdasan antar pribadi yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja bahu membahu dengan kecerdasan. Sedangkan kecerdasan intra pribadi adalah kemampuan yang korelatif, tetapi terarah ke dalam diri. Kemampuan tersebut adalah kemampuan membentuk suatu model diri sendiri yang teliti dan mengacu pada diri serta kemampuan untuk menggunakan modal tadi sebagai alat untuk menempuh kehidupan secara efektif.” (Goleman, 2002 : 52).

Dalam rumusan lain, Gardner menyatakan bahwa inti kecerdasan antar pribadi itu mencakup “kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi dan hasrat orang



lain.” Dalam kecerdasan antar pribadi yang merupakan kunci menuju pengetahuan diri, ia mencantumkan “akses menuju perasaan-perasaan diri seseorang dan kemampuan untuk membedakan perasaan-perasaan tersebut serta memanfaatkannya untuk menuntun tingkah laku”. (Goleman, 2002 : 53).

Berdasarkan kecerdasan yang dinyatakan oleh Gardner tersebut, Salovey (Goleman, 200:57) memilih kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengungkap kecerdasan emosional pada diri individu. Menurutnya kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain.

Menurut Goleman (2002 : 512), kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (*to manage our emotional life with intelligence*); menjaga keselarasan emosi dan pengungkapkannya (*the appropriateness of emotion and its expression*) melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kecerdasan emosional adalah kemampuan siswa untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan



kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain.

2. Faktor Kecerdasan Emosional

Goleman mengutip Salovey (2002:58-59) menempatkan menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya dan memperluas kemampuan tersebut menjadi lima kemampuan utama, yaitu :

a. Mengenali Emosi Diri

Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Mayer (Goleman, 2002 : 64) kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai emosi.

b. Mengelola Emosi

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar



emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita (Goleman, 2002 : 77-78). Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan.

c. Memotivasi Diri Sendiri

Presatasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasisme, gairah, optimis dan keyakinan diri.

d. Mengenali Emosi Orang Lain

Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut Goleman (2002 :57) kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain.



Rosenthal dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu membaca perasaan dan isyarat non verbal lebih mampu menyesuaikan diri secara emosional, lebih populer, lebih mudah beraul, dan lebih peka (Goleman, 2002 : 136). Nowicki, ahli psikologi menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak mampu membaca atau mengungkapkan emosi dengan baik akan terus menerus merasa frustrasi (Goleman, 2002 : 172). Seseorang yang mampu membaca emosi orang lain juga memiliki kesadaran diri yang tinggi. Semakin mampu terbuka pada emosinya sendiri, mampu mengenal dan mengakui emosinya sendiri, maka orang tersebut mempunyai kemampuan untuk membaca perasaan orang lain.

e. Membina Hubungan

Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi (Goleman, 2002 : 59). Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Individu sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan sulit juga memahami keinginan serta kemauan orang lain.

Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dalam lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan karena



kemampuannya berkomunikasi (Goleman, 2002 :59). Ramah tamah, baik hati, hormat dan disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk positif bagaimana siswa mampu membina hubungan dengan orang lain. Sejuahmana kepribadian siswa berkembang dilihat dari banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukannya.

3. Pengertian Belajar

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari perbuatan belajar, karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut.

Bagi seorang siswa belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidaknya seorang siswa dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa tersebut.

Menurut Logan, dkk (1976) dalam Sia Tjundjing (2001:70) belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan latihan . Senada dengan hal tersebut, Winkel (1997:193) berpendapat bahwa belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas.

Belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, namun dapat dilakukan dimana-mana, seperti di rumah



ataupun dilingkungan masyarakat. Irwanto (1997:105) berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Mudzakir (1997:34) belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.

Di dalam belajar, siswa mengalami sendiri proses dari tidak tahu menjadi tahu, karena itu menurut Cronbach (Sumadi Suryabrata,1998:231) :

“Belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami dan dalam mengalami itu pelajar mempergunakan pancainderanya. Pancaindera tidak terbatas hanya indera pengelihatan saja, tetapi juga berlaku bagi indera yang lain.”

Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa, namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar karena perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas (Muhibbidin Syah, 2000:116) antara lain :

a. Perubahan Intensional

Perubahan dalam proses belajar adalah karena pengalaman atau praktek yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini siswa menyadari bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti

penambahan pengetahuan, kebiasaan dan keterampilan.

b. Perubahan Positif dan aktif

Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta sesuai dengan harapan karena memperoleh sesuatu yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan aktif artinya perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha dari siswa yang bersangkutan.

c. Perubahan efektif dan fungsional

Perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan manfaat tertentu bagi siswa. Sedangkan perubahan yang fungsional artinya perubahan dalam diri siswa tersebut relatif menetap dan apabila dibutuhkan perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan lagi.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, secara sengaja, disadari dan perubahan tersebut relatif menetap serta membawa pengaruh dan manfaat yang positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

4. Pengertian prestasi belajar

Untuk mendapatkan suatu prestasi tidaklah semudah yang dibayangkan, karena memerlukan



perjuangan dan pengorbanan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauhmana ia telah mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. Seperti yang dikatakan oleh Winkel (1997:168) bahwa proses belajar yang dialami oleh siswa menghasilkan perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan dan pemahaman, dalam bidang nilai, sikap dan keterampilan. Adanya perubahan tersebut tampak dalam prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa terhadap pertanyaan, persoalan atau tugas yang diberikan oleh guru. Melalui prestasi belajar siswa dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar.

Sedangkan Marsun dan Martaniah dalam Sia Tjundjing (2000:71) berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa.

Menurut Poerwodarminto (Mila Ratnawati, 1996 : 206) yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan prestasi belajar itu sendiri diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seorang siswa pada jangka waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor sekolah.



Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester di dalam buku laporan yang disebut rapor

5. Pengukuran prestasi belajar

Dalam dunia pendidikan, menilai merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Menilai merupakan salah satu proses belajar dan mengajar. Di Indonesia, kegiatan menilai prestasi belajar bidang akademik di sekolah-sekolah dicatat dalam sebuah buku laporan yang disebut rapor. Dalam rapor dapat diketahui sejauhmana prestasi belajar seorang siswa, apakah siswa tersebut berhasil atau gagal dalam suatu mata pelajaran. Didukung oleh pendapat Sumadi Suryabrata (1998 : 296) bahwa rapor merupakan perumusan terakhir yang diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau hasil belajar murid-muridnya selama masa tertentu.

Syaifuddin Azwar (1998 :11) menyebutkan bahwa ada beberapa fungsi penilaian dalam pendidikan, yaitu :

a. Penilaian berfungsi selektif (fungsi sumatif)

Fungsi penilaian ini merupakan pengukuran akhir dalam suatu program dan hasilnya dipakai untuk menentukan apakah siswa dapat dinyatakan lulus atau tidak dalam program pendidikan tersebut. Dengan kata lain penilaian berfungsi untuk membantu guru



mengadakan seleksi terhadap beberapa siswa, misalnya :

- 1). Memilih siswa yang akan diterima di sekolah
- 2) Memilih siswa untuk dapat naik kelas
- 3). Memilih siswa yang seharusnya dapat beasiswa

b. Penilaian berfungsi diagnostik

Fungsi penilaian ini selain untuk mengetahui hasil yang dicapai siswa juga mengetahui kelemahan siswa sehingga dengan adanya penilaian, maka guru dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing siswa. Jika guru dapat mendeteksi kelemahan siswa, maka kelemahan tersebut dapat segera diperbaiki.

c. Penilaian berfungsi sebagai penempatan (placement)

Setiap siswa memiliki kemampuan berbeda satu sama lain. Penilaian dilakukan untuk mengetahui di mana seharusnya siswa tersebut ditempatkan sesuai dengan kemampuannya yang telah diperlihatkannya pada prestasi belajar yang telah dicapainya. Sebagai contoh penggunaan nilai rapor SMU kelas II menentukan jurusan studi di kelas III.

d. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan (fungsi formatif)

Penilaian berfungsi untuk mengetahui sejauh mana suatu program dapat diterapkan. Sebagai contoh adalah raport di setiap semester di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah dapat dipakai untuk mengetahui apakah program pendidikan yang telah diterapkan berhasil diterapkan atau tidak pada siswa tersebut.



Raport biasanya mengambil nilai dari angka 1 sampai dengan 10, terutama pada siswa SD sampai SMU, tetapi dalam kenyataan nilai terendah dalam rapor yaitu 4 dan nilai tertinggi 9. Nilai-nilai di bawah 5 berarti tidak baik atau buruk, sedangkan nilai-nilai di atas 5 berarti cukup baik, baik dan sangat baik.

Dalam penelitian ini pengukuran prestasi belajar menggunakan penilaian sebagai pengukur keberhasilan (fungsi formatif), yaitu nilai-nilai raport pada akhir masa semester I.

PEMBAHASAN

1. Keterkaitan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar

Di tengah semakin ketatnya persaingan di dunia pendidikan dewasa ini, merupakan hal yang wajar apabila para siswa sering khawatir akan mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan dalam meraih prestasi belajar atau bahkan takut tinggal kelas.

Banyak usaha yang dilakukan oleh para siswa untuk meraih prestasi belajar agar menjadi yang terbaik seperti mengikuti bimbingan belajar. Usaha semacam itu jelas positif, namun masih ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai keberhasilan selain kecerdasan ataupun kecakapan intelektual, faktor tersebut adalah kecerdasan emosional. Karena kecerdasan intelektual saja tidak memberikan persiapan bagi individu untuk menghadapi gejolak, kesempatan ataupun



kesulitan-kesulitan dan kehidupan. Dengan kecerdasan emosional, individu mampu mengetahui dan menanggapi perasaan mereka sendiri dengan baik dan mampu membaca dan menghadapi perasaan-perasaan orang lain dengan efektif. Individu dengan keterampilan emosional yang berkembang baik berarti kemungkinan besar ia akan berhasil dalam kehidupan dan memiliki motivasi untuk berprestasi. Sedangkan individu yang tidak dapat menahan kendali atas kehidupan emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merusak kemampuannya untuk memusatkan perhatian pada tugas-tugasnya dan memiliki pikiran yang jernih.

Sebuah laporan dari National Center for Clinical Infant Programs (1992) menyatakan bahwa keberhasilan di sekolah bukan diramalkan oleh kumpulan fakta seorang siswa atau kemampuan dininya untuk membaca, melainkan oleh ukuran-ukuran emosional dan sosial : yakni pada diri sendiri dan mempunyai minat; tahu pola perilaku yang diharapkan orang lain dan bagaimana mengendalikan dorongan hati untuk berbuat nakal; mampu menunggu, mengikuti petunjuk dan mengacu pada guru untuk mencari bantuan; serta mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan saat bergaul dengan siswa lain. Hampir semua siswa yang prestasi sekolahnya buruk, menurut laporan tersebut, tidak memiliki satu atau lebih unsur-unsur kecerdasan emosional ini (tanpa memperdulikan apakah mereka juga mempunyai kesulitan-kesulitan kognitif seperti ketidakmampuan belajar). (Goleman, 2002:273).



Penelitian Walter Mischel (1960) mengenai “marshmallow challenge” di Universitas Stanford menunjukkan anak yang ketika berumur empat tahun mampu menunda dorongan hatinya, setelah lulus sekolah menengah atas, secara akademis lebih kompeten, lebih mampu menyusun gagasan secara nalar, serta memiliki gairah belajar yang lebih tinggi. Mereka memiliki skor yang secara signifikan lebih tinggi pada tes SAT dibanding dengan anak yang tidak mampu menunda dorongan hatinya (dalam Goleman, 2002 : 81).

Individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik, dapat menjadi lebih terampil dalam menenangkan dirinya dengan cepat, jarang tertular penyakit, lebih terampil dalam memusatkan perhatian, lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain, lebih cakap dalam memahami orang lain dan untuk kerja akademis di sekolah lebih baik (Gottman, 2001:xvii).

2. Pengaruh Kecerdasan Emosional pada Prestasi Belajar

Rendahnya peranan kecerdasan emosi terhadap prestasi belajar disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu sendiri. Prestasi belajar menunjukkan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti program belajar dalam waktu tertentu sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Tes prestasi belajar yang diukur adalah pengetahuan yang dimiliki siswa (soal hafalan) dan bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan soal-soal yang ada (soal hitungan, analisis masalah). Di tingkat SMU, umumnya



soal-soal yang diberikan masih pada tingkat kompetensi *recall*, tingkat kompetensi aplikasi dan analisis cenderung hanya diterapkan pada mata pelajaran matematika, fisika dan kimia. Prestasi belajar biasanya ditunjukkan dalam bentuk huruf atau angka, yang tinggi rendahnya menunjukkan seberapa jauh siswa telah menguasai bahan yang telah diberikan, tetapi hal tersebut sudah tidak dapat diterima lagi karena hasil rapor tidak hanya menunjukkan seberapa jauh siswa telah menguasai materi pelajaran yang telah diberikan. Prestasi belajar juga dipengaruhi oleh perilaku siswa, kerajinan dan keterampilan atau sikap tertentu yang dimiliki siswa tersebut, yang dapat diukur dengan standar nilai tertentu oleh guru yang bersangkutan agar mendekati nilai rata-rata.

Perbedaan budaya dalam pengekspresian emosi dalam suatu negara dengan negara lain juga dapat berpengaruh terhadap rendahnya kecerdasan emosi seseorang. Pengekspresian emosi yang dianggap benar di suatu negara mungkin dianggap tidak benar atau tidak pantas di negara lain. Khususnya di Asia, orang dianjurkan memendam dan menyembunyikan perasaan negatif.

Selain itu, beberapa studi juga menegaskan terpisahnya kecerdasan emosional dari kecerdasan akademis, dan menemukan kecilnya hubungan atau tiadanya hubungan antara nilai tes prestasi akademis atau IQ dan perasaan sejahtera emosional seseorang, sebab orang yang mengalami amarah atau depresi yang hebat masih bisa merasa sejahtera bila mereka mempunyai



kompensasi berupa saat-saat menyenangkan atau membahagiakan (Goleman, 2002 :78). Dari hasil survey besar-besaran di Amerika terhadap orang tua dan guru menunjukkan bahwa anak-anak generasi sekarang lebih sering mengalami masalah emosi daripada generasi terdahulu. Rata-rata, anak-anak sekarang tumbuh dalam kesepian dan depresi, lebih mudah marah dan lebih sulit diatur, lebih gugup dan cenderung cemas, lebih impulsif dan agresif. Hal serupa juga terjadi di negara-negara lain. Menurut Dr. Thomas Achenbach, psikolog dari University of Vermont yang melakukan penelitian tersebut di negara lain mengatakan bahwa menurunnya kemampuan-kemampuan dasar pada anak-anak ini tampaknya bersifat mendunia. Tanda-tanda paling jelas mengenai penurunan ini terlihat dari bertambahnya kasus kaum muda yang mengalami masalah-masalah seperti putus asa terhadap masa depan dan keterkucilan, penyalahgunaan obat bius, kriminalitas dan kekerasan, depresi atau masalah makan, kehamilan tidak diinginkan, kenakalan dan putus sekolah (Goleman, 2001 :17).

Kecerdasan emosi itu sendiri tidak diajarkan secara khusus di sekolah dan tidak tercatat dalam dokumen rapor, seperti nilai-nilai pelajaran ataupun keterampilan lainnya sehingga tidak ada sumbangan secara langsung terhadap peningkatan prestasi belajar.

KESIMPULAN

Keterampilan dasar emosional tidak dapat dimiliki secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan proses dalam



mempelajarinya dan lingkungan yang membentuk kecerdasan emosional tersebut besar pengaruhnya. Hal positif akan diperoleh bila anak diajarkan keterampilan dasar kecerdasan emosional, secara emosional akan lebih cerdas, penuh pengertian, mudah menerima perasaan-perasaan dan lebih banyak pengalaman dalam memecahkan permasalahannya sendiri, sehingga pada saat remaja akan lebih banyak sukses disekolah dan dalam berhubungan dengan rekan-rekan sebaya serta akan terlindung dari resiko-resiko seperti obat-obat terlarang, kenakalan, kekerasan serta seks yang tidak aman (Gottman, 2001 : 250).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor yang penting yang seharusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar yang lebih baik di sekolah..



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mudzakir. (1997). Psikologi Pendidikan. Bandung : Pustaka Setia.
- Goleman, Daniel. (2000). Emotional Intelligence (terjemahan). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Goleman, Daniel. (2000). Working With Emotional Intelligence (terjemahan). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gottman, John. (2001). Kiat-kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional (terjemahan). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irwanto. (1997). Psikologi Umum. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mila Ratnawati. (1996). Hubungan antara Persepsi Anak terhadap Suasana Keluarga, Citra Diri, dan Motif Berprestasi dengan Prestasi Belajar pada Siswa Kelas V SD Ta'Miriyah Surabaya. Jurnal nima Vol XI No. 42.
- Moch, Nazir. (1988). Metodologi Penelitian.Cetakan 3. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Morgan, Clifford T, King, R.A Weizz, JR, Schopler. J, 1986. Introduction of Psychology, (7th ed), Singapore : Mc Graw Hil Book Company
- Muhibbin, Syah. (2000). Psikologi Pendidikan dengan Suatu Pendekatan baru. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- Nana, Sudjana. (2001). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Cetakan ketujuh. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ratna Wilis, D. (1996). Teori-Teori Belajar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Saphiro, Lawrence E. (1998). Mengajarkan Emotional Intelligence Pada Anak. Jakarta : Gramedia.
- Sarlito Wirawan. (1997). Psikologi Remaja. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sia, Tjundjing. (2001). Hubungan Antara IQ, EQ, dan QA dengan Prestasi Studi Pada Siswa SMU. Jurnal Anima Vol.17 no.1
- Sri, Lanawati. (1999). Hubungan Antara Emotional Intelligence dan Intelektual Quetion dengan Prestasi Belajar Siswa SMU. Tesis Master : Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Sumadi, Suryabrata. (1998). Psikologi Pendidikan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .
- Sumadi, Suryabrata. 1998. Metodologi Penelitian. Cetakan sebelas. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Saifuddin, Azwar. (1997). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta : Pustaka Balajar Offset.
- Saifuddin Azwar. (1998). Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi belajar. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Suharsono. (2002). Melejitkan IQ, IE, dan IS. Depok : Inisiasi Press.
- Sutrisno Hadi. (2000). Statistik 2. Yogyakarta : Andi Offset.



Syaiful Bakrie D. (1994). Prestasi belajar dan kompetensi guru. Surabaya : Usaha Nasional.

Winkel, WS (1997). Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta : Gramedia





Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia

Kajian Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Bagaimanapun, hingga hari ini masih banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SD sekalipun. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali. Masih banyak sekolah yang sangat kekurangan guru pengajar. Masih banyak pula guru (honorar) yang dibayar sangat rendah yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan. organis, harmonis, dinamis. guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Selanjutnya

Budaya politik seseorang atau masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat. Hal itu bisa dipahami mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik. Maka, kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakat.

Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Bagaimanapun, hingga hari ini masih banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SD sekalipun. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali.



Masih banyak sekolah yang sangat kekurangan guru pengajar. Masih banyak pula guru (honorar) yang dibayar sangat rendah yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah.

Dengan kondisi tersebut, bagaimana mungkin bangsa ini bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM)-nya sudah lebih maju. Dalam konteks politik khususnya, dengan kondisi pendidikan seperti itu, bagaimana mungkin agenda pendidikan politik bisa dilakukan dengan mulus dan menghasilkan kualitas budaya politik yang diharapkan. Maka, sangat jelas, agenda pendidikan politik mensyaratkan agenda politik pendidikan yang memberikan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat untuk belajar atau mengenyam pendidikan, tanpa ada celah diskriminatif sekecil apa pun, sebagaimana pesan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Konsepsi Politik Pendidikan

Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dalam kamus berarti *acting or judgeing wisely, well-judged prudent*.¹⁶ Kata politik diambil dari kata latin *politicus* atau bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang bermakna *relating to a citizen*. Kata itu berasal juga dari kata polis yang searti dengan city “kota”.

¹⁶ AS, Horny AP, Cowic (ed) *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford Uninersity Press, 1974), hlm. 645; John M Echols dan Hasan Shandily, *Kamus Ingris-Indonesia*, (Jakarta,1981), hlm. 437. pada kamus yang terakhir ini politic diterjemahkan dengan “Bijaksana” atau “dengan bijaksana”

Politic kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu Negara atau terhadap Negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.¹⁷

Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁸ Sedikit berbeda dengan Deliar Noer, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa, pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politices*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹⁹

Dari keterangan-keterangan yang diberikan Deliar Noer, dapat diketahui bahwa politik menurut pendapatnya tidak terbatas pada kegiatan yang

¹⁷ Dalam Bahasa Indonesia kata Politik dapat menunjukkan beberapa makna. Lihat WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa, (Jakarta : Balai Pustaka, 1983), hlm.763; Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, V, Jakarta : Ikhtiar baru van Hoeve ,1983:2739). Di sini politik mempunyai arti sebagai konsep yang berkenaan dengan soal pemerintahan. Arti yang lain, politik mempunyai makna tipu muslihat atau kelecikan sudah tidak dipakai lagi. Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.694

¹⁸Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 11-12

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1982), h. 8

berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) dan kebijakan umum (*public policies*) seperti pendapat Miriam Budiardjo, tetapi juga mencakup pula kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan struktur masyarakat seperti pergeseran kekuasaan politik dari satu rezim ke rezim lain.

Dalam istilah, kata politik, pertama kali dikenal dari buku Plato yang berjudul *politeia*, yang dikenal juga dengan *Republik*.²⁰ Berikutnya muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia*.²¹ Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian.

Dari sekian definisi yang ada paling tidak dapat ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. *Pertama*, pandangan yang mengaitkan politik dengan Negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. *Kedua*, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik.²²

Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pen- dan akhiran -an, dan berarti perbuatan, hal, dan cara.²³ Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat

²⁰ Deliar Noer, op.cit, h.11-12

²¹ Ibid, h.26

²² Lihat Alan C Isaac, *Scope and Methode of Political Science* (Homewood Illios: The Donsey Press,1981), h. 15-16

²³ Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Pranada Media, 2003),hal.8

yang ada pada diri anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.²⁴

Maka, politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu Negara dalam bidang pendidikan yang berupa perturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara.²⁵

Pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar manusia (al-hâjat al-asasiyyah) yang harus dipenuhi oleh setiap manusia seperti halnya pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan perumahan. Pendidikan adalah bagian dari masalah politik (siyâsah) yang diartikan sebagai ri'âyah asy-syu'ûn al-ummah (pengelolaan urusan rakyat) berdasarkan ideologi yang diemban negara.

Berdasarkan pemahaman mendasar ini, politik pendidikan (siyâsah at-ta'lim) suatu negara sangat ditentukan oleh ideologi (pandangan hidup) yang diemban negara tersebut. Faktor inilah yang menentukan karakter dan tipologi masyarakat yang dibentuknya. Dengan demikian, politik pendidikan dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan kualitas human resources (sumberdaya manusia) yang dicita-citakan.

²⁴ Zurinal Z dan Wahdi Sayuti. *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006)

²⁵ Husni Rahim. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Ciputat: Logos Wa cana Ilmu,), hal.9

C. Kebijakan Politik Pendidikan Pemerintahan Indonesia

Kebijakan politik pendidikan Indonesia secara umum dapat dibagi ke dalam empat periode. Pertama kebijakan politik pemerintahan pada masa Pra-kemerdekaan; Kedua, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama; Ketiga kebijakan politik pemerintahan Indonesia masa Orde Baru; dan keempat kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada Orde Reformasi.²⁶

1. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Pra-kemerdekaan

Pada masa pra-kemerdekaan kebijakan politik pemerintahan berada di tangan penjajah Belanda. Pada masa itu Belanda menerapkan politik Diskriminatif terhadap rakyat jajahannya, terutama terhadap umat Islam. Hal ini baru berubah, setelah Belanda mendapatkan tekanan dari dunia internasional. Belanda mulai memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk tenaga kerja yang akan diperkerjakan di pemerintahan Belanda.²⁷

Belanda sangat mencurigai dan tidak suka akan keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, dsb. Dalam keadaan demikian, maka politik pendidikan yang diterapkan umat Islam adalah bersikap non-kooperatif

²⁶ *ibid*, hal 11

²⁷ Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hal.12

dengan Belanda. Ummat Islam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan sistem sekolah , yang diselenggarakan oleh oraganisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, dll. Di lembaga tersebut diajarkan pengetahuan agama, pengetahuan umum, nasionalisme, patriotisme, dll.

2. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Orde Lama

Pada masa ini penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada kedua bidang tersebut tidak lain karena masa tersebut masa krusial pasca kemerdekaan dimana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan terjadi interplay (tarik ulur) antara pihak yang sekuler dengan agamis.

Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada waktu itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot pancasila. Kebijakan politik tersebut sejatinya berupaya menjadi "*win-win solution*" dengan mengakomodasi semua kepentingan. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman baik budaya, seni, maupun agama. Pada dasarnya upaya membangun nasionalisme melalui pendidikan relatif berhasil, hanya saja kurang diimbangi dengan kebijakan yang lain sehingga kemelut bernegara selalu ada di masa tersebut.

Pada masa ini politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya memperbaharui dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman. Namun, kegiatan ini belum terlaksana sepenuhnya, mengingat



Indonesia yang baru saja merdeka masih berada dalam keadaan labil dan mencari bentuk sesungguhnya. Selain itu adanya kekuatan ideologis yang mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut mempengaruhi politik pendidikan Islam pada masa itu. Pemerintah berada dalam tiga tekanan ideologi yaitu ideologi nasionalis, komunis, dan islamis.²⁸ Jadi, politik pendidikan Islam pada masa ini difokuskan pada upaya membendung paham komunis

3. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Orde Baru

Dengan dikeluarkannya undang-undang sistem pendidikan ditahun 1989. Berbeda dengan kebijakan di era orde lama, kebijakan di era orde baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi.

Di masa ini jalur birokrasi sebagai sebuah kepanjangan tangan dari pusat sangat kental. Orang-orang daerah didoktrin sedemikian rupa sehingga menjadi kader-kader yang *'yes man'*, selalu patuh buta terhadap kepentingan pusat. Akibat yang terjadi dari kebijakan ini adalah matinya daya kritis, daya kreatif dan daya inovatif, yang ada hanyalah birokrat yang *"sendikho dhawuh"*. Bahkan sistem pada masa ini berhasil membunuh idealisme. Orang-orang atau cendekia yang idealis, kritis, dan inovatif tiba-tiba memble ketika masuk pada jalur birokrasi.

Disadari bahwa sistem pendidikan nasional pada masa itu sebab kuatnya intervensi kekuasaan sangat mewarnai di setiap aspek pendidikan. Dalam sistem

²⁸ Ibid, hal.13

pendidikan nasional pada masa orba, muatan kurikulumnya sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Beberapa pelatihan di sekolah-sekolah atau instusi-institusi pendidikan pada umumnya lebih mengenalkan indoktrinasi ideologi penguasa. Praktek penataran P4 merupakan salah satu bukti riil dari indoktrinasi ideologi penguasa pada waktu itu.²⁹

Di era ini pula terjadi penyeragaman-penyseragaman sehingga budaya daerah, seni daerah, dan kearifan lokal mengalami nasib yang tragis, bahkan banyak yang telah mati. Yang tersisa hanyalah seni dan budaya yang sifatnya mondial. Bahkan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sejatinya bermakna berbeda-beda tetapi satu jua telah dimaknai menjadi sesuatu entitas yang seragam, ya serba seragam.

Politik pendidikan pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Ada beberapa karakteristik pemerintahan Orde Baru yang kurang kondusif bagi pengembangan pendidikan Islam, karakter tersebut antara lain:

- 1) Pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang kuat dan dominan
- 2) Pemerintahan Orde Baru melengkapi dirinya dengan aparat keamanan represif serta aparat politik-ideologis untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya

²⁹ Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan. Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*. Yogyakarta : Pinus Book Publisher 2008, hal:13



3) Pemerintahan Orde Baru sejak awal mendapatkan dukungan dari Kapitalisme internasional.

Politik Pendidikan Orde Baru mengacu kepada GBHN yang mulai diberlakukan sejak tahun 1973-1998. Kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan adalah :

- Melanjutkan program pemberantasan buta huruf
- Melaksanakan pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan, mental, spiritual, dan keterampilan
- Mengenalkan pendidikan luar sekolah
- Pembinaan generasi muda
- Dilaksankannya proram orang tua asuh mulai tahun 1984.

Pada masa Orde Baru muncul SKB 3 menteri yang secara formal sudah memberi pengakuan kesetaraan, namun di lapangan masih belum diterima penuh, masih banyak perlakuan diskriminatif dalam penerimaan lulusan madrasah. Barulah ketika UU no.2 tahun 1989 madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulumnya sama persis dengan kurikulum sekolan plus agama. ³⁰

1. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Reformasi

Pemerintahan Reformasi ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi. Mahasiswa sudah memiliki kebebasan yang luar biasa. Mereka dapat merancang berbagai program sesuai dengan aspirasi yang berkembang. ³¹

³⁰ Husni Rahim. *Op.cit*, hal.90

³¹ *Ibid*

Kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional N0 20 tahun 2003. Di era reformasi ini penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat dan berjalan secara *top-down* diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas sehingga pola yang berjalan adalah *bottom-up*.

Regulasi yang relatif longgar di era reformasi ini ternyata belum memberi angin segar bagi dunia pendidikan, bahkan banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalih demokratisasi dan desentralisasi. Demokrasi telah menjadi kebebasan dan desentralisasi daerah telah menjadi keangkuhan daerah.

Bahkan di era ini semakin jelas keterpurukan masyarakat miskin karena semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Lebih dari itu implementasi kebijakan pendidikan yang demokratis dan mengedepankan potensi daerah semakin dinafikkan. Sistem evaluasi yang masih terpusat, kekerasan dalam pendidikan, dan banyaknya penyimpangan dalam proses pendidikan semakin memberi catatan buram bagi pendidikan di era reformasi ini.

Kebijakan politik yang paling di sorot pada masa ini adalah kebijakan- kebijakan tentang otonomi daerah dalam bidang pendidikan, penerapan kurikulum yang berganti-ganti, hingga yang diterapkan saat ini yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan pro dan kontra yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional.

a. Otonomi Daerah dalam bidang pendidikan



Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera.

Desentralisasi bidang pendidikan dimulai dengan keluarnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian ditindak lanjuti dengan PP No. 20 tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang sektor-sektor yang didesentralisasikan dan yang tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pendidikan termasuk salah satu sektor yang didesentralisasikan, sehingga sejak itu pendidikan terutama dari TK sampai dengan SMA menjadi urusan kabupaten/kota. Sedangkan pendidikan tinggi menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Provinsi..

Sejak urusan pendidikan didesentralisasikan, signal-signal adanya banyak masalah baru sudah tampak. Diantaranya, adalah tarik menarik kepentingan untuk urusan guru serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gedung sekolah. Pengelolaan guru menjadi tarik menarik, karena jumlahnya yang banyak, sehingga banyak kepentingan politik maupun ekonomi yang bermain di dalamnya. Sedangkan pembangunan gedung sekolah, utamanya gedung SD menjadi lempar-lemparan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemda karena besarnya dana yang diperlukan untuk itu.



Sementara, di lain pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemda sama-sama mengeluh tidak memiliki dana.

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan angin segar bagi dunia pendidikan dasar dan menengah. KTSP dimaknai sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini berarti satuan pendidikan tertantang untuk menterjemahkan standar isi yang ditentukan oleh Kemendikbud. Bahkan diharapkan sekolah mampu mengembangkan lebih jauh standar isi tersebut.

Meskipun sekolah diberi kelonggaran untuk menyusun kurikulum, namun tetap harus memperhatikan rambu-rambu panduan KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hal ini diharapkan agar selalu ada sinkronisasi antara standar isi dan masing-masing KTSP.

Dalam prakteknya, peluang ini juga akan menghadapi kendala yang tidak ringan, *Pertama*, belum semua guru atau bahkan kepala sekolah mempunyai kemampuan untuk menyusun kurikulum. *Kedua*, semua komite sekolah atau bahkan orang Kemendikbud belum memahami tatacara penyusunan sebuah kurikulum yang baik. *Ketiga*, kebingungan pelaksana dalam menterjemahkan KTSP.

Sudah sering dikemukakan oleh berbagai kalangan, ketidaklogisan KTSP terjadi karena seolah diberikan kebebasan untuk mengolaborasikan kurikulum inti yang dibuat Kemendikbud, tetapi evaluasi nasional oleh



pemerintah dengan melalui Ujian Nasional (UN) justru yang paling menentukan kelulusan siswa. Belum lagi seringnya muncul aturan baru ketika penguasa berganti padahal aturan yang sudah ada saja belum di pahami.

c. Ujian Nasional

Kebijakan pemerintah melaksanakan Ujian Nasional selalu menghadirkan pro dan kontra. Bagi yang sependapat UN merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di negeri ini. Sementara bagi yang kontra, UN justru akan membebani siswa dalam belajar. Bahkan menjadi hantu yang menakutkan dan kemungkinan besar justru mematikan potensi anak. Lepas dari setuju tidak setuju, UN sebenarnya diperlukan dalam memotret pemetaan kualitas satuan pendidikan nasional. Namun yang sering dikeluhkan, kenapa UN dijadikan alat vonis penentuan kelulusan? Adilkah suka duka siswa dalam belajar selama tiga tahun hanya ditentukan nasibnya selama tiga hari pelaksanaan UN?

Kontroversi mengenai ujian nasional (UN) kebijakan ini dengan jelas menggambarkan betapa lemahnya visi pemerintah dalam kebijakan pendidikan selama ini. Visi adalah sebuah jangkauan terpanjang dari apa yang hendak dicapai dan dituju. Tetapi kalau suatu kebijakan hanya diarahkan semata-mata untuk mengejar target, di mana visi pendidikan kita yang mencerdaskan itu ? Inilah yang membuat paradigma pendidikan menjadi semakin tidak jelas. Sasaran apa yang hendak dicapai?



Kita menghadapi persoalan sangat mendasar dalam konteks kebijakan ini. Apakah dengan adanya Ujian Nasional ini mutu pendidikan kita bisa ditingkatkan? Sayang sekali pertanyaan ini selalu luput dari perhatian. Mutu pendidikan bukan hanya sekedar ditentukan oleh Ujian Nasional melainkan pada paradigma pendidikan itu sendiri. Selama ini kita sering menjadikannya sebagai tolok ukur prestasi, padahal secara substansial hal itu tidak pernah menjadi bukti. Justru pendidikan kita semakin terperosok karena kebijakan tersebut selalu dibarengi dengan perilaku tak terpuji seperti korupsi, manipulasi anggaran, dan kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan untuk mempertahankan kredibilitas sekolah maupun daerah.

D. Realitas Politik Pendidikan

Sampai saat ini, realitas politik pendidikan di negara kita masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa kita lihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya.

Pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra pendidikan sejak tahun 2005-2009 dan 2009-2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan



dicapai, yaitu meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan, dan meningkatnya tata pemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada 2012 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar, perbaikan kurikulum pendidikan, dan tuntutan profesionalisme dan kesejahteraan guru.

Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar, masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Selain itu, ada beberapa agenda yang perlu diperhatikan untuk menentukan arah dan masa depan politik pendidikan, diantaranya adalah, *Pertama*, menghapus dikotomi dualisme penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Pendidikan yang berada di bawah naungan



Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Agama harus berjalan seimbang dalam hal mutu, kualitas dan kemajuannya. Sehingga tidak ada lagi pandangan bahwa pendidikan keagamaan terkesan tidak bermutu dan terbelakang.

Kedua, peningkatan anggaran pendidikan. Kita semua menyadari, bahwa untuk memajukan dunia pendidikan nasional, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD adalah menjadi keniscayaan, jika kita betul-betul serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan, UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) telah mengamanahkannya. Namun persoalannya kemudian ketika anggaran pendidikan sudah 20% seringkali tidak tetap sasaran.

Ketiga, pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah dan pemerintah daerah harus punya kemauan kuat untuk bisa membebaskan siswa dari biaya operasional pendidikan untuk tingkat sekolah dasar dan menengah.

Keempat, perbaikan kurikulum. Pendidikan mesti diarahkan pada sistem terbuka dan multimakna serta pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Karena itu, kurikulum pendidikan harus mampu membentuk insan cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kebebasan mengembangkan potensi diri. Pendidikan juga mesti diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajarannya.



Kelima, penghargaan pada pendidik. Pemerintah harus lebih serius meningkatkan kualifikasi, profesionalisme dan kesejahteraan guru. Sebab, guru merupakan pilar utama pendidikan dan pembangunan bangsa. Tanpa guru yang profesional dan sejahtera, mustahil pendidikan kita akan maju dan berdaya saing.

Keenam, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta perluasan akses pendidikan. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi menyediakan sarana dan prasarana sekolah khususnya daerah terpencil untuk memudahkan akses dan pemerataan pendidikan bagi warga negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan SDM bangsa Indonesia.

E. Penutup

Politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini.

Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Semenjak kemerdekaan sampai dengan era reformasi perjalanan politik pendidikan nasional telah mengalami tiga kali



perubahan, yaitu di era orde lama, pada tahun 1954, di era orde baru, dan saat ini di era reformasi.

Budaya politik masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa dipahami mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik. Maka, kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakat.

Keberanian kaum pendidik meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan sudah barang tentu merupakan terobosan besar, yang pada saatnya nanti diharapkan akan mampu melahirkan suatu budaya politik baru, budaya politik yang akan mendorong pelaku politik kita bertindak jujur dan cerdas, atau paling tidak bersedia meredusir unsur-unsur hedonistis dan mengoptimalkan watak humanistik-patriotik.

Semoga kita secara bersama mampu memerdekakan politik pendidikan yang prospektif dan menjanjikan kemajuan masa depan bangsa. Sehingga, cita-cita untuk menjadi bangsa besar yang berperadaban tinggi mampu kita raih.



Daftar Pustaka

- Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Pranada Media, 2003
- Alan C Isaac, *Scope and Methode of Political Science* (Homewood Illios:
The Donsey Press,1981
- AS, Horny AP, Cowic (ed) *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford Uninersity Press, 1974
- Chan, Sam M, Tuti T. Sam. 2006. *Ananlisis SWOT. Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan. Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Husni Rahim. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Ciputat: Logos Wa cana Ilmu,
- Jamil Saliba. *Mu'jam al-Salafi*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1978
- John M Echols dan Hasan Shandily, *Kamus Ingris-Indonesia*, (Jakarta,1981
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1982

- Mu'arif. 2008. *Liberalisasi Pendidikan. Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*. Yogyakarta : Pinus Book Publisher
- Satmoko, Retno Sriningsih, 1999. *Landasan Kependidikan. Pengantar ke arah Ilmu Pendidikan Pancasila*. Semarang : CV IKIP Semarang Press
- Suhartono, Suparlan. 2008. *Wawasan Pendidikan. Sebuah Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sukarna, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Mandar Maju, 1994
- Pidarta, Made. 2006. *Landasan Kependidikan. Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Wahyudin, Dinn, D. Supriadi, Ishak Abdulhak. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1983
- Zurinal Z dan Wahdi Sayuti. *Ilmu Pendidikan* ,(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006





Madrasah Diniyah : Studi Kebijakan Wajib Belajar Di Purwakarta

Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertindak mewakili pemerintah dalam segala hubungan hukum. Ia mempunyai kewenangan terhadap pengaturan kebijakan publik maupun privaat. Dengan demikian dalam praktek pembuatan peraturan perundang-undangan dapat lahir berdasarkan inisiatif badan legislatif atau inisiatif badan eksekutif. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah akan berdampak

kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan studi kebijakan publik dapat dikatakan bawah kebijakan wajib belajar madrasah diniyah di kabupaten Purwakarta menunjukkan dampak positif terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam. Indikator perubahan kearah yang lebih baik ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya partisipasi peserta didik, (2) keragaman kualifikasi tenaga pendidik, (3) adanya standarisasi kurikulum, (4) tersedianya sarana pendidikan, (5) tersedianya pembiayaan, (6) terlaksananya kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan, dan (7) pengelolaan pendidikan bersifat terbuka

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam yang bersifat nonformal dalam bentuk madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan pertama dan tertua di Indonesia. Ia telah beraktivitas sebelum masa penjajahan hingga bangsa ini merdeka sampai sekarang. Lembaga ini telah berjasa mencerdaskan anak-anak bangsa yang kurang mampu. Namun begitu, keberadaan pendidikan madrasah diniyah hingga saat ini belum dapat memenuhi harapan masyarakat, karena penyelenggaraannya belum kondusif.

Pencitraan terhadap lembaga pendidikan Islam yang kumuh, tenaga pendikinya tidak berkualifikasi serta manajemennya semrawut masih belum sirna dalam pikiran masyarakat. Hal ini memberi kesan negatif



sehingga lembaga ini tidak dilirik masyarakat sebagai tujuan utama pendidikan bagi anaknya. Studi tentang pendidikan Islam dengan situasi dan kondisi seperti itu sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi. Kajiannya banyak ke arah substansi pendidikan meliputi kurikulum, media, metode, keadaan siswa, tenaga pendidik dan manajemennya.

Pada pemerintahan yang bersifat desentralistik ini beberapa pemerintahan daerah di Indonesia telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah. Tujuannya sebagai upaya pemberdayaan pendidikan Islam bagi masyarakat melalui lembaga pendidikan Madrasah Diniyah. Bagaimana Wajib Belajar Madrasah Diniyah diselenggarakan? Wajib belajar madrasah diniyah adalah kebijakan pendidikan yang diatur melalui Peraturan Daerah. Ia sebagai regulasi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi penyelenggara pendidikan Islam, masyarakat, orang tua dan anak usia sekolah yang masuk ke dalam kategori wajib belajar.

Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dilakukan studi dengan pendekatan kebijakan. Studi kebijakan publik dapat menjelaskan latar belakang, proses, tujuan dan implementasinya. Apakah dengan diberlakukan kebijakan tersebut dapat mencapai outcomes yang diharapkan oleh penentu kebijakan? Studi kebijakan publik sebagai salah satu disiplin ilmu untuk menganalisis kebijakan di bidang pendidikan/pendidikan



Islam sangat diperlukan sebagai kajian alternatif. Teori yang mendasarinya bahwa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang mengatur ranah publik bagi kepentingan Negara dan masyarakat.

2. Studi Kebijakan Pendidikan

Kejelasan maknawiyah tentang kebijakan dapat ditelusuri dari beberapa bahan pustaka (litelatur) yang pada umumnya menyatakan bahwa kebijakan pendidikan tidak lepas kaitannya dari kebijakan tentang ketatanegaraan. Pada kebanyakan litelatur, studi tentang kebijakan sering dianggap lebih dekat. pada Administrasi Negara dibandingkan dengan Ilmu Politik.

Wiliam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut: “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132).

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.



Sementara Kebijakan publik, menurut Riant Nugroho, dalam bukunya Kebijakan Pendidikan yang Unggul (2008: 32), memiliki ciri-ciri bahwa: (1) kebijakan publik ditetapkan oleh Negara melalui lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, (2) kebijakan publik mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, (3) kebijakan publik mengatur pada wilayah publik dan lembaga publik, (4) kebijakan publik mengatur masalah bersama atau mengatur masalah pribadi atau golongan yang menjadi masalah publik, dan (5) kebijakan publik memiliki tingkat eksternalitas yang tinggi bagi pengguna langsung maupun pengguna tidak langsung.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Berdasarkan teori tersebut kebijakan wajib belajar madrasah diniyah dapat dilihat dari segi konsep dan tujuannya. Konsep kebijakan publik meng-agendakan terlaksananya kepentingan penyelenggaraan Negara dan terpenuhinya kepentingan masyarakat dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini diperlukan regulasi yang berlaku untuk semua yang disebut kebijakan publik. Dengan memahami fakta ini, maka kebijakan publik dapat menentukan keberhasilan dan/atau kegagalan



pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama masyarakat.

Dalam studi ini, penulis sependapat dengan Nugroho dalam memahami kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh institusi Negara sebagai upaya pemenuhan kepentingan pemerintah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keputusan yang dilakukan oleh pihak eksekutif dengan/maupun legislatif yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat bersifat regulatif maupun normatif. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Neil berpendapat bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi Negara-bangsa dalam persaingan global. Kebijakan pendidikan perlu mendapat perhatian utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi harus didukung oleh pendidikan.

Margaret E. Goertz menyatakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini sangat penting dengan meningkatnya kritis publik terhadap biaya pendidikan gratis yang berkaitan dengan program wajib belajar. Program ini memberikan akses kepada setiap usia belajar untuk mengikuti pendidikan secara gratis dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan pemerintah



di bidang pendidikan. Selanjutnya Goertz seperti dikutip Nograho menyatakan, bahwa:

“...An increased emphasis on educational adequacy and the public’s concern over the high cost of education is focusing policy makers’ attention on the efficiency and effectiveness of educational spending...”

Adanya peraturan kebijakan merupakan suatu tuntutan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan daerah. Ia dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut H. Abdul Latief, istilah peraturan kebijakan atau dalam praktik sering disebut peraturan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia termasuk dalam kategori hukum yang mengikat.

Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan daerah. Konsekuensi yuridis dari kebijakan pemerintah dapat melahirkan berbagai kebijakan pengaturan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam hal ini Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertindak mewakili pemerintah dalam segala hubungan hukum. Ia mempunyai kewenangan terhadap pengaturan kebijakan publik maupun privat. Dengan demikian dalam praktek



pembuatan peraturan perundang-undangan dapat lahir berdasarkan inisiatif badan legislatif atau inisiatif badan eksekutif. Dari pihak mana pun inisiatif peraturan perundang-undangan itu gagasannya, yang terpenting adalah berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah akan berdampak kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebijakan publik tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi memerlukan kajian akademis yang cermat dan tepat sasaran serta memudahkan pada tahap implementasinya. Prosedur lahirnya suatu peraturan perundang-undangan itu perlu ditempuh untuk meminimalisir resiko politik, ekonomi, sosial dan sebagainya yang tidak diharapkan.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pada kasus-kasus tertentu diperlukan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dapat memberdayakan pendidikan Islam. Dalam catatan sejarah di masa lalu, pendidikan Islam itu berkembang secara pesat karena adanya keterlibatan otoritas publik (kekuasaan) yang dapat memaksa pihak-pihak lain untuk melaksanakannya.

3. Wajib Belajar Madrasah Diniyah

Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar tidak mengatur Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan nonformal yang dapat



menyelenggarakan wajib belajar. Munculnya kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah di beberapa daerah di Indonesia seperti di wilayah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan perlu mendapat apresiasi dari segi kebijakan publik. Pada masa otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kesempatan terbuka dan luas dalam menetapkan kebijakannya yang disebut *freies ermessen*.

Kebijakan bidang pendidikan Islam selama ini masih urusan pemerintah di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Kementerian ini secara fungsional tetap mempunyai tanggung jawab terhadap keberadaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam. Namun demikian, ia sebagai instansi vertikal mengalami hambatan struktural dalam memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pendidikan Islam, khususnya madrasah diniyah di daerah. Karena itu pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pendidikan jalur nonformal seperti Madrasah Diniyah ini banyak mengalami hambatan sehingga tidak berkembang sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk menerobos hambatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta salah satu daerah di wilayah provinsi Banten telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Ia merupakan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan Islam di daerah. Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah ini diperuntukkan bagi setiap warga negara untuk



menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab Pemerintah Daerah. Lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar. Ia berfungsi untuk memenuhi masyarakat terhadap pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang beragama Islam di Sekolah Umum. Selain itu juga untuk memberi bekal kemampuan Agama Islam kepada peserta didik sebagai warga muslim supaya beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Wajib belajar madrasah diniyah Takmiliyah diselenggarakan selama 4 (empat) tahun yang wajib diikuti oleh setiap warga belajar berusia 6-12 tahun. Ia sebagai persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Kebijakan tersebut dipihak satu dapat memperkuat pendidikan Islam bagi masyarakat, namun dipihak lain pemerintah daerah wajib menyiapkan sarana, prasarana, sumber daya guru dan biaya pendidikan diniyah.

Berdasarkan studi kebijakan publik dapat dikatakan bawah kebijakan wajib belajar madrasah diniyah di kabupaten Purwakarta menunjukkan dampak positif terhdap penyelenggaraan pendidikan Islam. Indikator perubahan kearah yang lebih baik ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya partisipasi peserta didik, (2) keragaman kualifikasi tenaga pendidik, (3) adanya



standarisasi kurikulum, (4) tersedianya sarana pendidikan, (5) tersedianya pembiayaan, (6) terlaksananya kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan, dan (7) pengelolaan pendidikan bersifat terbuka.

Dampak positif dari penyelenggaraan wajib belajar madrasah diniyah ditunjukkan oleh outcomes dengan meningkatnya prestasi belajar mata pelajaran agama Islam bagi peserta didik di Sekolah Dasar. Peningkatan prestasi belajar dari ditunjukkan dari nilai rata-rata 6,2 poin menjadi 8,7 poin.

Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah dilihat dari studi kebijakan publik merupakan peraturan kebijakan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara terdapat dua jenis peraturan yang berlaku secara berdampingan, yaitu (1) peraturan perundang-undangan dan (2) peraturan kebijakan. Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan bersumber dari kekuasaan pemerintahan, sedangkan peraturan kebijakan berasal dari kebebasan bertindak pemerintah/pemerintah daerah untuk menerobos kebekuan atau menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi pemerintahan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas pendidikan di daerah dapat menyelenggarakan pendidikan Islam melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan. Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah ini dianggap progresif sebagai upaya pengembangan pendidikan madrasah diniyah yang bersifat legal-formal.



4. Kesimpulan

Kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah yang berorientasi pada tujuan Perda yang menghasilkan kualitas peserta didik sebagai warga muslim/muslimah yang beriman kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan bertanggung jawab, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh karena belum adanya peraturan bupati yang menjalankan perda, sehingga terkesan tidak optimal, diperlukan komitmen Bupati untuk menerbitkan peraturan Bupati yang menjalankan peraturan daerah tentang wajib belajar madrasah diniyah takmiliah awaliyah.



Daftar Pustaka

- Abidin, Said, Zaenal (2006) , *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas
- Abdul Wahab, S. 1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, S. 1999. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang: PT Dinar Wijaya
- Asrohah, Hanun. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos
- Attamimi, A.Hamid, (1993), *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Peraturan)*, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, 20 September 1993
- Agus, Leo (2006), *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- At-Taftazani. (1993). "Sumbangan Tasawuf kepada Pendidikan." Dalam Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar (ed.), *Islam Negara dan Hukum*. Jakarta: INIS. 133-140
- Azra, Azyumardi. (2003). *Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos
- (2003). *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos
- Bafadal, Fadhal A.R. et al. (1992). *Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Keagamaan: Studi tentang Madrasah Diniyah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama

- Darajat, Zakiah (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dhofier, Zamakhsyari. 1983. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta: LP3ES
- Departemen Agama, (1997), *Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,.
- Departemen Agama, (1998) *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,.
- Departemen Agama, (1996) *Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pendidikan*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
- Departemen Agama, (2003) *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
- Departemen Agama, (2009) *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliah*, Direktorat Jendral Pendidikan Islam,
- Dunn, William N. (1994), *Public Policy Analysis: An Introduction*, NJ: Prentice-Hall
- HR, Ridwan (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada
- Isnani, Muhammad (2005). *Studi Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dinniyah di Indonesia*, Palembang: IAIN Raden Fatah
- Islamy, M Irfan. 2001. *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang



- Kementrian Agama, (2010), *Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Standar Isi) di Provinsi Jawa Barat*, Bandung: Kantor Wilayah Jawa Barat
- Latief, H. Abdul (2005), *Hukum da Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintah Daerah*, Jogjakarta: UII Press
- Mahfudz, Kjhalid Abdu. (2003), *Sunan At-Tirmidzi*, Libanon, Beirut : Dar al-Kutub AL-Ilmiah
- Miles, M. B. dan Huberman, M. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: UI Press
- Noer, Deliar. (1982). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Nata, H. Abuddin (2009), *Ilmu Pendidikan Islam dengan pendekatan Multidisipliner, Normatif, Perenealis, sejarah, filsafat, psikologi, manajemen, teknologi, informasi, kebudayaan, politik hokum*, Jakarta: Rajawali Press
- Nizar, Samsul, (2001), *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Parson, Wayne. (2001), *Public Policy: An Introduction to the Theory and practice of Policy Analisis*
- Rahim, Husni, (2005). *Madrasah dalam politik pendidikan Indonesia*, Jakarta: Logos
- Subarsono, AG (2010), *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Suharto, Edi (2008) *Analisis kebijakan public panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan social*, Bandung: Alfa Beta



- Sukmadinata, Nana Syaodih, (2010), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosyda Karya
- Steenbrink, Karel A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES
- Sudjana, Djuju, (2006), *evaluasi program pendidikan lar sekolah untuk pendidikan nonformal dan pengembangan sumberdaya manusia*, Bandung: PT. Remaja Rosydakarya
- Tim Penyusun Pola Pemberdayaan Madrasah Diniyah Jawa Barat. (2005). *Pola Pemberdayaan Madrasah Diniyah Di Jawa Barat*. Bandung: Pemerintah Propinsi Jawa Barat
- Tilaar, HAR, (2000), *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta
- Tilaar, HAR & Nugroho, Riant, (2009), *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Public*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Wahid, Abdurrahman. (1999). *Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Wibawa, S. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wibawa, Samodra, (1994), *Kebijakan Publik: Proses Dan Analisis*, Jakarta : Intermedia
- Winarno, Budi (2008), *Kebijakan Publik teori dan Proses*, Yogyakarta: PT. Buku kita





Pemikiran Pendidikan Islam : Doktrin Islam Tentang Pendidikan

Dalam Islam berlaku rumusan, semakin seseorang berilmu, semakin bertakwa kepada Allah. Nilai syari'ah memotivasi bahwa ilmu harus melahirkan prilaku yang dihalalkan dan bukan prilaku yang diharamkan Allah. Dan terakhir, nilai khalifah yang menjadikan ilmu harus mencerminkan sistem dan metode mewujudkan tugas khalifah umat manusia sebagai amanah Allah yang wajib ditunaikan guna mewujudkan Islam sebagai rahmatan li al'alamain

PENDAHULUAN

Istilah pendidikan kerap diartikan secara longgar dan dapat mencakup berbagai persoalan yang luas. Namun demikian, pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari sudut pandang masyarakat, dan kedua dari segi pandang individu. (Langgulung, 2000 : 1).

Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewaris kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. Dari segi individu pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terdalam. Pandangan lainnya adalah pendidikan yang ditinjau dari segi masyarakat dan dari segi individu sekaligus. Dengan kata lain, pendidikan dipandang sebagai sekumpulan pewaris kebudayaan dan pengembang potensi-potensi.

Pada pengembangannya pendidikan dipahami orang tidak hanya dari tiga sudut pandang di atas, bahkan melahirkan teori-teori baru yang tentu saja sangat positif bagi kegiatan pengkajian. Namun, tidak hanya sampai di situ, perkembangan ini pula telah melahirkan berbagai keracunan dari pengertian pendidikan itu sendiri.

PEMBAHASAN

A. Doktrin Islam Tentang Pendidikan

Pembahasan tentang doktrin Islam tentang pendidikan, penulis mencoba memulainya dari sumber-sumber yang ada dalam Alquran. Menurut Hasan Langgulung, istilah pendidikan yang dalam bahasa Arab



bisa dipergunakan *ta'lim* sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 31. Yang artinya: *"Dan Allah mengajarkan Adam segala macam nama, kemudian Ia berkata kepada malaikat : beritahukan Aku nama-nama semua itu jika kamu benar"* (QS. Al-Baqarah : 31)

Di samping kata *ta'lim*, kata *tarbiyah* juga dipergunakan untuk pendidikan, seperti yang temuat dalam surat Bani Israil : 24. Yang artinya: *"... Hai Tuhanku, sangilah keduanya sebagaimana mereka mendidiku sewaktu kecil."* (QS. Bani Israil : 24).

Para ahli berpendapat bahwa kata *ta'lim* hanya menrujuk kepada pengajaran, sedangkan kata *tarbiyah* merujuk pada pendidikan dalam lingkup yang lebih luas lagi. Jadi, kata *tarbiyah* lebih luas pengertiannya ketimbang kata *ta'lim*.

Lebih jauh lagi, pendidikan dalam pengertian seluas-luasnya muncul dan kemudian berkembang seiring dengan diturunkannya Alquran kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw. Wahyu pertama sarat dengan spirit bagaimana usaha-usaha pendidikan dimulai. Dalam konteks masyarakat Arab, kedatangan Islam merupakan transformasi besar. Sebab, masyarakat Arab pra-Islam pada dasarnya tidak mempunyai sistem pendidikan formal. Dari segi historis, salah satu tugas dari Nabi Muhammad adalah melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya. Dan Allah Swt telah mendidik dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna, malalui pengajaran, pengenalan, serta



dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan budayanya. (Azra, 1999 : vii).

Tema pendidikan ini secara implisit dapat dipahami dari wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sebagai spirit terhadap tugas kependidikan yang pertama dan utama yang dilakukan Nabi. Dalam surat Al Alaq yang artinya: *“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari gumpalan darah. Bacalah demi Tuhanmu yang paling Pemurah. Yang mengajar dengan perantaraan kalam. Yang mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahui.”* (Al-‘Alaq : 1 – 5).

Bertolak dari spirit di atas, Nabi Muammad mulai melaksanakan tugas sebagai pendidik yang dimulai dari lingkungan keluarga dekatnya, kemudian melebar ke wilayah sosial yang lebih luas lagi. Mahmud Yunus, dalam bukunya *“Sejarah Pendidikan Islam,”* menuliskan bahwa pendidikan Islam pada fase ini meliputi empat hal :

Pertama, pendidikan kegamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata, jangan dipersekutukan dengan nama berhala, karena Tuhan itu Maha Besar dan Maha Pemurah. Sebab itu hendaklah dienyahkan berhala itu sejauh-jaunya.

Kedua, pendidikan akaliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Allah akan mengajarkan demikian itu kepada orang-orang yang mau menyelidiki dan membahasnya. Sedangkan mereka dahulu belum mengetahuinya. Untuk mempelajari hal-hal itu haruslah



dengan banyak membaca dan menyelidiki serta memakai pena untuk mencatat.

Ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, Nabi Muhammad Saw Mengajar sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid.

Keempat, pendidikan jasmani (kesehatan), yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan dan tempa kediaman. (Zuhairini , 2000 : 18-50)

Oleh karena Alquran memuat sejumlah dasar umum pendidikan, maka Alquran sendiri pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai pedoman normatif-teorititis dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Ayat-ayat yang tertuang dalam Alquran merupakan prinsip dasar yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli menjadi suatu rumusan pendidikan Islam yang dapat mengantarkan pada tujuan pendidikan yang sebenarnya.

Secara eksplisit, percakapan dalam Alquran tentang pendidikan sudah pasti melabar kepada pujian Alquran terhadap orang-orang beriman dan kepada ilmu-ilmu itu sendiri. Firman Allah yang artinya: *"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di atara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."* (Al-Mujadalah : 11)

Pada kenyataanya, struktur dari peradaban Islam, dari semenjak perkembangan Islam paling awal secara keseluruhan berasal dari spirit Alquran di samping konsep-konsep ilmu yang ada dalam Alquran. Kemudian prinsip ini dijadikan sebagai *Weltanschauung* yang melatarbelakangi keberadaan manusia secara global dan



diinspirasi dari era bagaimana konsep ilmu itu didefinisikan. Lebih dari itu, konsep serupa ini memformulasikan model pikiran dan penelitian yang dilakukan oleh umat Islam dalam rangka melihat realitas mengembangkan masyarakat yang tentunya lewat usaha-usaha pendidikan. Konsep ilmu sendiri yang termuat dalam Alquran seperti dinyatakan Ziauddin Sadar adalah sebuah nilai yang menakala dipahami dengan baik dari bingkai Islam, akan melahirkan sesuatu mengenai konsep Islam itu sendiri. Tidak kurang dari 1200 definisi telah dibuat oleh para ahli dan menjadi tema utama para penulis besar, seperti al-Kindi, al-Farabi, al-Biruni dan Ibnu Khaldun.

Allah Swt berfirman yang artinya:

"Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman. 'Sebutkanlah kepadaKu nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar.'" (QS. Al-Baqarah : 31).

Di sini dapat dipahami bahwa ayat di atas merupakan kunci ayat yang berkaitan dengan ilmu. Imam al-Gahazali menafsirkan bahwa nama-nama (asma) adalah sejumlah contoh, Ibnu Abbas sendiri menafsirkan bahwa Adam telah diajarkan semua nama yang baik maupun yang buruk.

Bagaimanapun ayat di atas juga dapat dipahami dengan pendekatan subjek dengan objeknya. Sebab "penyebutan nama" berkaitan dengan "nama yang disebut" sebagai objeknya. Di sinilah prinsip pendidikan



juga berasal, sebab kata asma juga berarti sebagai bentuk ilmu yang dapat dipahami dengan jalan pengajaran ('allama). Setidaknya, ayat di atas sudah memberikan jalan bagi umat manusia bagaimana ilmu itu dapat diperoleh.

Seperti halnya Alquran, Sunnah juga memberikan rambu-rambu tentang pentingnya pendidikan. Konsepsi dasar pendidikan yang dicetuskan Nabi Muhammad Saw menurut Muhaimin memiliki enam corak. Pertama, disampaikan sebagai "rahmat li al'alamina yang ruang lingkungannya tidak hanya sebatas manusia, tetapi juga makhluk biotik dan abiotik lainnya. Kedua, disampaikan secara universal, mencakup dimensi kehidupan apapun yang berguna untuk kegembiraan dan peringatan bagi umatnya. Ketiga, apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak dan keotentikan kebenaran itu terus terjadi. Keempat, kehadiran Nabi sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan terus bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan. Kelima, prilaku Nabi tercermin sebagai *uswatun hasanah*, yaitu sebuah figur yang meneladani semua tindak-tanduknya karena prilakunya terkontrol oleh Allah, sehingga hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Keenam, masalah teknis-praktis dalam pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan penuh pada umat.

Secara sederhana para ahli pendidikan Islam mencoba mengembangkan konsep-konsepnya dari kedua sumber ini, yaitu Alquran dan Sunnah sebagai dasar ideal pendidikan Islam. Dasar ideal ini kemudian yang menjadi akar pendidikan sebagai sumber nilai kebenaran dan



kekuatan. Nilai-nilai yang dipahami dari Alquran dan Sunnah ini adalah cermin nilai yang universal yang dapat dioprasionalkan ke berbagai sisi kehidupan umat sekaligus sebagai standar nilai dalam mengevaluasi jalannya kegiatan pendidikan Islam. (Azra, 1999 : 7).

Juga dengan jelas dipahami bahwa ilmu sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Untuk mamahami ilmu, manusia dituntut menggunakan pikirannya, belajar dan memahaminya. Dalam pendidikan, ilmu adalah hal yang paling esensial. Pada intinya, pendidikan dalam Islam sangat utama dan penting bagi kehidupan manusia.

Dari kedua ajaran islam, Alquran dan Sunnah, banyak dikemukakan fenomena alam dan sosial yang masih belum terungkap dan menantang umat Islam untuk terus belajar agar mereka giat melakukan pengkajian dan dapat melahirkan ilmu-ilmu baru sebagai hasil dari penafsiran Alquran dan sunnah.

Islam mengajarkan alam dan relita. Umat Islam selalu mengamati realita tersebut, baik dengan menggunakan akal, kontemplasi maupun intuisi. Dengan adanya usaha ini dalam perkembangan intelektual Islam, lahirlah berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, kedokteran, kimia, astronomi dan fisika. (Muhaimin dan Mijib, 1993 :834).

Tepat kiranya bila Alquran dan Sunnah secara doktrinal mengangkat pentingnya pendidikan. Melalui pendidikan, manusia bisa belajar melihat relaitas alam semesta demi mempertahankan kehidupannya. Karena pentingnya pendidikan, Islam menempatkan pendidikan



pada kedudukannya yang penting dan tinggi dalam doktrin Islam, seperti dapat dilihat dalam Alquran dan Sunnah yang banyak kaitannya dengan arti pendidikan bagi kehidupan umat Islam sebagai hamba Allah.

Selain ayat-ayat dan Sunnah yang telah dijelaskan di atas, masih banyak bukti lain yang berasal dari sumber yang sama tentang arti pentingnya pendidikan bagi manusia. Seperti ayat-ayat Alquran yang memerintahkan manusia untuk mempergunakan akalnyanya. Dengan akal ini, manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya ataupun benda-benda yang ada di alam sekitar kita. Pada saat yang sama juga, Alquran ataupun Sunnah banyak menganjurkan umat Islam untuk senantiasa bergiat diri dalam mencari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ilmu juga menempati posisi penting dalam Islam. Untuk meraih ilmu ajakan untuk mempergunakan akal harus diraih. Ajakan untuk mempergunakan harus direalisasikan. Ilmu dan pendidikan dalam Islam sangat utama dan esensial dalam kehidupan manusia.

Seperti ditulis Hanun Asrohah, selain Alquran dan Sunnah yang secara jelas menyerukan umat Islam untuk belajar, ada empat aspek lain yang mendorong umat Islam untuk senantiasa belajar, sehingga pendidikan selalu menjadi perhatian umat Islam. "Aspek itu adalah bahwa Islam memiliki Alquran sebagai sumber kehendak Tuhan." (Asrohah, 1999 : 7). Artinya, motivasi pendidikan secara doktrinal memang sudah menjadi bagian dari ajaran Islam, sehingga perjalanan umat Islam selalu



berpedoman pada kedua sumber ini sebagai ajaran dan sebagai spirit kependidikan sekaligus.

Penting untuk dicatat, bahwa ajaran untuk mencari ilmu pengetahuan dalam semangat doktrin Islam tidak hanya dikhususkan pada ilmu agama saja dalam pengertian yang sempit. Lebih dari itu, Islam menganjurkan umatnya menuntut ilmu dalam pengertian yang seluas-luasnya yang mencakup, meminjam istilah al-Ghazali, ilmu syar 'iyyah dan ilmu ghairu syar 'iyyah. (Abidin, 1998 : 44-45). Ilmu syar 'iyyah adalah ilmu yang berasal dari para Nabi dan wajib dileluti oleh setiap muslim. Di luar ilmu-ilmu yang bersumber dari para nabi tersebut, al-Ghazali mengelompokkan ke dalam kategori ghairu syar 'iyyah. Lepas dari pengelompokan ilmu yang disebut al-Ghazali, ilmu apapun penting untuk dicapai selama tidak membawa kemadaratan bagi kehidupan manusia dan destruktif.

Karenanya, dalam Islam terdapat hubungan erat antara ilmu-ilmu syar 'iyyah dengan ilmu-ilmu ghairu syar 'iyyah. Dan sebaliknya, Islam tidak mengenal adanya keterpisahan di antara ilmu-ilmu. Dengan kata lain, Islam menganjurkan agar umatnya mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, baik yang bersumber dari Alquran dan Sunnah maupun pada akal asalkan membawa manfaat bagi kehidupan manusia di dunia ini. adanya kategori syar 'iyyah dan ghairu syar 'iyyah, seperti yang disebut al-Ghazali, tidak dimaksudkan sebagai keterpisahan, sebab bila dipahami secara dikotomi, maka



dengan sendirinya akan mendistorsi makna Islam yang universal, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

B. Kontribusi Pemikiran tokoh Muslim dalam Pendidikan

Mengkaji pemikiran cendekiawan muslim dapat dilakukan melalui pendekatan sejarah. Ini dimaksudkan agar dapat diketahui bagaimana konsep-konsep pendidikan Islam di zaman silam, perkembangan, pemikiran, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, serta latar belakang yang mendorong lahirnya konsep-konsep tentang rancangan pendidikan Islam.

Selain itu, mengadakan kajian-kajian terhadap pemikiran-pemikiran dimaksud akan diperoleh manfaat yang di antaranya. Pertama, bagaimana perkembangan pemikiran (filsafat) pendidikan Islam dari zaman ke zaman. Kedua, memahami konsep dan hasil kerja para pemikir pendidikan Islam. Dan ketiga, dapat melanjutkan rangkaian pemikiran untuk kemudian melakukan telaah atas pemikiran mana yang masih relevan dan mana pula yang perlu pada penyesuaian oleh karena adanya tuntutan zaman. (Jalaluddin dan Sain, 1998 : 32).

Pola-pola pendekatan sejarah serupa ini kerap ditemukan dalam menelusuri literatur baik mengenai filsafat pendidikan Islam maupun sejarah pendidikan Islam. Di sini ada satu kenyataan yang sulit untuk dibantah bahwa pemikir pendidikan Islam dipengaruhi oleh tradisi Hellenisme. Pengaruh Hellenisme ini tidak hanya sebatas pada perkenalan umat Islam dengan



pemikir Yunani dan mempelajarinya, tetapi juga mendorong semangat kehidupan intelektual Islam. (Asrohah, 1999 : 43). Setelah menguasai karya-karya Hellenisme, para ilmuan muslim mulai melakukan pengamatan, penelitian dan pengkajian lebih jauh hingga mereka berhasil menemukan teori-teori baru di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat yang belum ada pada masa sebelumnya.

Pemikiran Hellenisme yang mereka transmisikan dalam karya-karya pemikir Islam tidak hanya dalam bentuk terjemahan-terjemahan saja, tetapi juga tidak sedikit yang berasal dari pemikir umat Islam sendiri yang orisinal. Wacana intelektual yang berasal dari kontak dengan Hellenisme tidak terbatas hanya pada kemunculan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam, tetapi juga pemikiran-pemikiran keagamaan, seperti teologi, tafsir, bahasa, hukum Islam dan juga kependidikan tentunya. Pada masa ini juga sejarah mencatatnya sebagai zaman kemajuan peradaban Islam. Masa ini, menurut Harun Nasution mempunyai kontribusi peradaban modern di Barat. (Asrohah, 1999 : 45).

Pada intinya, pendekatan sejarah serupa ini adalah salah satu upaya melanjutkan penggalian secara intensif terhadap apa yang telah dilakukan para ahli. Mereka telah menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan sesuai dengan zaman dan tantangan yang dihadapi. Zaman dan tantangan yang dihadapi masa sekarang berbeda dengan yang dihadapi mereka. Karenanya, pembicaraan masalah kependidikan ini



mempunyai peran strategis bila memang pendidikan Islam ingin turut bersaing dengan percaturan global.

Para pemikir muslim, baik pada periode klasik, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Ghazali, al-Farabi dan Ibnu Khaldun, pada zaman modern semisal al-Tahtawi, Muhammad Abduh, Islamil Raji al-Faruqi, banyak menulis pemikir-pemikiran yang ada kaitannya dengan pendidikan Islam. Namun demikian, oleh karena keterbatasan kemampuan dan literatur, penulis tidak bermaksud untuk membahas keseluruhan pemikiran bersama dengan nama-nama para tokoh di atas. Dengan tanpa mengurangi nilai kontribusi mereka di bidang pendidikan, penulis hanya menuliskan beberapa nama tokoh dengan pemikirannya baik yang termasuk pada zaman klasik maupun yang modern. Dari dua era yang berbeda ini penulis kira dapat melihat *trend* pemikiran pendidikan yang pernah dituangkan oleh para pemikir muslim dari zaman ke zaman.

Mewakili zaman klasik, al-Ghazali cukup representatif, sebab bila kita menyempatkan diri untuk menelaah karya-karyannya, terutama karya terbesarnya *Ihya Ulumiddin*, tampak bahwa al-Ghazali di samping ahli teologi, filsafat, tasawuf, beliaulah juga ahli dalam bidang pendidikan. Sementara itu, nama al-Ghazali cenderung lekat dengan pandangan sebagai seorang sufi ketimbang pendidik, terutama pengaruh dari meluasnya tulisan-tulisan yang mendiskusikan perbedaannya di seputar Filsafat Islam dengan Ibn Rusyd. (Leamen, 1989 : 33).



Sementara di bidang pendidikan dalam pandangan al-Ghazali masih jarang sekali dibahas orang.

Dalam pandangan al-Ghazali ilmu adalah rengking pertama dalam ibadah. Di samping itu, terkesan kuat bahwa manusia, menurut al-Ghazali dapat memperoleh derajat atau kedudukan yang paling terhormat di antara sekian banyak makhluk di permukaan bumi dan langit karena pengajaran dan pendidikan, karena ilmu dan amalnya. Kesan itu lebih diperkuat lagi dengan menjadikan tema ilmu dan pendidikan sebagai bahasan pertama dalam karya monumentalnya, *Ilyā Ulumiddin*.

Tujuan dari mencari ilmu menurut al-Ghazali tidak lain adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu dari metode penyampaian ilmu adalah pengajaran. Pendidikan merupakan satu-satunya keutamaan, menyangkut harkat dan martabat manusia dan menanamkan nilai kemanusiaan. Di sini seakan al-Ghazali menyatakan bahwa kemajuan suatu masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada sejauh mana keberhasilan dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Dari sisi yang berbeda, nampaknya al-Ghazali sudah membuat pilihan bahwa konsep ilmu dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai yang sudah berakar dalam Alquran dan Sunnah. Sistem nilai yang dimaksud tidak lain adalah tauhid, ibadah, *syari'ah* dan khalifah. Nilai tauhid berarti ilmu harus mencerminkan tauhid yang esensinya adalah mengesakan Allah, berpihak kepada kebenaran, setia pada sumber-sumber pengetahuan dan benenaran serta menegaskan tujuan akhir dari



keseluruhan aktivitas manusia. Nilai ibadah berarti ilmu harus mendukung umat manusia dalam menempatkan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Artinya, ilmu harus memberikan motivasi agar manusia semakin mendekatkan (*taqarruh*) kepada Allah dan bukan sebaliknya, menjauhkan manusia dari Allah.

Dalam Islam berlaku rumusan, semakin seseorang berilmu, semakin bertakwa kepada Allah. Nilai *syari'ah* memotivasi bahwa ilmu harus melahirkan perilaku yang dihalalkan dan bukan perilaku yang diharamkan Allah. Dan terakhir, nilai khalifah yang menjadikan ilmu harus mencerminkan sistem dan metode mewujudkan tugas khalifah umat manusia sebagai amanah Allah yang wajib ditunaikan guna mewujudkan Islam sebagai *rahmata li al'alam*.

Dengan demikian, hakikat ilmu dalam Islam adalah pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifahNya dalam bentuk ayat-ayat *qur'aniyah* dan ayat-ayat *kauniyah* untuk dikembangkan secara rinci demi kepentingan menunaikan tugas khalifah. Karenanya, semua disiplin ilmu yang dikembangkan dalam Islam mesti sehaluan dengan parameter tauhid, yaitu menuju kesatuan pengetahuan, kebenaran, dan kemanfaatan. Dan pada akhirnya ilmu harus membimbing manusia akan kesadaran, bahwa pemilik ilmu adalah Allah, dan manusia menjalankan tugas untuk mengembangkan kepentingan tugas hakikinya.

Mengenai tujuan pendidikan dalam pandangan al-Ghazali, menurut Abidin Ibnu Rusn ada dua tujuan, yaitu



tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan pendidikan jangka panjang adalah pendekatan diri kepada Allah. Pendidikan dalam prosesnya harus mengerahkan manusia menuju pengenalan dan kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Tujuan jangka pendek adalah diraihinya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. (Abidin, 1998 : 56-58).

Lebih jauh lagi, menarik kiranya bila kita kutip rumusan dari tujuan pendidikan menurut al-Ghazali seperti yang ditulis Abidin: ... tujuan pendidikan menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut:

1. *Dekatkan diri kepada Allah, yang wujudnya adalah kemampuan dan dengan kesadaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah.*
2. *Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia.*
3. *Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengemban tugas keduniaan dengan sebaik-baiknya.*
4. *Membentuk manusia yang berakhlak mulia, suci jiwanya dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela.*
5. *Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama, sehingga menjadi manusia yang manusiawi.* (Abidin, 1998 : 60-61).

Hampir senada dengan itu, Ibnu Khaldun, seperti yang ditulis Abidin Nata, melihat bahwa dalam proses pendidikan (belajar) atau menuntut ilmu pengetahuan, manusia di samping harus sungguh-sungguh juga harus memiliki bakat. Dan berhasilnya suatu keahlian dalam satu bidang ilmu atau disiplin memerlukan pengajaran. (Nata, 2001 : 175).

Secara konsepsional sepertinya ada pandangan yang seragam antara al-Ghazali dengan Ibnu Khaldun. Keragaman ini pada kata pendidikan yang menjadi alat bagi tercapainya suatu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah sebagai tujuan jangka panjang dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia sebagai tujuan jangka pendeknya. Sedangkan pendidikan itu sendiri pada prosesnya juga memerlukan alat, yaitu pengajaran atau *ta'lim*. Ini juga tampaknya yang menjadi pandangan konsepsional dari para pemikir muslim terutama tentang tujuan dari ilmu yang tidak lain adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini bukan suatu kebetulan, sebab siapa pun pemikirnya, bila ia seorang muslim, ia dapat dipastikan akan merujuk pada sumber-sumber pendidikan yang sama.

Dalam bahasa lain, keseragaman di antara para pemikir muslim terletak pada landasan epistemologis yang memberikan konsepsi bahwa pencapaian dan pengembangan ilmu dilakukan dengan menggunakan alat pemberian Tuhan berupa panca indra, akal, dan hati. Hasil penggunaan alat itu dalam bentuk rincian ilmu dimaksudkan supaya manusia bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya.

Kesamaan lainnya mungkin terlatak pada prinsip belajar seumur hidup dan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah. Dari pola ini, seperti yang ditulis Abidin Nata, Islam telah menancapkan revolusi di bidang pendidikan dan pengajaran. Langkah ini sangat



strategis dalam upaya menyangkut martabat kehidupan manusia. "Kini diakui dengan jelas bahwa pendidikan merupakan jembatan yang mengembangkan orang dari keterbelakangan menuju kemajuan, dan dari kehinaan menuju kemuliaan, serta dari ketertindasan menjadi merdeka, dan sterusnya." (Nata, 1998 : 12).

Mewakili zaman modern, Isma'il Raji al-Faruqi, mengatakan bahwa seluruh pengetahuan mengenai individu, kelompok manusia, alam, agama atautkah sains, harus kita susun kembali berdasar prinsip tauhid, yaitu Allah Swt ada dan Esa, dan bahwa Dia adalah Pencipta, Penguasa, Pelindung, Pemberi rizki, akhir, tujuan dan sebab metafisis segala sesuatunya. Seluruh pengetahuan objektif mengenai dunia berarti pengetahuan tentang kehendak, pengaturan dan kebijakan-Nya. Semua keinginan dan ikhtiar manusia adalah karena restu dan perkenan-Nya. Manusia, demikian al-Faruqi, harus mematuhi perintah, memenuhi tujuan agama-Nya, jika manusia ingin mengenyam kenikmatan dan kebahagiaan. (al-Faruqi, 2000 : 115-116).

Kerangka dasar dari pemikiran al-Faruqi di atas tidak lain dari usaha mendefinisikan kembali prinsip ilmu dalam Islam. Kerangka ini pula yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa tauhid merupakan bagian utama yang harus ditanam dan ditumbuhkan secara utuh dalam diri manusia, sebab dalam konsep ketahuidan inilah kita memulai perumusan hakikat dan tujuan umat Islam.

Kondisi kontekstual yang dihadapi al-Faruqi, sekilas terlihat bahwa ada segolongan dari umat Islam yang berpandangan dikotomis dalam bentuk membedakan dan memisahkan ilmu agama dan ilmu umum juga antara agama dengan kehidupan sosial dan budaya. Kondisi kontekstual ini dapat juga dilihat dari catatan al-Faruqi berikut: *Secara sangat ulung, sains yang mempelajari manusia beserta relasinya dengan sesama harus mengetahui bahwa manusia berada dalam penguasaan Allah Swt. Secara metafisis dan aksiologis. Sains ini mencakup sejarah manusia-bidang yang membeberkan tingkat-tingkat tertinggi tujuan agama. Sebenarnya, sains ini harus berkenan dengan Khalifatullah di muka bumi, dengan kekhalfahan manusia. Dan karena kekhalfahan berdimensi sosial, maka sains yang mempelajari manusia kehendaknya selayaknya disebut sains, maka sains yang mempelajari manusia hendaknya selayaknya disebut sains semantik, pengetahuan Islam menolak pencabangan dua (the bifurcation), sains sosial/kemanusiaan... Jika, dalam Asosiasi Ilmuan Sosial Muslim Amerika dan Canada, kita terus-menerus menganggapnya bersifat sosial, yang berarti menentang pendirian Barat yang berisi keras memisahkannya dari kemanusiaan... (al-Faruqi, 2000 : 116).*

Dalam bahasa lain, seakan al-Faruqi mengatakan bahwa masalah dikotomi pendidikan Islam berangkat dari kegagalan dalam merumuskan tauhid dan bertauhid. Kegagalan ini tentunya melahirkan syirik yang berakibat adanya dikotomi pemikiran Islam, dikotomi pemikiran Islam melahirkan adanya dikotomi keilmuan dan kurikulum. Dikotomi keilmuan dan kurikulum mengakibatkan terjalannya dikotomi proses pencapaian



tujuan pendidikan. Dikotomi keilmuan dan kurikulum mengakibatkan terjadinya dikotomi proses pencapaian tujuan pendidikan. Dikotomi proses tujuan pendidikan pada akhirnya menyebabkan dikotomi alumni pendidikan yang berkepribadian ganda yang justru melahirkan dan kemudian memperkokoh sistem kehidupan umat yang rasionalistis, sekularistis, dan meteatlistis. Kerangka seperti ini pada intinya muncul oleh karena gagalnya mendefinisikan tauhid dalam dunia pendidikan.

Al-Faruqi juga sampai pada hakikat ilmu yang sebenarnya tidak netral. Justru di Baratlah yang berkembang keyakinan bahwa ilmu itu netral seperti dikritiknya dalam tulisan berikut: *Barat mengkalim kalau sains-sains sosialnya ilmiah karena bersifat netral; bahwa mereka menolak pertimbangan dan preferensi; memperlakukan tokoh fakta sebagai fakta dan membiarkannya untuk berbicara sendiri. Klaim ini kita anggap omong kosong. Karena tidak ada persepsi teoritis terhadap suatu fakta tanpa persepsi mengenai realisasi dan sifat aksiologisnya...* (al-Faruqi, 2000 : 117).

Penolakan al-Faruqi terhadap netralitas ilmu memang berdasar. Sebab, kenyataan yang sulit dibantah adalah bahwa ilmu pengetahuan itu lahir dan dikembangkan dalam konteks nilai, paradigma dan peradaban tertentu. Kenyataan historis membuktikan, ilmu pengetahuan Barat yang ada sekarang secara historis memperoleh tangga dari para ilmuan muslim, meskipun dewasa ini menyatanya seolah memiliki karekteristik peradaban Barat. Karekteristik ini nampaknya turut mewarnai dinamika keilmuan umat islam di zaman

kontemporer yang terlihat dari sebagai publikasi yang pernah ada pada tiga dekade terakhir.

Bagi al-Faruqi islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebagai jalan keluar, yang berupaya menunjukkan relasi antara realitas yang dipelajari dengan segi atau bagian pola ketuhanan pada relitas ini. "Karena pola Ketuhanan merupakan norma realitras yang harus mewujud, maka kita tak pernah bisa melupakan analisa mengenai pola ini," (al-Faruqi, 2000 : 118). Singkatnya, ia mencoba membuka mata dan hati kita untuk mendefinisikan epistemologi Islam di tengah-tengah maraknya epistemologi Barat yang satu sama lain berbeda dalam cara memandang ilmu pengetahuan.

PENUTUP

Semenjak al-Ghazali yang mewakili pimikir di zaman klasik hingga al-Faruqi yang mewakili zaman modern, konsep dasar di seputar pendidikan Islam masih tetap konsisten pada tema kesadaran ketuhanan. Mendekatkan diri (*taqarruh*) kepada Allah adalah tema sentral dari al-Ghazali dan paradigma tauhid redefinisinya al-Faruqi yang keduanya bertitik tolak dari rumusan yang sama sekaligus sebagai sumber dalam pendidikan Islam.

Bedanya, besar kemungkinan hanya terletak pada sosial budaya yang mereka hadapi. Apa yang dihadapi al-Ghazali ini adalah kenyetaan-kenyataan internal yang dihadapi umat Islam pada zamanya yang memerlukan



rumusan bagaimana sebenarnya rumusan ilmu pendidikan. Berbeda dengan al-Faruqi yang tidak hanya *concern* pada kendala internal umat Islam semata, tetapi juga berhadapan dengan tradisi keilmuan barat yang menganggap ilmu sebagai netral dan dalam beberapa hal justru bertolak belakang dengan prinsip tauhid yang menjadi paradigma ilmu dan pendidikan dalam Islam.



Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium baru*, Jakarta : Logos, 1999. cet. Ke-1.
- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999. cet. Ke-1
- Arifin, M. 1993. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Daradjat, Zakiah, Dr, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004. cet. Ke-5
- DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Gazalba, Sidi, *Sistematika Buku Pertama Pengantar Kepada Dunia Filsafat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990. cet. Ke-5
- Hasibuan, JJ Mujiono, *Proses Belajar Mengajar*, Bandung : Rosda Karya, 1995.
- Imron, Ali, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1996.
- Ibnu Rusn, Abidin, *Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pajar, 1998. cet. Ke-1
- Jalaluddin, et.al, *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 1996. cet. Ke-2.
- Jalaluddin dan Said, Usman, *Filsafat Pendidikan Islam dan Perkembangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998. cet. Ke-2.

- Langgulong, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta : Al-Husna, 2000. cet. Ke-1
- Leamen, Oliver, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta : Rajawali, 1989. cet. Ke-1
- Muthahhari, Murtasha, *Konsep Pendidikan Islam*, Jakarta : Iqra Kurnia Gemilang, 2005. cet. Ke-1
- Muhaikin dan Mujib, Abd, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Oprasionalnya*, Bandung : Trigenda Karya, 1993. cet. Ke-1
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos, 1999. cet. Ke-2.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos, 2001. cet. Ke-4.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Poedjawijatna, I.R, *Pembimbing Kearah Alam Filsafat*, Jakarta : Bina Aksara, 1986. cet. Ke-7.
- Ramayulis, Prof. DR. H, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulian, 2004. cet. Ke-4
- Saifuddin Anshari, Endang, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1991. cet. Ke-9
- Wafi, Ali Abdulwahid, *Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya*, Jakarta: Grafiti Pres, 1985. cet. Ke-1.
- Zuharini, et.al, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakata : Bumi Aksara, 2000. ket. Ke-6



Pesantren Dan Kurikulum Pembelajaran Dalam Dinamika Politik Pendidikan Di Indonesia

Talking about pesantren in the growth, pesantren is divided by two criterias such as salafi (tradisional) and kholafi (modern) pesantren. Those condition is also influential for curriculum of each pesantren , manufacture system of pesantren, educational system and type of the leadership. It is becoming the treasury of all pesantren in Indonesia to maintain pesantren existence in educational world and social religion.

I. PENDAHULUAN

Pesantren dalam menghadapi perubahan dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya selaku institusi pendidikan keagamaan dan sosial. Pesantren harus membenahi kelemahannya diantaranya dengan peningkatan jiwa entrepreneurship santri melalui pengembangan lembaga riset and development keilmuan dan ekonomi

Selama ini pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan tradisional³² yang lambat beradaptasi dengan perkembangan dan ditengarai sebagai lembaga pendidikan “kolot” yang hanya mengajarkan keilmuan “langit” dengan melupakan pijakannya di bumi.³³ Hal ini sejalan dengan sejarah pesantren sebagai lembaga pendidikan yang hanya menghususkan diri dengan pengkajian nilai-nilai agama serta dakwah Islam. Selain

³² Secara etimologi, kata “tradisional” berasal dari kata dasar tradisi yang berarti tatanan, budaya, atau adat yang hidup dalam sebuah komunitas masyarakat. Karenanya, pendidikan keagamaan tradisional diartikan pendidikan yang menjunjung tinggi tatanan, budaya, atau adat yang hidup di masyarakat. Lihat: Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), hlm. 3608. Menurut PP No. 55/2007 Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Lihat Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976), hlm.233

³³ Maksudnya hanya mengajarkan ilmu agama Islam dan sikap beragama. Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.22

itu, kurikulumnya diorientasikan khusus untuk mempelajari dan memahami ajaran-ajaran agama Islam dan tidak didasarkan pada orientasi yang bersifat duniawi sebagai watak mandiri.³⁴ Oleh karena itu, pesantren menuntut alumninya untuk menjadi tokoh agama, kyai, ustadz, serta mampu berperan dalam masyarakat dengan kemampuan agama yang mumpuni.

Watak mandiri yang menjadi ciri pembeda pesantren dengan pendidikan lain dalam perjalanan waktu, lambat laun tergerus oleh tuntutan kontekstual yang menghadang para alumni serta pesantren itu sendiri. Terutama munculnya orientasi mencari kerja dikalangan alumni.³⁵ Dari sini pergeseran bermula, dimana pesantren

³⁴ Dalam belajar dengan niat semata-mata pengembangan agama yang bernilai ibadah, kondisi ini terlihat dalam bacaan doanya yang populer di kalangan pesantren yang berbunyi, “*Allāhumma lā taj’ali al-dunyā akbara hamminā, wa lā mablaghā ‘lminā...*”(Ya Allah, jangan jadikan orientasi duniawi sebagai impian utama kami, dan jangan jadikan orientasi duniawi sebagai target keilmuan kami... Lihat Mashudi Abdurrahman, Memelihara Tradisi, Memperbaharui Pendidikan Pesantren, dalam *Bina Pesantren*, Edisi 01/Tahun 1/Oktober 2006, hlm. 21

³⁵ Pergumulan pemikiran para pengelola pesantren tidak terlepas dari perkembangan Iptek dan globalisasi dalam memaknai *muhāfaḍat ‘ala al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhzu bi al-jadid al-aṣlah* sebagai ruang dinamis bagi pengelola pesantren. Adagium ini memposisikan pesantren pada dua kutub yang saling tarik menarik. Satu sisi sebagai lembaga dakwah Islam dengan mempersiapkan alumninya sebagai ulama (Kyai) yang meneguhkan pola bermadzhab dengan memegang warisan klasik (*al-turās al-qadīm*), yakni kitab-kitab mu’tabarah pesantren, namun di sisi lain tidak dapat menghindar dari perubahan dan kemajuan hasil modernisasi, yakni karya-karya intelektual modern (Barat) sebagai *al-turās garbi*. Kedua pemikiran ini mempengaruhi pemikiran umat Islam. Lihat Hasan

dipaksa merespon dunia yang sedang berubah. Dalam perkembangannya pesantren berkembang dari yang tradisional ke modern, hingga saat ini pesantren terbagi menjadi dua kelompok secara garis besar, yaitu *salafi* (tradisional) dan *kholafi* (modern).³⁶ Pesantren *salafi* adalah pesantren yang masih terikat sistem dan pola lama, sedangkan pesantren *kholafi* adalah pesantren yang telah menerima unsur-unsur pembaruan dengan berdiri pendidikan formal³⁷ seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau PT, tanpa meninggalkan sistem *salafi*-nya. Namun permasalahan yang muncul adalah mengendornya tradisi pesantren dengan kurikulum *salafi*-nya. Akibatnya kurikulum pesantren menjadi sedikit dan terpinggirkan, atau pelajaran keagamaan menjadi pelajaran nomor dua dan cenderung hanya sebagai pelengkap yang tidak diberdayakan secara maksimal. Dengan kata lain, meminjam istilah al-Jabiri, pergulatan pemikiran pesantren berada pada sikap tarik menarik antara warisan lama/klasik (*al-turās*) dan modern (*al-hadāsah*).³⁸

Hanafi, *al-Turās wa al-Tajdid Muqifunā Min- al-Turās al-garbi al-Qadīm*; dan *al-Turās wa al-Tajdid Mauqifunā Min al-Turās al Garbi Muqadimah fi ‘ilmi al-Istigrab*, (t.tp: Dar al-Faniyyah, tt), hlm. 9-11

³⁶ Lihat Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan*., hlm. 22

³⁷ Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. UU No 20 Tahun 2003 Tentang *Sisdiknas*, Pasal 1 ayat 11

³⁸ Lihat Muhammada ‘Abid al-Jabiri, *al-Turās wa al-Hadāsah Dirāsāt wa Munāqasat*, (t.tp: al-Markaz al-Šaqafi al-‘Arabi), Menurut Jawwad Ridla, kekayaan *khazanah* pendidikan Islam dengan segala kelebihan dan kekurangannya harus disikapi secara

Dalam menapaki dinamika perubahan politik pendidikan yang terjadi, pengembangan kurikulum pembelajaran pesantren yang efektif dan efisien mutlak dibutuhkan, sebagaimana pendapat Abdurrahman Wahid bahwa kurikulum pesantren harus dikemas secara mandiri, karena perbedaannya dengan lembaga pendidikan konvensional pada umumnya.³⁹ Untuk kepentingan tersebut, tulisan ini akan mengurai bagaimana mengembangkan kurikulum pesantren dalam rangka mengapresiasi, mensiasati perkembangan dan perubahan zaman yang mampu menjaga karakter dan keunikan pesantren *salafi* sebagai ciri khas sistem pendidikan pribumi⁴⁰. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan (*contribution of knowledge*) dalam mengembangkan kurikulum pesantren yang *contextual*, sehingga pesantren

proporsional. Muhammad Jawwad Ridla, *al-Fikr al-Tarbawi al-Islamiy: Muqadimatun fi Ushulih al-Ijtima'iyyati wa al-Aqlaniyyati* (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), hlm.3. yang berarti dalam memwarisinya dituntut bersikap apresiatif-kritis, yaitu sikap mau menerima, memilah-milah, dan mengembangkan secara positif-konstruktif. Mahmud Arif (penterjemah) Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. x

³⁹ Lihat: Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Ed. Sayed Mahdi (Jakarta: Erlangga), hlm. 110

⁴⁰ Lihat sejarah lahirnya pondok pesantren dalam Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan...*, hlm.1

mampu menancapkan pengaruhnya di tengah masyarakat yang belakangan mulai apatis.⁴¹

II. PEMBAHASAN

A. Pondok Pesantren dan Kurikulum Pembelajaran

1. Pengertian Pondok Pesantren

Istilah pondok pesantren terbentuk atas dua kata yang menunjukkan satu pengertian, yaitu kata “pondok” dan “pesantren”. Di Minangkabau dinamakan *surau*, di Aceh *rangkah meunasah* dan *pondok* di Pasundan. Maka pondok pesantren adalah tempat di mana anak-anak muda dan dewasa belajar secara lebih mendalam dan lebih lanjut Ilmu agama Islam yang diajarkan secara sistimatis, langsung dari bahasa Arab serta berdasarkan pembacaan kitab-kitab klasik karangan ulama besar.⁴² Dalam Kamus Bahasa Indonesia “pondok” artinya wadah atau asrama tempat mengaji, belajar agama Islam dan lain sebagainya. Namun secara umum pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang melembaga di Indonesia.⁴³

⁴¹ Arah pendidikan di samping sebagai media peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, juga merupakan sarana pengembangan nilai-nilai normatif dalam rangka membentuk jati diri santri. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4

⁴² Dawan Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta.LP3S, 1985), cet. Ke-III, h.2

⁴³ W.J.S Poerwadarminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta:1987), h. 653

Menurut Karel A. Steenbrink Pondok pesantren dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum Islam masuk ke Indonesia sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Kawa. Kemudian diambil oleh Islam. Dengan kata lain istilah pesantren bukan berasal dari Bahasa Arab melainkan dari India.⁴⁴

Pondok pesantren tradisional adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang masih memakai sistem lama yaitu yang pelaksanaan pendidikannya belum menggunakan sistem modern, masih menggunakan sistem sorogan dan bandongan. Sorogan adalah belajar secara individu dimana seorang santri berhadapan dengan seorang guru/kyai, terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya. Bandongan adalah belajar secara kelompok yang diikuti oleh seluruh santri.

Sedangkan pondok pesantren modern (khalaf) adalah lembaga pesantren yang memasukan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum dan bahkan perguruan tinggi dalam lingkungannya. Selain itu juga ciri dari pesantren modern adalah dimana figur kyai tidak lagi menjadi sentral setiap keputusan, setiap perkara yang menyangkut dengan pesantren harus di putuskan berdasarkan rapat antara

⁴⁴ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren. Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. (Jakarta: Ciputat Press, 2002) h. 62

para asatidz (staff pengajar) dengan yayasan. Peserta didik atau santri juga harus membayar uang pendidikan, sistem belajar yang demokratis dan setiap santri yang sudah menyelesaikan studinya akan mendapatkan ijazah sebagai tanda kelulusan, ijazah ini bisa di gunakan sebagai salah satu syarat seandainya santri berniat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Kyai adalah pemilik dan penguasa tunggal. Beliaulah yang menentukan segala kebijakan yang berlaku di dalamnya (pesantren salaf). Adapun mengenai hubungan kyai dengan kelembagaan pada pesantren modern berbeda dengan pesantren tradisional, yakni segala kekayaan dan bangunan pesantren umumnya tidak dianggap sebagai milik kyai, melainkan milik ummat. Sebab pada pesantren modern, pembiayaan pembangunan pada pesantren tidak hanya dari sang kyai, tetapi juga dari masyarakat. Banyak kompleks pesantren yang berstatus wakaf baik dari kyai terdahulu maupun orang-orang kaya disekitar.

2. Sistem Pendidikan Pesantren

Paling tidak terdapat delapan poin yang menunjukkan karakteristik sistem pendidikan model pesantren.

1. Sistem pendidikan berasrama, di mana tri pusat pendidikan menjadi satu kesatuan yang terpadu. Yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat berada dalam satu lingkungan, sehingga lebih memungkinkan penciptaan suasana yang kondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan.



2. Dalam tradisi pesantren, para santri merupakan subjek dari proses pendidikan, mereka mengatur kehidupan mereka sendiri (*self governance*) melalui berbagai aktifitas, dan interaksi sosial yang sangat penting artinya bagi pendidikan mereka.
3. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang berasal dari, dikelola oleh, dan berkiprah untuk masyarakat.
4. Terkait dengan orientasi kemasyarakatan pesantren, lingkungan pesantren diciptakan untuk mendidik santri agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bermanfaat, tidak canggung untuk terjun dan berjuang ke masyarakat. Dalam bidang pekerjaan misalnya, boleh dibilang tidak ada istilah *nganggur* (menunggu pekerjaan) bagi para alumni pesantren.
5. Antara pengajaran (formal) dan pendidikan (informal) lebih terintegrasi, sehingga proses pembentukan mental karakter yang didasarkan pada jiwa, falsafah hidup, dan nilai-nilai pesantren serta transfer *knowledge* lebih membumi.
6. Hubungan antara anggota masyarakat pesantren berlangsung dalam suasana ukhuwwah Islamiyya yang bersumber dari tauhid yang lurus dan prinsip-prinsip akhlak mulia. Suasana ini tertanam dalam jiwa santri dan menjadi bekal berharga untuk kehidupan di luar masyarakat pesantren.
7. Pendidikan pesantren didasarkan pada prinsip-prinsip keikhlasan, kejuangan, pengorbanan, kesederhanaan, kemandirian, dan persaudaraan.

- Dengan menjiwai nilai-nilai ini, pesantren tidak memiliki masalah apapun dengan paradigma *School Based Management* (SBM) yang kini menjadi model pendidikan modern pasca reformasi di Indonesia.
8. Dalam masyarakat pesantren, Kyai atau pimpinan sekolah, selain berfungsi sebagai *central figure*, juga menjadi *moral force* bagi para santri dan seluruh penghuni pesantren. Hal ini adalah suatu kondisi yang mesti bagi dunia pendidikan, tetapi kenyataannya jarang didapati dalam sistem pendidikan selain pesantren.⁴⁵

B. Kurikulum Pesantren

Berbicara kurikulum⁴⁶ pesantren tidak akan pernah terlepas dari dinamika ilmu pengetahuan maupun sosial budaya masyarakat selama pesantren masih hidup dan berkembang. Kurikulum merupakan seperangkat rencana

⁴⁵ Abdullah Syukri Zarkasyi, MA., Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor (Ponorogo: Timurti Press, 2005). cet. II. h. 33

⁴⁶ Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Latin "*Curriculum*" yang berarti bahan pengajaran. Ada yang mengatakan bahwa kata kurikulum berasal dari bahasa Perancis "*Courier*" yang berarti berlari. Di samping itu dijelaskan juga sebagai rel pacuan kuda di tengah lapang yang harus dilewati, tidak boleh dilanggar. S. Nasution. *Azas-azas Kurikulum* (Bandung: Jemmars, 2001), hlm. 7-10. Lihat Idi Abdullah, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek* (Jakarta: Griya Media Pratama, 1999), hlm. 4-5. Sedang secara terminologi merupakan *a plan for learning* yang disiapkan dan direncanakan oleh para ahli pendidikan untuk pelajaran anak baik berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Lihat Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan pengembanagn Kurikulum*, edisi IV (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), hlm. 13

dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan.⁴⁷ Oleh karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan membutuhkan kurikulum yang dinamis, demokratis, fleksibel, terbuka dan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Di bawah ini akan dibahas kedudukan kurikulum dalam pendidikan dan pengembangan kurikulum.

Keseluruhan kitab kuning yang diajarkan (kurikulum pesantren) di berbagai pesantren dapat dikelompokkan dalam delapan bidang kajian, yaitu *nahwu* dan *sharaf* (*gramatika* dan *morfologi*), *fiqh*, *usul fiqh*, *tasawuf* dan etika, tafsir, hadits, tauhid, dan cabang-cabang ilmu lainnya seperti *tarikh* (sejarah) dan *balagh* (sastra). Di samping itu, kitab-kitab kuning yang beredar di pesantren-pesantren dapat juga digolongkan ke dalam tiga tingkat, yaitu kitab dasar, kitab tingkat menengah, dan kitab besar, yang dalam pengajarannya pun disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan kelasnya.⁴⁸

⁴⁷ Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, pasal 1 ayat 13. Kurikulum dimaksud adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. pasal. 1:15. Lihat Khaerudin dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kosep dan Implementasinya di Madrasah* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), hlm. 79. Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan desain, *blue print*, atau *a plan for learning* dalam lingkup pendidikan yang bermuara pada komponen-komponen pembelajaran, *Azas-azas*, hlm. 2

⁴⁸ Di lingkungan pesantren juga ada usaha mengelompokkan kitab berdasarkan periode *mushanef* pengarang kitab dengan



1. Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan

Perkembangan IPTEK dan arus informasi dalam era globalisasi menuntut semua bidang kehidupan untuk

mengambil ancar-ancar sebelum atau sesudah abad ke 19 M. Kitab-kitab tersebut dikelompokkan menjadi dua. Pertama, *al-Kutub al-Qadimah* atau kitab klasik salaf. Kitab ini lazim desut dengan “ kitab kuning”, yaitu semua kitab produk ulama yang hidup sebelum abad ke 19. Ciri-ciri umumnya adalah sebagai berikut; (a) Bahasa pengantar seutuhnya bahasa klasik, terdiri atas sastra lirik (*nazhom*) atau prosa lirik (*natsar*). (b) tidak mencantumkan tanda baca semacam koma, titik, tanda seru, tanda tanya dan sebagainya. (c) tidak mengenal pembabakan alinia atau paragraf, dan sebagai gantinya adalah jenjang uraian sering disusun dengan kata *kitābun*, *bābun*, *fashlun*, *far’un*, *tanbih*, dan *tamimatutun*. (d) Isi kandungan kitab banyak berbentuk duplikasi dari ulama sebelumnya. Kitab sumber diperlukan sebagai mata, dikembangkan menjadi resume (*mukhtashor* atau *khulashoh*), *syarah*, *taqṛīrat*, *ta’liqāt* dan sebagainya. (e) khusus kitab salaf yang beredar di lingkungan pesantren si pengarang harus tegas berafiliasi dengan madzhab sunni, terutama madzhab arba’ah, sedang kitab salaf yang pengarangnya tidak berafiliasi dengan madzhab sunni hanya dimiliki terbatas oleh kyai sebagai studi banding. Kedua, *al-Kutub al-Ashriyah*. Kitab ini merupakan produk ilmiah yang terbit pasca abad ke 19 M. Ciri yang membedakan dengan kitab salaf adalah; (a) Bahasa yang diremajakan atau bahasa populer dan diperkaya dengan idiom-idiom keilmuan dari disiplin non syar’i, dan bentuk karangannya pada umumnya prosa bebas. (b) tehnik penulisan dilengkapi dengan tanda baca yang sangat membantu dalam pemahaman. (c) sistem dan pendekatan analisisnya terasa sekali dipengaruhi pengetahuan umum di jamannya. (d) isi karangan merupakan hasil studi literer yang merujuk pada banyak buku dan sering tidak ada keterikatan dengan madzhab tertentu. Lihat Adib Mustofa Hanafi, *Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren, Studi Kasus di Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang Jawa Timur (Skripsi)*, Malang: Fak. Pendidikan IPS IKIP, 1993), hlm. 164-166, dalam Ahmad Zain Sarnoto, *Pesantren Dalam Dinamika Politik Pendidikan*, Jurnal MADANI INSTITUTE, Vol.3 no. 1 tahun 2014

menyesuaikan agar tidak termakan oleh zaman. Penyesuaian tersebut secara langsung mengubah tatanan dalam sistem makro, meso, maupun mikro, tidak terkecuali sistem pendidikan. Untuk itu, sistem pendidikan harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum, karena merupakan komponen yang dijadikan acuan pada satuan pendidikan.⁴⁹

Kurikulum dalam pendidikan menempati posisi yang setrategis, dan merupakan landasan yang dijadikan pedoman bagi pengembangan kemampuan santri secara optimal sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁵⁰ Untuk kepentingan itu, kurikulum harus dirancang secara terpadu sesuai dengan aspek-aspek tersebut di atas guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.⁵¹ Di samping itu, disusun dan dikembangkan dengan melibatkan berbagai komponen yang tidak hanya

⁴⁹ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 4

⁵⁰ Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum untuk dapat mengoptimalkan hasil sesuai kondisi yang ada untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa, keluarga, maupun masyarakat. Lihat Nana Saodih Sukmodinoto, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 126

⁵¹ Lihat Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang *Sisdiknas* pada Bab I pasal 1 ayat 19, Bab IV pasal 14. Menurut Saodih, bahwa dalam pendidikan formal kurikulum dan guru merupakan prasyarat yang harus dimiliki. Nana Saodih Sukmodinoto, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 1-4

menuntut ketrampilan teknis, tetapi harus dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya⁵² untuk dijadikan pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas.⁵³

Terkait dengan pembelajaran di pesantren, tingkatan kelompok santri (kelas) merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum melalui pembelajaran, baik konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, dan alat. Melalui pembelajaran kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan mewujudkan bentuk kurikulum nyata dan hidup. Oleh karena itu, guru sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum yang sesungguhnya, sehingga peran guru dalam pendidikan sebagai pemegang kunci pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum yang sebenarnya. Dengan demikian, pengembangan kurikulum yang dilakukan di pesantren hendaknya dapat memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan santri secara optimal sesuai tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat dengan memfokuskan pada

⁵² E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 146

⁵³ Kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum, baik konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata dan hidup. Nana Saodih Sukmodinoto, *Pengembangan Kurikulum*, hlm. 150. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat, dan santri. Lihat Peraturan Pemerintah No, 19 Tahun 2005, tentang *Setandar Nasional Pendidikan*, pasal 17: 1

kompetensi tertentu, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang utuh dan terpadu, serta dapat didemonstrasikan santri sebagai hasil belajar.⁵⁴ Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, mengantisipasi perkembangan zaman, serta sebagai pedoman (*guideline*) dalam penyelenggaraan pembelajaran di pesantren.

Dilihat dari kedudukan dan fungsinya, kurikulum merupakan sebuah rancangan kegiatan belajar bagi santri yang terdiri dari tujuan, bahan ajar, metode, alat dan penilaian, yang saling terkait dan saling mempengaruhi.⁵⁵ Untuk itu, dalam implementasinya guru dituntut mampu merencanakan pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.⁵⁶ Perencanaan pengembangan kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena fungsi pendidikan adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kekurangpahaman guru terhadap kurikulum bisa berakibat fatal terhadap hasil pembelajaran.

⁵⁴ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat*, hlm. 146. Guru merupakan penerjemah kurikulum dalam pembelajaran. Peran guru bukan hanya menilai perilaku dan prestasi belajar murid dalam kelas, tetapi juga menilai implementasi kurikulum dalam lingkup yang lebih luas yang sangat membantu pengembangan kurikulum. Nana Saodih Sukmodinoto, *Pengembangan Kurikulum*, hlm. 156

⁵⁵ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 30

⁵⁶ Lihat Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, pasal 20 butir (a).



Pemahaman guru terhadap kurikulum, menjadikan pelaksanaan dalam pembelajaran akan lebih efektif dan akan lebih mudah untuk tercapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan. Ibarat tubuh, merupakan jantungnya, ⁵⁷ karena mengarahkan segala bentuk dan aktivitas proses pendidikan yang tidak terbatas sejumlah mata pelajaran tertulis, seperti kebiasaan, sikap, moral dan lain-lain. ⁵⁸

2. Pengembangan Kurikulum Pesantren

Sebagai bagian dari pendidikan, pesantren mempunyai watak utama yaitu sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kekhlasan tersendiri. Pesantren memiliki tradisi keilmuan yang berbeda dengan tradisi keilmuan yang ada pada lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti madrasah atau sekolah. ⁵⁹ Salah satu ciri utama pesantren yang membedakan dengan lembaga pendidikan Islam lainnya adalah adanya pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) sebagai kurikulumnya. Kitab

⁵⁷ John dan Joseph Bondi, *Curriculum Development, A Guide to Practice*, (Ohio: Merryl Publihing Company, 1989), hlm. 13

⁵⁸ Anik Ghuftron, "Motivasi Kerja Guru dalam Pelaksanaan Tugas Sebagai Pengembang Kurikulum", *Thesis* (Bandung PPS IKIP Bandung, 1993), hlm. 17. Lihat Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2005), hlm. 5

⁵⁹ Sembodo Ardi Wibowo, *Epistimologi Pendidikan Islam Pesantren (Studi Komparatif Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta)*, *Disertasi*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 2

kuning dapat dikatakan menempati posisi yang istimewa dalam tubuh kurikulum di pesantren.⁶⁰ Karena keberadaannya menjadi unsur utama dalam diri pesantren, maka sekaligus sebagai ciri pembeda pesantren dari pendidikan Islam lainnya.

Dari segi materi, secara umum isi kitab kuning yang dijadikan rujukan sebagai kurikulum pesantren dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, kelompok ajaran dasar sebagaimana terdapat pada al-Qur'an dan al-Hadits, sedang ajaran yang timbul sebagai hasil penafsiran para ulama-ulama Islam terhadap ajaran-ajaran dasar yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits tersebut. *Kedua*, kelompok kitab kuning yang tidak termasuk kelompok ajaran agama Islam, tetapi kajian yang masuk ke dalam Islam sebagai hasil perkembangan Islam dalam sejarah, seperti kitab yang membahas lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebudayaan, dan metode keilmuan.⁶¹ Sementara metode yang digunakan dalam memproses materi kitab kuning,

⁶⁰ Pada umumnya kitab-kitab kuning yang dijadikan kurikulum di pesantren yang ada di pulau Jawa dan pulau Madura banyak memiliki kesamaan, baik dari penyebaran ilmu, jenis kitab yang digunakan, maupun dari segi sistem pengajarannya, yaitu dengan sistem bandongan (klasikal) dan sorogan (perorangan). Kesamaan-kesamaan ini, pada gilirannya melahirkan hogomonitas pandangan hidup, kultur dan pratek-praktek keagamaan di kalangan santri Jawa dan Madura. Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, Cetakan IV, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 51

⁶¹ A.Chozin Nasuha, "Epistemologi Kitab Kuning", dalam *Pesantren*, No. 1, Vol. VI, 1989, hlm. 12

secara global dapat dipetakan ke dalam metode deduktif, induktif, dan dialektif.⁶²

Keseluruhan kitab kuning yang diajarkan (kurikulum pesantren) di berbagai pesantren dapat dikelompokkan dalam delapan bidang kajian, yaitu *nahwu* dan *sharaf* (gramatika dan morfologi), *fiqh*, *usul fiqh*, *tasawuf* dan etika, tafsir, hadits, tauhid, dan cabang-cabang ilmu lainnya seperti *tarikh* (sejarah) dan *balaghah* (sastra). Di samping itu, kitab-kitab kuning yang beredar di pesantren-pesantren dapat juga digolongkan ke dalam tiga tingkat, yaitu kitab dasar, kitab tingkat menengah, dan

⁶² Metode deduktif (*istinbathi*) banyak dipakai untuk penjabaran dalil-dalil keagamaan (al-Qur'an dan al-Hadits) menjadi masalah-masalah fiqhiyah, terutama masalah yang diproduksi melalui usul fiqhi aliran mutakalimin. Metode induktif (*istiqrāi*) juga banyak digunakan oleh ahli-ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum. Misalnya Imam Syafi'i menetapkan hukum bahwa masa haidh adalah sehari semalam, masa yang lumrah adalah enam atau tujuh hari, dan masa haidh yang terpanjang adalah lima belas hari. Kalau lebih dari masa itu maka bukan darah haidh lagi tapi darah *istihadhah*. Penetapan hukum semacam itu berdasarkan penelitian Imam Syafi'i terhadap beberapa wanita di Mesir, dan akhirnya ditetapkan untuk menghukumi semua wanita di dunia. Metode ini juga banyak digunakan oleh ulama fiqh dengan usul fiqh aliran *ra'yu*. Metode genetika (*takwīni*) yang merupakan cara berpikir mencari kejelasan suatu masalah dengan melihat sebab-sebab terjadinya atau melihat sejarah kemunculannya, banyak digunakan oleh ulama ahli Hadis dari segi *riwayah* dan *dirayah*. Sedang metode dialektika (*jadali*) adalah cara berpikir yang uraiannya diangkat dari pertanyaan atau pernyataan seseorang yang dipertanyakan. Contoh riilnya seperti kitab *Tahāfut al-Falāsifah* karya al-Ghazālī, *Tahāfut al-Tahāfut* karya Ibnu Rusy, dan *al-Rad 'alā al-Manthiqiyyin* karya Ibnu Taimiyah. Lihat *Ibid*, hlm. 17

kitab besar, yang dalam pengajarannya pun disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan kelasnya.⁶³

Pesantren dan kitab kuning adalah dua sisi yang tak terpisahkan dalam keping pendidikan Islam di Indonesia.

⁶³ Di lingkungan pesantren juga ada usaha mengelompokkan kitab berdasarkan periode *mushanef* pengarang kitab dengan mengambil ancar-ancar sebelum atau sesudah abad ke 19 M. Kitab-kitab tersebut dikelompokkan menjadi dua. Pertama, *al-Kutub al-Qadimah* atau kitab klasik salaf. Kitab ini lazim desut dengan “ kitab kuning”, yaitu semua kitab produk ulama yang hidup sebelum abad ke 19. Ciri-ciri umumnya adalah sebagai berikut; (a) Bahasa pengantar seutuhnya bahasa klasik, terdiri atas sastra lirik (*nazhom*) atau prosa lirik (*natsar*). (b) tidak mencantumkan tanda baca semacam koma, titik, tanda seru, tanda tanya dan sebagainya. (c) tidak mengenal pembabakan alinea atau paragraf, dan sebagai gantinya adalah jenjang uraian sering disusun dengan kata *kitābun*, *bābun*, *fashlun*, *far’un*, *tanbih*, dan *tamimatutun*. (d) Isi kandungan kitab banyak berbentuk duplikasi dari ulama sebelumnya. Kitab sumber diperlukan sebagai matan, dikembangkan menjadi resume (*mukhtashor* atau *khulashoh*), *syarah*, *taqrīrat*, *ta’līqāt* dan sebagainya. (e) khusus kitab salaf yang beredar di lingkungan pesantren si pengarang harus tegas berafiliasi dengan madzhab sunni, terutama madzhab arba’ah, sedang kitab salaf yang pengarangnya tidak berafiliasi dengan madzhab sunni hanya dimiliki terbatas oleh kyai sebagai studi banding. Kedua, *al-Kutub al-Ashriyah*. Kitab ini merupakan produk ilmiah yang terbit pasca abad ke 19 M. Ciri yang membedakan dengan kitab salaf adalah; (a) Bahasa yang diremajakan atau bahasa populer dan diperkaya dengan idiom-idiom keilmuan dari disiplin non syar’i, dan bentuk karangannya pada umumnya prosa bebas. (b) tehnik penulisan dilengkapi dengan tanda baca yang sangat membantu dalam pemahaman. (c) sistem dan pendekatan analisisnya terasa sekali dipengaruhi pengetahuan umum di jamannya. (d) isi karangan merupakan hasil studi literer yang merujuk pada banyak buku dan sering tidak ada keterikatan dengan madzhab tertentu. Lihat Adib Mustofa Hanafi, *Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren, Studi Kasus di Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang Jawa Timur (Skripsi)*, Malang: Fak. Pendidikan IPS IKIP, 1993), hlm. 164-166



Sejak sejarah awal berdirinya, pesantren tidak dapat dipisahkan dari literatur kitab buah pemikiran para ulama salaf yang dimulai sekitar abad ke-9 itu. Boleh dibilang, tanpa keberadaan dan pengajaran kitab kuning, suatu lembaga pendidikan tak absah disebut pesantren. Begitulah fakta yang mengemuka di lapangan. Abdurrahman Wahid dalam konteks ini menegaskan dengan menyatakan, kitab kuning telah menjadi salah satu sistem nilai dalam kehidupan pesantren.⁶⁴ Namun realitanya perubahan dan perkembangan pesantren mengisyaratkan tambahnya beban belajar para santri pesantren, yang semula hanya mempejari kurikulum pesantren dituntut menguasai kurikulum pendidikan formal, akibatnya kurikulum pesantren makin tergerus dan santri lebih mengutamakan penguasaan kurikulum pendidikan formalnya. Untuk itu, pengembangan kurikulum pesantren pada pesantren *kholaf* (pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal) sebagai upaya menjaga dan melestariakan ciri khas pesantren merupakan konsekuensi logis dari dinamika kebutuhan masyarakat yang menjadi kekuatan utama kelangsungan pesantren, baik pada lingkup lokal, nasional, dan global.

Pengembangan kurikulum pesantren dapat dipahami sebagai upaya pembaharuan pesantren di bidang kurikulum sebagai akibat kehidupan masyarakat yang berubah dalam rangka mendukung keberadaan

⁶⁴ Abdurrahman Wahid, *Nilai-Nilai Kaum Santri* dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985).

pesantren yang dapat memenuhi kebutuhan santri (peserta didik). Mengingat kompleksitas yang dihadapi pesantren, maka pengembangan kurikulum pesantren dapat menggunakan strategi-strategi yang tidak merusak ciri khas pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang tradisional. Di antara strategi yang patut dipertimbangkan sebagai lembaga pendidikan non formal dan mengelola pendidikan formal, maka pengembangan kurikulum pesantren hendaknya tetap berada dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Maksudnya kitab-kitab yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pada pendidikan formal yang dikelolanya. Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan oleh pesantren terintegrasi dengan pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan formal, sehingga ciri khas pesantren tetap terpelihara. Di samping itu, pengembangan kurikulum pesantren sebagai bagian peningkatan mutu pendidikan nasional harus dilakukan secara komprehensif, cermat dan menyeluruh (*kafah*), terutama terkait dengan mutu pendidikan pesantren, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja dengan tetap menggunakan kitab kuning sebagai referensinya. Dipertahankannya kitab kuning dijadikan referensi kurikulum, karena kandungannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi tentang isi maupun kedalaman kajian keislamannya.

Bagi pesantren, kitab kuning sangatlah penting untuk memfasilitasi proses pemahaman keagamaan yang mendalam sehingga mampu merumuskan penjelasan



yang segar tetapi tidak ahistoris mengenai ajaran Islam (al-Quran, dan Hadits Nabi). Kitab kuning mencerminkan pemikiran keagamaan yang lahir dan berkembang sepanjang sejarah peradaban Islam. Untuk menjadikan pesantren tetap sebagai pusat kajian keislaman, maka pengembangan kurikulum pesantren pada pesantren modern dengan tetap memelihara dan mempertahankan kitab kuning yang terintegasi dengan kurikulum pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan santri, yaitu kurikulum pesantren yang dicirikan semata-mata mengajarkan ilmu agama bersumber pada kitab kuning (kitab klasik), menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum (yang diajarkan pada pendidikan formal), memberikan ilmu keterampilan dengan tekanan ilmu agama, dan melaksanakan pengajian kitab-kitab klasik, pendidikan pada madrasah, dan pendidikan pada sekolah umum.⁶⁵

Untuk menjadikan pesantren tidak bergeser dari kitab kuning ke kitab putih pada pesantren *kholaf*, maka dalam pengelolaan kurikulum pesantren di samping masih ketat mempertahankan tradisi pesantren, namun terbuka dengan membuka pendidikan formal melalui kurikulum yang dikembangkan dengan tetap berpijak pada prinsip “pemapanan tradisi pesantren sembari mengadaptasi tradisi yang lebih baik” agar akar tradisi pesantren tetap terawat, dan pada saat yang sama

⁶⁵ Haidar Putra Daulay, *Pesantren, Sekolah, dan Madrasah; Tinjauan Dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam*, (Disertasi), (Yogyakarta: PPs. IAIN Sunan Kalijaga, 1991), hlm. 416

kekurangan pesantren dapat dibenahi. Dengan demikian, karakter dan keunikan pesantren *salafi* masih terpelihara sebagai ciri khas sistem pendidikan pribumi, ⁶⁶dan semangat *kholaifi* terakomodir. Di samping itu, kurikulum pesantren harus dikemas secara mandiri, karena perbedaannya dengan lembaga pendidikan konvensional pada umumnya. ⁶⁷ Pengelolaan pendidikan pada pesantren menuntut inovatif dalam pengembangan kurikulumnya agar pesantren tetap eksis sebagaimana sejarah lahirnya namun tetap apresiatif terhadap perkembangan zaman, karena transformasi dari eksistensi menjadi keharusan dan merupakan keistimewaan dan resiko yang unik bagi pesantren. ⁶⁸Dalam tataran praktis, dapat diartikan bahwa pengembangan kurikulum pesantren harus memperhatikan perbedaan yang ada, sehingga karakter dan keunikan yang dimiliki pesantren tetap terjaga, karena mengabaikan keunikan dan karakter pesantren berarti menghilangkan cita-cita pesantren itu sendiri. Oleh karena itu, pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan tradisional khas Islam tidak bisa dipaksakan untuk sepenuhnya mengikuti kurikulum yang digunakan secara luas. Sebagaimana pendapat Abdurrahman Wahid bahwa kurikulum pesantren harus

⁶⁶ Lihat sejarah lahirnya pondok pesantren dalam Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan...*, hlm.1

⁶⁷ Lihat: Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Ed. Sayed Mahdi (Jakarta: Erlangga), hlm. 110

⁶⁸ Lihat Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), hlm. 23-24

dikemas secara mandiri, karena perbedaannya dengan lembaga pendidikan konvensional pada umumnya.⁶⁹ Sehingga proses pengembangannya tidak boleh bertentangan dengan kerangka penyelenggaraan pesantren yang dikenal khas, baik dalam isi dan pendekatan yang digunakan⁷⁰ sehingga dengan penguasaan kitab kuning, kreasi dan dinamika pemikiran Islam pesantren yang serius di Indonesia tidak akan berhenti.

3. Desain Kurikulum Pesantren

Terkait dengan kurikulum pesantren dan kitab kuning dewasa ini setidaknya terdapat dua model pesantren. Model *pertama*, penulis sebut sebagai pesantren kitab kuning atau juga biasa dikenal orang sebagai pesantren murni *salafi*. Kini, pesantren ini terhitung amat langka dan hanya menyelenggarakan sekolah diniyah (Madrasah Diniyah *Ula/Wustho/Ulya*). Ukuran kelulusan dan keberhasilan seorang santri betul-betul ditentukan oleh kepiawaiannya dalam penguasaan kitab kuning. Penguasaan dalam hal ini adalah tak sekedar bisa membaca dengan benar, tapi juga memahami, mengungkapkan, mengembangkan, dan mengkontekstualisasikan kandungannya. Kalau pun toh ditemukan 'kitab putih' (non kitab kuning) pada pesantren *salafi* dalam kurikulumnya, itu pasti hanya bagian yang

⁶⁹ Lihat: Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Ed. Sayed Mahdi (Jakarta: Erlangga), hlm. 110

⁷⁰ Sulthon Masyhud dkk, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), hlm. 73

sangat kecil, dan sifatnya tak wajib atau hanya sekedar pengayaan. Pesanten kitab kuning (*salaf*), adalah pesantren yang masih mewarisi *genuine* karakteristik khazanah Islam Indonesia. Pesantren jenis ini perlu dipertahankan dan dibina agar dapat menjaga karakteristik serta tradisi keilmuannya tidak luntur dan tetap berperan besar sebagai pialang budaya sekaligus subkultur dari masyarakat pesantren.

Model *kedua*, pesantren kolaboratif yang lazim disebut *kholaf*. Pengelolaan pembelajarannya merupakan perpaduan antara sekolah formal dengan kurikulum standar pemerintah (pendidikan formal) dan madrasah diniyah dengan standar kurikulum kitab kuning. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, santri harus bersekolah dua kali dalam sehari, misalnya sekolah formal pada pagi hari dan madrasah diniyah pada malam hari dengan kurikulum kitab kuning. Inilah yang penulis maksud dengan kolaborasi “kitab kuning” dengan “kitab putih”. Dengan demikian, *output* alumninya diharapkan menjadi sosok yang *faqih fi ulumuddin*, juga yang *faqih fi mashalihil ummah*.

Secara garis besar, pesantren kolaboratif ini dimaksudkan untuk merespon modernisasi dalam pendidikan Islam di Indonesia yang tujuannya ingin mengkolaborasikan antara *tafaquh fi al-din* dan penguasaan ilmu pengetahuan umum. Dengan demikian, pengelolaan kurikulum pondok pesantren di samping mempertahankan kurikulum yang berbasis agama, juga melengkapi dengan kurikulum yang menyentuh dan



terkait erat dengan persoalan dan kebutuhan kekinian.
⁷¹ Oleh karena itu, desain pengembangan kurikulumnya perlu dirancang sesuai wacana yang berkembang dalam proses integrasi pendidikan Islam dalam hal ini pendidikan pesantren ke dalam pendidikan nasional.

Kurikulum merupakan rangkaian kegiatan yang menampung kerangka, guna membantu para guru untuk melaksanakan segala kegiatan pembelajaran yang efektif.⁷² Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan santri dan masyarakat, perlu merancang desain kurikulum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melakukan pertanyaan yang perlu dijawab dan dirancang bangun melalui kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah; apa yang akan diperbuat alumni pesantren dengan pribadinya? Apa yang akan diperbuat olehnya terhadap lingkungan fisiknya? Apa makna lingkungan sosial bagi dirinya dan apa yang akan diperbuat olehnya di lingkungan sosialnya? Apa yang akan diperbuat terhadap keturunannya atau generasi mendatang?⁷³ Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

⁷¹ Pendidikan yang dilakukan merupakan pendidikan Islam yang utuh dan sempurna dan meliputi seluruh dimensi manusia, yaitu pendidikan akal dengan ilmu pengetahuan (*ma'rifat*) dan pendidikan jasmani dan olah raga (*al-riyadhah*), dan pendidikan jiwa dengan iman (*al-Iman*). Anwar Jundi, *at-Tarbiyah wa Binā al-Ajyāl fi Dau' al-Islām*, (Beirut:Dār al-Kitab al-Libnāni, 1975),hlm. 7-8

⁷² James Dean Brown, *The Elements of Language Curriculum*, (Tanpa kota: Heinle and Heinle Publisher, 995), hlm. 19

⁷³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 202

tersebut, maka perencanaan kurikulum pesantren kolaboratif harus didahului dengan menyesuaikan dengan kebutuhan (*needs assesment*) secara akurat agar pendidikan pesantren fungsional. Kajian kebutuhan tersebut harus dikaitkan dengan kebutuhan global. Pelaksanaan kurikulum menggunakan pendekatan kecerdasan majemuk (*multiple intelligence*) dan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*). Sedang evaluasinya dengan menerapkan penilaian menyeluruh terhadap semua kompetensi santri (*authentic assesment*). Di samping itu, kurikulum harus dikembangkan secara kontekstual sebagai upaya membangaun pesantren yang lebih menitik beratkan pada aspek afektif seimbang dengan kognitif, serta memadukan secara harmonis pendidikan *formal*, *non formal*, dan *informal* yang ada di pesantren. Allan. Glatthorn⁷⁴ menjelaskan bahwa kurikulum tidak hanya terbatas hal-hal yang tampak, namun ada hal lain yang disebut kurikulum tersembunyi (*hiden curriculum*) yang memberi peran signifikan dalam proses pembelajaran. Demikian juga pada kurikulum implisit menjadi perangkat penting guna melahirkan *out put* yang diharapkan, yang dirancang dengan cerdas dan rapi, bersifat fleksibel, sinergi dan harnonis antara tujuan kepentingan pesantren dan nasional, dan berpusat pada persoalan-persoalan solial dan pribadi. Lebih-lebih pada pesantren yang secara kesehariannya para santri hidup diasrama dalam

⁷⁴ Allan A. Glatthorn, *Curiculum Leadership*, (Illinois: Scott Foresman and Company, 1987), hlm. 20

bimbingan dan asuhan kyai, maka peran pengasuh (para ustadz) sangat dominan terkait dengan pengembangan kurikulum dan pembelajarannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka desain kurikulum pesantren *khalaf* perlu memperhatikan ruang lingkup, *scope* dengan memperhatikan tujuan yang diharapkan, dan sesuai dengan *sequence*-nya. Dengan demikian santri dikelompokkan berdasarkan tingkat penguasaan materi kepesantrenan (bukan berdasarkan kelas pada pendidikan formal) sehingga kompetensi materi kepesantrenan bagi santri dapat terukur berdasarkan tingkatan kelompok kelasnya (*ula/wustho/ulya*) atau lamanya nyantri di pesantren. Untuk itu, setiap santri baru harus melalui tataran kelompok *ula* dan bila dipandang telah menguasai pada materi kelompok *ula* atau bahkan *wustho*, maka dapat naik (*transfer*) ke kelompok *ulya* sehingga keluaran pesantren dapat terukur sesuai kelas diniyah yang ditempuh.

Model ini perlu untuk diterapkan, bahwa anak (santri) yang punya kelebihan perlu kelebihan seksama agar dapat berkembang seksama. Kegiatan ini memberikan peluang yang lebih besar kepada para santri sebagai wujud kepedulian pesantren.⁷⁵ Di samping itu, kemampuan santri dalam menguasai materi kurikulum pesantren (madrasah diniyah) untuk diintegrasikan sebagai landasan kenaikan kelas pada

⁷⁵ Lihat Virget S.Ward dalam Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar & Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), hlm. 18-19

pendidikan formal. Dari sini diharapkan kemampuan santri dalam menguasai ilmu agama (kepesantrenan) dan ilmu umum (pendidikan formal) dapat seirama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka desain kurikulum pesantren yang digunakan untuk melayani santri secara garis besarnya dapat dikembangkan melalui; (1) melakukan kajian kebutuhan (*need assessment*) untuk memperoleh faktor-faktor penentu kurikulum serta latar belakangnya (2) menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup urutannya. (3) merumuskan tujuan yang diharapkan, (4) menentukan standar hasil belajar yang diharapkan sehingga keluarannya dapat terukur, (5) menentukan kitab yang dijadikan pedoman materi ajar dan ditentukan sesuai urutan tingkat kelompoknya, (6) menentukan syarat yang harus dikuasai santri untuk mengikuti pelajaran pada tingkat kelompoknya, (7) menentukan strategi pembelajaran yang serasi serta menyediakan berbagai sumber dalam proses pembelajaran, (8) menentukan alat evaluasi penilaian hasil belajar, dan (9) membuat rancangan rencana penilaian kurikulum secara keseluruhan dan strategi pengembangan berkelanjutan.⁷⁶

4. Pelaksanaan Kurikulum Pesantren

Pada dasarnya pesantren hanya mengajarkan ilmu-ilmu dengan mendasarkan kurikulum pada sumber kajian kitab-kitab klasik yang ditulis dalam bahasa arab sebagai mata pelajarannya. Kitab-kitab tersebut mencakup al-

⁷⁶ Lihat Sulthon Masyhud dkk, *Manajemen Pondok...*, hlm. 78-

Qur'an beserta tajwid dan tafsirnya, aqa'id dan ilmu kalam, fiqih dan ilmu ushul fiqih, al-hadits dan musthalahul hadits, bahasa Arab dengan seperangkat dengan seperangkat ilmu alatnya, seperti ilmu nahwu, sharaf, bayani, badi' dan 'arud, tarikh, manthiq dan tasawuf.⁷⁷ Kitab-kitab tersebut biasanya dicetak dengan kertas berwarna kuning, sehingga lazim disebut dengan kitab kining sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pelaksanaan kurikulum pesantren dalam pembelajaran dilakukan dengan metode *bandongan*, *sorogan*, dan *hafalan*. Metode *bandongan* merupakan metode pembelajaran dengan berpusat pada guru (guru yang aktif dan santri pasif) di mana para santri dengan duduk di sekeliling guru (kyai) yang membaca kitab dan santri menyimak masing-masing kitab dan mencatat jika dipandang perlu. Metode pembelajaran ini dilakukan tidak dengan demokratis, karena otoritas guru sangat tinggi dan tidak terjadi dialog atau tanya jawab antara guru dengan santri, sehingga belum berorientasi pada kemampuan santri (*student activity and thinking skill*), kompetensi yang diharapkan, sistem penyampaian, dan indikator pencapaian hasil belajar belum dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan dimulai.⁷⁸ Sesungguhnya melalui pembelajaran yang demokratis dan berorientasi pada pencapaian kompetensi, pada diri santri diharapkan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 89

⁷⁸ Untuk menjadikan pembelajaran yang efektif dan demokratid lihat Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi* (Jakarta: Premanda Media, 2004), hlm. 62

terjadi perubahan perilaku yang lebih baik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni⁷⁹ yang berkembang secara pesat dewasa ini. Sehingga santri benar-benar menguasai *fashlun* disamping menguasai *fasword* (mampu mengakses internet) untuk memperkaya wawasan pengetahuan. Untuk itu diperlukan sistem pembelajaran yang baik, yaitu mengacu pada sistem belajar tuntas. Sistem belajar tuntas adalah model pembelajaran dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas sesuai dengan kondisi yang tepat, agar semua santri mampu belajar dengan baik serta memperoleh hasil belajar secara maksimal terhadap bahan yang dipelajari⁸⁰ sebagaimana diharapkan.

Metode *sorogan* adalah metode pembelajaran di mana santri menghadap guru secara satu persatu dengan membawa kitab yang dipelajari. Sehingga terjadi

⁷⁹ Peraturan Pemerintah No. 55/2007, pasal 2 ayat 2

⁸⁰ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis*, hlm. 53. Mukminan menjelaskan, bahwa dikatakan belajar tuntas apabila santri telah menguasai secara tuntas standar kompetensi maupun kemampuan dasar dari suatu unit pelajaran. Mukminan, *Pembelajaran Tuntas (Mastery Learning)* (Jakarta: Direktorat Lanjutan Pertama, 2003), hlm. 11. Guna merealisasikan sistem belajar tuntas, pelaksanaan pembelajaran kurikulum PAI berbasis kompetensi, harus berpedoman pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dipersiapkan oleh guru PAI. Dalam melaksanakan pembelajaran harus: a) mengarah pada dunia nyata; b) mengutamakan pengalaman nyata; c) berpusat pada santri; d) santri aktif dan kritis; e) pengetahuan bermakna dalam kehidupan; f) perubahan perilaku; g) santri praktek bukan menghafal; h) pemecahan masalah; dan i) santri aktif guru mengarahkan, lihat Depdiknas. *Pendidikan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2002), hlm. 6

kemungkinan antara santSehingga terjadi kemungkinan antara santri satu dengan yang lain terjadi perbedaan kitab yang dipelajari. Demikian juga akan terjadi kecepatan penguasaan yang sangat berbeda atas penguasaan kompetensi dari kit dari kitab yang dipelajarinya. Dalam pembelajaran dengan metode *sorogan*, guru membacakan dan memterjemahkan kalimat demi kalimat, kemudian menerangkan maksudnya, atau guru cukup menunjukkan cara membaca yang benar, tergantung ateri yang diajukan dan kemampuan santri. Adapun metode pembelajaran dengan *hafalan* berlangsung di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Materi hafalan biasanya dari ayat-ayat al-Qur'an atau dalam bentuk syair atau *nazham*. *Nazham* merupakan bentuk metode hafalan yang sangat efektif untuk memelihara daya ingat (*memorizing*) santri terhadap materi yang dipelajarinya. Metode *sorogan* maupun *hafalan* memiliki kelebihan, di mana bagi santri yang cerdas dan kreatif akan lebih cepat menguasai materi yang dipelajari, sedang bagi santri yang lamban agak ketinggalan. Dengan demikian, akan terjadi kompetisi dan persaingan sehat dalam penguasaan materi yang dipelajari. Namun demikian, metode *sorogan* dan *hafalan* sangat membutuhkan waktu yang panjang, sehingga waktu yang tersedia kurang efektif terutama bila guru harus melayani sejumlah santri yang relatifatif banyak. Untuk itu, seorang guru dituntut mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai kurikulum, serta hasil belajar santri dalam mencapai kompetensi yang diharapkan,



sebagai cermin penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari santri⁸¹dengan menggunakan waktu yang seefektif mungkin.

Terkait dengan pelaksanaan kurikulum pesantren, seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk dapat mengadopsi atau mengadaptasi teori-teori pembelajaran dari teori yang digunakan dengan teori yang baru, yang salah satunya sebagaimana mana tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada kompetensi, perkembangan dan kondisi santri untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini santri harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) belajar untuk memahami dan menghayati; (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif; (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain; dan (5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan.
3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan santri mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan,

⁸¹ Lihat E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat*, hlm. 146 dan 246

- pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi santri dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi santri yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan santri dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madyo mangun karso, ing ngarso sung tulodo* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
 5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadahi, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.
 6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
 7. Kurikulum dilaksanakan mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri, diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang



cocok dan memadai antara kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.⁸²

Ketujuh prinsip tersebut harus diperhatikan, karena pembelajaran merupakan proses menciptakan santri belajar. Untuk itu, pembelajaran harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan (proses) pembelajaran, penilaian hasil belajar, evaluasi proses pembelajaran. Dengan perkataan lain, pelaksanaan kurikulum merupakan proses pembelajaran atau interaksi edukatif antara guru yang menciptakan suasana belajar dan santri yang merespons terhadap usaha guru tersebut.⁸³ Mengingat pelaksanaan kurikulum pada hakikatnya pelaksanaan pembelajaran, maka guru diharapkan mampu menyelenggarakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkembangkan motivasi untuk hidup sukses.⁸⁴ Dengan demikian, guru dituntut mampu mengembangkan metode pembelajaran yang bervariasi, kondisi belajar yang menyenangkan, dan tepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan dapat menjadikan santri belajar, sebagai upaya mempertinggi mutu pengajaran yang dilakukan secara *contextual learning and teaching*.

⁸² Permendiknas No 22/2006, Lampiran, 3 (Jakarta: Depdinas., 2006), hlm. 5 dan 6

⁸³ Lihat Departemen Agama, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimarga Islam, 2001), hlm. 88

⁸⁴ Peraturan Pemerintah No 55/2007, pasal 5 ayat 7

Adapun metode dan strategi pembelajaran bervariasi yang dapat digunakan,⁸⁵ adalah sebagai berikut:

1. *Student centered instruction*, yaitu pembelajaran yang berpusat pada santri seperti diskusi yang dapat dibentuk dalam berbagai variasi strategi dari *small group discussion* sampai seminar. Pembelajaran dapat dikembangkan dengan cara simulasi dan *game* yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih hidup, santri bersifat aktif sedang guru sebagai fasilitator.⁸⁶
2. *Collaborative learning*, yaitu cara belajar santri aktif (CBSA) melalui proses pembelajaran yang dilakukan bersama-sama antara guru dengan santri atau antara santri dengan santri. Hal ini sangat bermanfaat karena bersifat *collaborative*, yaitu belajar yang saling membantu antara guru dengan santri dan antara santri dengan santri.⁸⁷
3. *Cooperative learning*, yaitu strategi yang sering disebut dengan *group work*, yaitu proses pembelajaran yang memberi kesempatan kepada santri untuk terlibat dalam kelompoknya, dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, dengan masing-masing anggota

⁸⁵ Lihat Mardiyatun. *Implementasi Kurikulum*, hlm. 68-70

⁸⁶ *Student Centered* adalah menempatkan santri sebagai subyek didik yakni mengikutsertakan santri dalam proses pembelajaran. Lihat Depdiknas, *Pedoman Pembelajaran Tuntas*, (Jakarta: Depdiknas, 2004) hlm. 8

⁸⁷ Dede Rosyada, *Paradigma*, hlm. 165. Dalam pembelajaran santri didorong untuk belajar sendiri, mencari sumber belajar dalam mempresentasikan sendiri delapan kelas. Lihat Mukminan, *Pembelajaran*, hlm. 9

memiliki tugas dalam kelompoknya dan mereka saling memeriksa pekerjaan teman-temannya kemudian bisa dikembangkan menjadi variasi kelompok, antara dua kelompok atau lebih sehingga semakin banyak masukan. Strategi *cooperative learning* adalah belajar yang dilakukan secara bersama-sama, saling membantu satu sama lain dalam kebersamaan kerja untuk mencapai keberhasilan masing-masing peserta dalam mencapai kompetensi ideal, yang pada hakikatnya membentuk *image* kompetensi kelas.

88

4. *Self discovery learning*, yaitu belajar melalui penemuan mereka sendiri (*inquiry*), melalui penelitian dengan menemukan sendiri masalah yang harus dipelajari dan dipecahkan (*problem solving*). Untuk itu, keterlibatan santri dalam pembelajaran merupakan hal sangat penting dan menentukan keberhasilan pembelajaran.⁸⁹
5. *Quantum learning*, yaitu strategi belajar di mana dalam belajar semua indera harus bekerja aktif (*multi sensor*) seperti melihat, mendengar, merasakan, melakukan, di mana semua komponen kecerdasan akan aktif bekerja dengan menggunakan multimedia dan pendayagunaan kelompok belajar.⁹⁰

⁸⁸ Dede Rosyada, *Paradigma*, hlm. 167

⁸⁹ E.Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004, Panduan Pelaksanaan KBK* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 156

⁹⁰ LPK, *Materi Pokok Sosialisasi KBK* (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang, Depdiknas, 2003), hlm. 3

6. *Contextual teaching and learning (CTL)*, yaitu strategi yang digunakan untuk membantu santri untuk memahami makna dari materi pelajaran dengan cara mengaitkan mata pelajaran tersebut dengan konteks kehidupan mereka. Secara nyata perwujudan dari belajar kontekstual adalah belajar berbasis masalah, berbasis *inquiry*, berbasis proyek, berbasis kerja, berbasis kooperatif.⁹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dimengerti bahwa sistem pembelajaran demokratis cenderung pada pemikiran belajar yang meliputi: (1) belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri; (2) anak belajar dari mengalami; (3) santri perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide; (4) bekerja dimulai dari lingkungan belajar berpusat pada santri yang aktif, kritis, dan kreatif; (5) pembelajaran diarahkan pada pengetahuan yang bermakna dalam kehidupan; (6) hasil belajar diukur dengan berbagai teknis dan dengan proses penilaian yang benar; dan (7) pembelajaran harus menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok. Dengan demikian, setelah selesai pembelajaran santri diharapkan mampu mengembangkan empat keterampilan (*skill*) beragama yang meliputi ber-*akhlāqu al-karimah*, beribadah baik fardhu maupun sunnah, berdakwah, membaca dan menulis al-Qur'an. Keempat keterampilan beragama tersebut dijadikan alat untuk memperoleh "*empirical*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 2. Lihat E. Mulyasa, *Implementasi*, hlm. 137-138



knowledge”, artinya ilmu-ilmu tersebut dikembangkan dan diterapkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

III. PENUTUP

Sejak sejarah awal berdirinya, pesantren tidak dapat dipisahkan dari literatur kitab buah pemikiran para ulama salaf yang lazim disebut dengan kitab kuning. bahkan tanpa keberadaan dan pengajaran kitab kuning, suatu lembaga pendidikan tak absah disebut pesantren, karena kitab kuning telah menjadi salah satu sistem nilai dalam kehidupan pesantren. Secara umum, kitab kuning dipahami oleh beberapa kalangan sebagai kitab referensi keagamaan yang merupakan produk pemikiran para ulama pada masa lampau (*al-salaf*) yang ditulis dengan format khas pra-modern.

Tradisi penggalian dan pengembangan intelektual via kitab kuning di pesantren kian hari kian surut. Hanya beberapa pesantren saja yang masih ajeg menjaga dan melestarikan tradisi ini. Menjaga dan melestarikan dalam konteks ini adalah menjadikan kitab kuning sebagai literatur utama yang wajib dipelajari santri dan menjadi bahan pertimbangan utama kelulusan atau keberhasilan santri.

Secara garis besar, pesantren *khalaf* ini sebenarnya ingin merespon modernisasi dalam asas pendidikan Islam di Indonesia. Mulanya memang bagus, ingin mengkolaborasikan antara *tafaquh fi al-din* dan penguasaan ilmu pengetahuan umum. Tapi sayang, lama-



kelamaan seiring perkembangan lembaga pendidikan, ternyata kemajuan yang diraih tak berjalan seimbang. Santri lebih mementingkan penguasaan ilmu umum sebagai standar kelulusan ujian nasional daripada kepiawaian menguasai kitab kuning yang tak bisa menunjang diterimanya kuliah di sebuah perguruan tinggi terkemuka, dan ini gambaran sederhana kenyataan modernisasi di pesantren. Pergeseran ini bukan berarti terjadi semudah membalik telapak tangan. Begitu sistem pendidikan modern masuk pesantren, saat itu pula kitab kuning tergeser. Tidak. Proses pergeseran literatur ini memakan waktu lama, seiring dengan perjalanan modernisasi itu sendiri.

Untuk membekali santri terkait dengan kitab kuning sebagai ciri pesantren, maka desain kurikulum perlu dirancang dengan memperhatikan ruang lingkup, *scope* dengan memperhatikan tujuan yang diharapkan, dan disesuaikan dengan *sequence*-nya. Adapun cara pembelajarannya santri dikelompokkan berdasarkan tingkat penguasaan materi kepesantrenan sehingga penguasaan kompetensi materi kepesantrenan dapat terukur berdasarkan tingkatan (kelompok) kelasnya (*ula/wustho/ulya*). Untuk itu, setiap santri baru harus melalui tataran kelompok *ula* dan bila dipandang lelah menguasai pada materi kelompok *ula* atau bahkan *wustho*, maka dapat tranfer ke kelompok *ulya*. Di samping itu, dibutuhkan perubahan paradigma kepemimpinan dari yang instruktif-kharismatik menjadi pola kepemimpinan kolejal, demokratis, delegatif, visioner,



dan transparan. Setelah adanya pergeseran pola kepemimpinan harus ditindak lanjuti dengan menetapkan standar mutu mulai dari menetapkan visi, misi dan program pesantren agar menjadi pesantren berbasis mutu, yang akan menghasilkan *out put* yang kompetitif dan berkualitas sebagaimana menjadi harapan kita bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib Mustofa Hanafi, *Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren, Studi Kasus di Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang Jawa Timur (Skripsi)*, Malang: Fak. Pendidikan IPS IKIP, 1993), hlm. 164-166.
- Abdurrahman Wahid, *Nilai-Nilai Kaum Santri dalam M. Dawam Rahardjo, Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985)
- Ainurrofiq Dawam, *Managemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2004) Allan A. Glatthorn, *Curriculum Leadership*, (Illinois: Scott Foresman and Company, 1987)
- nik Ghufron, "Motivasi Kerja Guru dalam Pelaksanaan Tugas Sebagai Pengembang Kurikulum", *Thesis* (Bandung PPS IKIP Bandung, 1993)
- Anwar Jundi, *at-Tarbiyah wa Binā al-Ajyāl fi Dau' al-Islām*, (Beirut:Dār al-Kitab al-Libnāni, 1975)
- A.Chozin Nasuha, "Epistemologi Kitab Kuning", dalam *Pesantren*, No. 1, Vol. VI, 1989
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi* (Jakarta: Premanda Media, 2004)
- Depdiknas. *Pendidikan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2002)
- Departemen Agama, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2001) Depdiknas, *Pedoman Pembelajaran Tuntas*, (Jakarta: Depdiknas, 2004)

- E, Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*,
(Bandung: Rosda Karya, 2003)
- _____, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)
- Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*,
(Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980)
- Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan
Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*,
(Jakarta: Kencana, 2007).
- Hasan Hanafi, *al-Turās wa al-Tajdid Muqifunā Min- al-Turās
al-garbi al-Qadīm*; dan *al-Turās wa al-Tajdid Mauqifunā
Min al-Turās al Garbi Muqadimah fi 'ilmi al-Istigrab*,
(t.tp: Dar al-Faniyyah, tt),.
- Horikoshi, H, *Kiai dan Perobahan Sosial*, Terj. Umar Basalim
dkk, (Jakarta: P3M, 1987)
- HM Rofingi, *Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama
(Analisis Kritis Terhadap Sekolah NU DIY)*, dalam
An Nur Jurnal Studi Islam, Vol II No. 4, Februari 2006
- Haidar Putra Daulay, *Pesantren, Sekolah, dan Madrasah;
Tinjauan Dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam*,
(Disertasi), (Yogyakarta: PPs. IAIN Sunan Kalijaga,
1991)
- Idi Abdullah, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*
(Jakarta: Griya Media Pratama, 1999)
- James Dean Brown, *The Elements of Language Curriculum*,
(Tanpa kota: Heinle and Heinle Publisher, 995)
- John dan Joseph Bondi, *Curriculum Development, A Gide to
Practice*, (Ohio: Merryl Publihing Company, 1989)



- Khaerudin dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kosep dan Implementasinya di Madrasah* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007)
- Mashudi Abdurrahman, Memelihara Tradisi, Memperbaharu Pendidikan Pesantren, dalam *Bina Pesantren*, Edisi 01/Tahun 1/Oktober 2006
- Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002)
- _____, *al-Fikr al-Tarbawi al-Islamiy: Muqadimatun fi Ushulih al-Ijtimaiyyati wa al-/Aqlaniyyati* (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt)
- Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Ed. Sayed Mahdi (Jakarta: Erlangga).
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT. Raja Graфика Persada, 2005)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- _____, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru, 1989)
- Nurcholish Madjid, *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren*, dalam: Dawam Raharjo (Ed), *Pergulatan Pesantren*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1985).



- Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976)
- Shadily,, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992)
- S. Nasution. *Azas-azas Kurikulum* (Bandung: Jemmars, 2001)
- Sulthon Masyhud dkk, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003)
- Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan pengembanagn Kurikulum*, edisi IV (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995)
- Sembodo Ardi Wibowo, *Epistimologi Pendidikan Islam Pesantren (Studi Komparatif Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta)*, *Disertasi*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 2
- Umar, *Modernisasi Pendidikan Islam Pesantren (Studi tentang Dinamika Pesantren Darul Ulum Jombang)*, *Ringkasan Disertasi*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2009)
- Zamakhshyari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cetakan IV, (Jakarta: LP3ES, 1994)
- Zuli Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam, Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)







Psikopatologi Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Pada Pendidikan

Pada dasarnya psikopatologi (gangguan kepribadian) dalam Islam banyak sekali tokoh yang mencoba mengklasifikasikannya. Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah, jenis psikopatologi dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, gangguan kepribadian yang berhubungan dengan akidah atau dengan Tuhan, seperti menyekutukan Allah (syirik), mengingkari, berbuat dosa, bermuka dua, pamer, dan menuruti

bisikan syetan. Kedua, gangguan kepribadian yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti iri hati, dengki, buruk sangka, marah, benci, penakut, pelit, menipu, mengolok-olok, menyakiti, memfitnah, menceritakan keburukan orang lain, rakus, adu domba, putus asa, menganiaya, boros dan materialism. Ketiga, gangguan kepribadian yang berkaitan dengan pemanfaatan alam semesta sebagai realisasi tugas-tugas kekhilafan seperti membuat kerusakan

A. PENDAHULUAN

Akibat dominasi pola kehidupan modern yang materialistik dan egoistik, mengakibatkan situasi psikologis umat manusia semakin tidak menentu. Karenanya, tidak mengherankan apabila akhir-akhir ini ditemukan berbagai perilaku yang *aneh-aneh* dan *nyleneh* yang dianggap sebagai gejala patologis bagi kehidupan modern. Sering kita mendengar istilah gangguan kepribadian, orang berkepribadian ganda. Terkadang kita sering mendengar orang memberikan label kepada orang lain bahwa tidak punya kepribadian. Lalu, apa sebenarnya gangguan kepribadian? Berdasarkan perspektif psikologi Islam, gangguan kepribadian adalah serangkaian perilaku manusia yang menyimpang dari fitrah asli yang murni, bersih dan suci, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak zaman azali. Gangguan tersebut dapat menyebabkan rusaknya jiwa sehingga jiwa menjadi kosong, hati akan mati, walaupun secara fisik terlihat gagah dan sehat. Individu yang mengalaminya akan mengalami



kekosongan kalbu, gelisah, gersang, dan tidak dapat menikmati kehidupannya.

Dalam konsep Islam istilah gangguan kepribadian ini sering diidentikkan dengan akhlak tercela, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama. (H.M. Arifin, 1979: 77) Dalam persepektif psikologi Islam sendiri gangguan kepribadian diartikan sebagai perilaku yang berdosa dan merupakan penyakit hati yang dapat mengganggu realisasi dan aktualisasi diri seseorang. (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, 2002:164) Dari pengertian tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa perilaku dikategorikan sebagai gangguan kepribadian Islam jika berbau dosa, jika tidak maka belum bisa dikatakan sebagai gangguan kepribadian dalam Islam. Gangguan kepribadian yang mengarah kepada perilaku buruk sering dikenal dengan istilah psikopatologi. Dalam konsep psikologi Islam sendiri, psikopatologi diakibatkan oleh kefitrian qalbu manusia hilang, karena qalbu menjadi pusat kepribadian manusia. Selain itu, psikopatologi bersumber dari dosa (*guilty feeling*) dan perilaku maksiat. Dalam Islam psikopatologi ini dikenal dengan istilah penyakit hati.

Dalam makalah ini penulis akan membahas pengertian psikopatologi, sejarahnya dan macam-macam psikopatologi dalam perspektif psikopatologi kontemporer dan psikopatologi Islam serta implikasinya bagi pendidikan. Diharapkan dari pembahasan ini kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang psikopatologi



dalam berbagai sudut pandang serta mampu mengaplikasikannya dalam dunia pendidikan.

B. PENGERTIAN PSIKOPATOLOGI

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa psikopatologi adalah gangguan kepribadian. Menurut Shafii psikopatologi istilah yang mengacu pada baik studi tentang penyakit mental atau tekanan mental atau manifestasi perilaku dan pengalaman yang mungkin menunjukkan penyakit mental atau gangguan psikologis. (Malik B. Badri, 1989:14) Chaplin juga menyatakan psikopatologi (psychopathology) adalah cabang psikologi yang berkepentingan untuk menyelidiki penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. (J.P. Chaplin, dalam Kartini Kartono, 1999:405) Psikopatologi atau sakit mental adalah sakit yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Istilah psikopatologi mengacu pada sebuah sindroma yang luas, yang meliputi ketidaknormalan kondisi indra, kognisi, dan emosi. (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, 2002)

Sedangkan Alexander Theron (1963:10) mendefinisikan psikopatologi dengan penyakit jiwa atau gangguan jiwa (*mental disorder*) dimana gangguan jiwa terdiri dari ketidakmampuan berfungsinya seseorang sebegitu jauh sehingga ia tak dapat mencapai pemuasan yang cukup memadai terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah dan perasaannya bagi dirinya sendiri dan sebegitu jauh ia tak mampu memenuhi persyaratan-



persyaratan tingkah laku yang dituntut oleh masyarakat dimana ia hidup.

Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakatnya tidak mampu berfungsi baik dalam pemenuhan kebutuhan rohaniyah untuk kehidupan pribadinya sendiri dan juga untuk kebutuhan lingkungannya. Ketidakmampuan inilah yang menjadi sumber pokok dari apa yang disebut gangguan jiwanya.

C. SEJARAH PSIKOPATOLOGI

Perkembangan penanganan gangguan mental berkembang mulai dari zaman kuno (Yuhani) hingga zaman sekarang (modern). Terdapat perbedaan penanganan gangguan abnormalitas jiwa, karena perbedaan paradigma berpikir manusia dari zaman ke zaman (Zainedin Zaidan, "10 Ciri Pria Psikopat", dalam <http://www.psychologymania.com/2011/09/sejarah-psikopatologi-psikologi.html> (19 April 2012)). Mari kita membahas sejarah psikopatologi berikut ini.

1. Demonology Awal

Demonology merupakan suatu doktrin yang menyebutkan bahwa perilaku abnormal seseorang disebabkan oleh pengaruh roh jahat atau kekuatan setan. Masyarakat saat itu meyakini bahwa kekuatan roh atau setan dapat merasuk ke dalam tubuh seseorang dan mengontrol pikiran serta tubuh orang tersebut. Demonology ditemukan dalam budaya Cina, Mesir dan Yunani. Para pemuka agama pada masa itu



melakukan suatu upacara untuk mengeluarkan pengaruh roh jahat dari tubuh seseorang. Mereka menggunakan nyanyian mantra atau siksaan terhadap objek tertentu, bisa binatang atau manusia. Metode tersebut dinamakan *exorcism*

2. Penjelasan fisiologis awal terhadap gangguan mental pada masa Roma dan Yunani Kuno.

Abad 5 SM, Hippocrates (Bapak Kedokteran; penemu ilmu medis modern) memisahkan ilmu medis dari agama, *magic* dan takhyul. Ia menolak keyakinan yang berkembang pada masa Yunani itu bahwa Tuhan (dewa) mengirimkan penyakit fisik dan gangguan mental sebagai bentuk hukuman. Hippocrates menjelaskan tentang pentingnya otak dalam mempengaruhi pikiran, perilaku dan emosi manusia. Menurutnya, otak adalah pusat kesadaran, pusat intelektual dan emosi. Sehingga jika cara berpikir dan perilaku seseorang menyimpang atau terganggu berarti ada suatu masalah pada otaknya (otaknya terganggu).

Selain Hippocrates, ada juga dokter dari Roma yang mencoba memberikan penjelasan naturalistik tentang gangguan psikotik. Mereka adalah Asclepiades dan Galen. Disamping itu, keduanya mendukung perlakuan yang lebih manusiawi dan perawatan di rumah sakit bagi para penderita gangguan mental.

3. Jaman Kegelapan (The Dark Ages) dan kembalinya demonology

Kematian Galen (130 - 200 M), sebagai dokter terakhir pada masa klasik Yunani menandai dimulainya Jaman

Kegelapan bagi dunia medis dan bagi perawatan serta studi tentang perilaku abnormal. Setelah runtuhnya Roma dan Yunani, peradaban manusia mengalami kemunduran. Pada Jaman Pertengahan dan Renaissance (400 - 1500 M), kalangan gereja dan Kristen meluaskan pengaruhnya melalui dunia pendidikan dan misionaris agama menggantikan budaya klasik kala itu. Termasuk dalam hal menangani penderita gangguan mental. Saat itu gangguan mental kembali dihubungkan dengan pengaruh spiritual dan supranatural.

Para pastur menangani penderita gangguan mental dengan berdoa atau menyentuhnya dengan menggunakan benda-benda yang dianggap keramat atau juga memberinya ramuan yang harus diminum pada saat fase bulan mulai mengecil. Sedangkan keluarga penderita percaya dan membawanya ke pastur karena takut dan mempunyai takhyul bahwa penderita terkena pengaruh setan. Penderita gangguan mental dianggap sebagai tukang sihir. Mereka dianggap bersekutu dengan setan dan menentang Tuhan.

Sampai akhir Jaman Pertengahan, semua penderita gangguan mental dianggap sebagai tukang sihir. Dalam pengakuannya beberapa dari mereka mengaku mempunyai hubungan dengan setan, melakukan hubungan seksual dan sering berkumpul dengan kelompok roh atau setan. Hal itu dalam pandangan abnormal diinterpretasi mungkin para tukang sihir tersebut mengalami halusinasi atau delusi dan beberapa dari mereka didiagnosis mempunyai gangguan psikosis.



4. Pembangunan Asylums selama Renaissance (Jaman Pencerahan)

Pada abad 15 dan 16, di Eropa mulai dilakukan pemisahan dengan serius antara penderita gangguan mental dari kehidupan sosialnya. Disana dibangun suatu tempat penampungan yang disebut *Asylums*. Di asylums itu ditampung dan dirawat penderita gangguan mental dan para gelandangan. Mereka dibiarkan untuk tetap bekerja dan tidak diberi suatu aturan hidup yang jelas.

5. Gerakan Reformasi : the insane as sick

Konsep baru tentang gangguan dan penyakit mental muncul dalam Revolusi Amerika dan Perancis sebagai bagian dari proses pencerahan (renaisans) bidang rasionalisme, humanisme dan demokrasi politik. Orang gila (*insane*) kemudian dianggap sebagai orang sakit. Tokoh di Eropa kemudian ikut menyuarakan hal itu. Misalnya Chiarugi di Italia dan Muller di Jerman menyuarakan tentang *treatment* rumah sakit yang lebih humanis. Tetapi perwujudan konsep baru dalam bidang ini dipelopori oleh Phillipe Pinel (1745 - 1826).

Pinel kemudian memulai pekerjaannya dari *asylums* di Paris yang bernama La Bicetre. Pinel merupakan figur yang memelopori gerakan *treatment* yang lebih humanis (manusiawi) terhadap penderita gangguan mental. Ia membebaskan pasien di La Bicetre dari ikatan rantai dan pasung kemudian memperlakukannya sebagai seorang yang sakit dan tidak diperlakukan seperti seekor hewan sebagaimana dilakukan di La Bicetre.



D. MACAM-MACAM PSIKOPATOLOGI

Menurut Atkinson terdapat enam criteria untuk menentukan kesehatan mental seseorang, yaitu : pertama, adanya persepsi yang realistic dan efisien dalam mereaksi atau mengevaluasi apa yang terjadi di dunia sekitarnya; kedua, mengenali diri sendiri, baik berkaitan dengan kesadaran atau motifnya; ketiga, kemampuan untuk mengendalikan perilaku secara sadar, seperti menahan perilaku impulsif dan agresif; keempat, memiliki harga diri dan dirinya dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya; kelima, kemampuan untuk membentuk ikatan kasih, seperti tidak menuntut berlebihan pada orang lain dan dapat memuaskan orang lain bukan hanya memuaskan diri sendiri; keenam, ada jiwa yang antusias yang mendorong seseorang untuk mencapai produktivitas. (Rita L. Atkinson, dkk, tt: 404-406)

Asumsi di atas dikenal dengan asumsi yang optimistic dan mengakui kekuatan jiwa manusia, namun sifatnya antroposentris yang hanya memfokuskan pada kekuatan manusia, tanpa mengkaitkan teorinya pada kehendak mutlak Tuhan. Dalam Islam meskipun menggunakan kerangka asumsi yang ketiga dalam membangun teori psikopatologi, namun Islam tidak melepaskan diri dari paradigma teosentris. Hakikat jiwa manusia bukan hanya sehat dan sadar, melainkan juga terbebas dari dosa asal, dosa waris, dan bertanggung jawab atas penebusannya. Sebagai Dzat yang baik dan suci, Tuhan tidak memberikan jiwa manusia kecuali jiwa yang memiliki kecenderungan sehat, baik dan suci.



Kesehatan jiwa manusia tidak sekedar alami dan fitri, melainkan telah diatur sedemikian rupa oleh sang Khaliq. Dari kerangka ini, kriteria neurosis dan psikosis dalam psikopatologi Islam bukan hanya disebabkan oleh gangguan saraf atau gangguan kejiwaan alamiah melainkan juga penyelewengan terhadap aturan-aturan Tuhan. Oleh karena itu, teori psikopatologi Islam di samping mendasarkan teorinya pada teori-teori psikologi barat, juga banyak memfokuskan diri pada perilaku spiritual dan religius.

Mujib (2002) membagi psikopatologi dalam dua katagori pokok, *pertama*, bersifat *duniawi*. Macam-macam psikopatologi dalam kategori ini berupa gejala-gejala atau penyakit kejiwaan yang telah dirumuskan dalam psikologi kontemporer; *kedua*, bersifat *ukhrawi*, berupa penyakit akibat penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai moral, spiritual dan agama. Maka berdasar pembagian katagori ini kita akan melihat psikopatologi dalam dua perspektif yakni aspek pengetahuan dan aspek agama.

1. Psikopatologi yang bersifat duniawi

Jenis-jenis penyakit kejiwaan (*mental disorders* atau *mental illness*) menurut penyelidikan Freud (Sigmund Freud, 1952: 217-153) dipandang bersumber pada lapisan jiwa tak sadar (Das Es) yang disebut "*kompleks terdesak*". Kompleks adalah nafsu atau emosi yang berlebih-lebihan untuk memperoleh atau menghindari objek. Kompleks terdesak atau tertekan berarti segala aspek nafsu/keinginan atau perasaan yang ditekan terus-



menerus oleh kesadaran Aku (*Das Ueber Ich*), karena pemunculannya dianggap tidak sesuai dengan norma-norma hidup baik kultural, agama ataupun norma sosial, sehingga nafsu/emosi yang demikian tidak diberi kesempatan muncul ke ruang sadar manusia.

Akan tetapi kompleks terdesak tersebut meskipun dihambat dan ditekan oleh kesadaran "*Akunya*" pada waktu-waktu tertentu dapat muncul tanpa disadari dalam bentuk tingkah laku yang berbagai macam yaitu:

- a. Perbuatan yang salah tanpa disadari, misalnya salah tulis, salah baca, salah ucap, salah letak, salah mengerjakan tugas. Kesemuanya itu merupakan bentuk pemunculan nafsu/emosi tertekan yang makin bertumpuk dalam jiwa tak sadar manusia yang mengandung latar belakang peristiwa masa lalu.
- b. Mimpi juga mempunyai arti khusus bagi manusia yang memiliki kompleks terdesak. Menurut Freud mimpi merupakan gambar/symbol dari keinginan yang terpendam dan tak terpenuhi, dan dengan melalui analisa mimpi orang dapat menemukan problema hidup orang lain: misalnya orang yang sangat menginginkan mempersunting gadis rupawan dari kalangan tinggi, padahal ia sendiri tergolong orang yang tidak sederajat/sekufu dengan status sosial-ekonomi keluarga gadis tersebut, maka nafsu keinginan tersebut mengendap ke dalam ruang lapisan jiwa tak sadar, masuk ke dalam kompleks terdesak yang muncul dan menyatakan diri dalam bentuk impian-impian di waktu tidur. Bentuk



impiannya bisa perkawinan dengan gadis idamannya dengan upacara yang sangat indah atau pertemuan romantis di tempat yang indah.

- c. Penyakit syaraf, dimana masing-masing orang berbeda-beda intensitasnya, tergantung pada ketahanan dan keseimbangan mekanisme sistem syarafnya dalam menanggapi nafsu/ keinginan atau emosi yang bergejolak dalam dirinya. Makin lemah sistem syaraf seseorang, makin mudah memperoleh *chance* terhadap penyakit syaraf. Sedangkan sistem syaraf tersebut merupakan hal yang *native* (pembawaan).

Penyakit syaraf tersebut disebut *Psychosis* bilamana telah menjurus pada penyakit jiwa yang berat, sedangkan bila masih dalam taraf yang ringan disebut *Psyconeurosis* atau *Neorosis*.

Yang tergolong *psychosis* (penyakit jiwa berat) diantaranya: (Carl Gustav Jung, 1963: 34)

- 1) *Schizophrenia* adalah penyakit jiwa yang diderita oleh orang yang terpecah kepribadiannya. Orang yang menderita penyakit ini seolah-olah mati jiwanya; tidak mampu menanggapi segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar; dirinya terpisah dari dunia nyata. Hidup jiwanya kosong dari norma-norma sosial dan kebudayaan. Menurut Kretchmer (H.M. Arifin, 1999) gejala *schizophrenia* bisa juga terdapat pada orang normal meskipun gejalanya tampak samar dan akan tampak lebih jelas pada orang yang abnormal. Bagi orang normal gejala *schizophrenia* disamakan dengan



temperament schizothyme. Adapun tanda-tanda orang bertemperament schizothyme tersebut ialah tidak suka bergaul; suka melamun dan dirinya penuh rahasia; selalu merasa tidak puas dengan keadaan dirinya; keras dan fanatik; selalu timbul perasaan konflik dengan keadaan sekitar dan sebagainya. Misalnya: Hitler, Calvijn, Stalin, Mao Tche Tung, Benitto Mussolini dan sebagainya. Arti kata schizothyme adalah jiwa yang terpecah.

- 2) *Manis-dipressif* adalah orang yang jiwanya tidak stabil, kadang-kadang aktif dan kadang-kadang pasif. (depressif: tertekan). Bagi orang yang sehat disamakan dengan *cyclothyme* (jiwa yang utuh). *Cyclothyme* menampilkan gejala antara lain, dapat bergaul dengan rapat, berwatak gembira, terbuka hati kepada orang lain, mudah menyesuaikan diri dan suka berterus terang, tidak suka menyimpan rahasia, banyak ilmu tapi tidak mendalam dan sebagainya. Barangkali dapat disamakan dengan tipe orang yang extravert menurut C.G. Jung. Contoh orang yang demikian adalah Martin Luther, para organisator ulung, para realist dan sebagainya.
- 3) *Paranoid*, yaitu penyakit jiwa yang menampilkan gejalanya antara lain merasa bahwa semua yang berada di lingkungan sekitarnya seolah-olah memusuhi dirinya.

Adapun macam-macam neurosis (penyakit jiwa ringan) yang dapat diterangkan sebagai berikut: (H.M. Arifin, 1999)



- 1) *Psychasthenia* yaitu suatu gangguan jiwa dimana gejala-gejalanya antara lain energinya lenyap meskipun kadang-kadang kekuatan jasmaniyahnya besar. Bentuk penyakit ini muncul dalam berbagai macam, yakni:
 - a) Phobia; yaitu takut berbuat sesuatu tanpa alasan, misalnya: *claustrophobia* (takut ke kamar kecil), *achlophobia* (takut berada di keramaian), *acrophobia* (takut di tempat tinggi).
 - b) Tak dapat mengontrol diri, misalnya: *pyromania* (terus menerus membakar sesuatu), *dipsomania* (terus menerus minum), *obsessi* (terus menerus terpaku memikirkan sesuatu objek), *abulia* (tak mampu melakukan pemilihan) dan sebagainya.
 - c) Histeria, yaitu hilang tenaga dan semangat, misalnya: *amnesia* (ingatan hilang), *anaesthesia* (hilang perasaan), *algesia* (perasaan berlebihan), *anorexia* (lenyap nafsu makan), *tremors* (gemeteran), *tics* (gerakan badaniyah yang otomatis tak dapat dikendalikan), dan sebagainya.
- 2) *Neurasthenia*, adalah penyakit syaraf yang tergolong masih dalam stadium permulaan, sehingga masih mungkin disembuhkan melalui counseling therapis. Jenis penyakit ini menampakkan gejala-gejala antara lain tenaga berkurang dan menjelma dalam bentuk gangguan jiwa yang disebut *insomania* (susah tidur), kehilangan inisiatif, menjadi pemalas, mudah tersinggung perasaannya, merasa lelah terus-menerus,



tidak dapat mengkonsentrasikan daya pikirnya, kecerdasannya makin mengurang, dan sebagainya.

Menurut Freud, sumber penyakit jiwa tersebut adalah terletak pada dorongan nafsu atau *motive libido* (nafsu birahi) yang ditekan ke bawah sadar.

2. *Psikopatologi yang bersifat ukhrawi*

Yang dimaksud dengan psikopatologi yang bersifat ukhrawi dalam konteks ini adalah psikopatologi (gangguan mental) yang disebabkan oleh faktor-faktor spiritual dan agama. (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, 2002) Misalnya kecemasan dan keresahan yang terus menerus akibat perbuatan dosa dan maksiat, seperti keresahan orang-orang yang melahirkan anak dari hasil perzinahan. Psikopatologi yang merusak sistem kehidupan spiritualitas dan keagamaan seseorang oleh Al-Ghazali disebut dengan *al-akhlaq al-khabitsah*. Dalam *Ihya' Ulumuddin* ia berkata: "*Akhlak yang buruk merupakan penyakit hati dan penyakit jiwa*" (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, 1991:53)

Ar-Razi juga menyatakan dalam *al-Thibb al-Ruhaniyah* (Abu Bakar Muhammad ibn Zakariya al-Razi, terjemah: Nasrullah & Dedi M Hilman, 1995:13) salah satu bentuk psikopatologi adalah perilaku (akhlak) tercela sedangkan psikoterapinya adalah perilaku yang terpuji. Akhlak tercela dianggap sebagai psikopatologi, sebab hal itu mengakibatkan dosa (*al-itsm*) baik dosa vertikal maupun dosa horizontal atau sosial. Dosa adalah kondisi emosi seseorang yang dirasa tidak tenang setelah ia



melakukan suatu perbuatan (baik perbuatan lahiriah atau batiniah) dan merasa tidak enak jika perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Perbuatan dosa biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sebab jika diketahui oleh orang lain maka dapat menurunkan harga dirinya. Karena itu tidak mengherankan apabila pelaku dosa hidupnya selalu sedih, resah, bimbang, gelisah dan dihantui oleh perbuatan dosanya. Emosi negatif ini apabila terus menerus dialami oleh individu maka acapkali mendatangkan psikopatologi. Sabda Rasulullah saw. : *“Dosa adalah apa yang dapat membimbangkan hatimu dan engkau merasa benci apabila perbuatan itu diketahui oleh orang lain”*. (HR. Muslim dan Ahmad)

Pada dasarnya psikopatologi (gangguan kepribadian) dalam Islam banyak sekali tokoh yang mencoba mengklasifikasikannya. Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah, jenis psikopatologi dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, gangguan kepribadian yang berhubungan dengan akidah atau dengan Tuhan, seperti menyekutukan Allah (syirik), mengingkari, berbuat dosa, bermuka dua, pamer, dan menuruti bisikan syetan. Kedua, gangguan kepribadian yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti iri hati, dengki, buruk sangka, marah, benci, penakut, pelit, menipu, mengolok-olok, menyakiti, memfitnah, menceritakan keburukan orang lain, rakus, adu domba, putus asa, menganiaya, boros dan materialism. Ketiga, gangguan kepribadian yang berkaitan dengan pemanfaatan alam semesta sebagai



realisasi tugas-tugas kekhilafan seperti membuat kerusakan.

Maka berdasarkan hal tersebut, Mujib membagi psikopatologi (gangguan mental) yang disebabkan oleh faktor-faktor spiritual dan agama menjadi enambelas bentuk, yaitu sebagai berikut: (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, 2002)

- 1) *Syirik*; secara psikopatologis adalah kepercayaan, sikap dan perilaku mendua terhadap masalah yang fundamental dalam kehidupan manusia. Gejalanya penderita meyakini Allah sebagai tuhannya tapi amal perbuatannya diorientasikan bukan untuk-Nya melainkan untuk sesuatu yang sifatnya temporer dan nisbi seperti kepada roh halus. Penyakit syirik yang menyerang orang mukmin tergolong psikopatologi sebab pelakunya tidak mampu mengintegrasikan kepribadiannya dengan baik. Seseorang yang menghambakan diri pada sesuatu selain Allah berarti ia menerima perbudakan, membelenggu diri dan mengekang kebebasannya. Perilaku syirik ada yang teraktual dalam bentuk ucapan, pikiran dan perbuatan. Hampir semua bentuk psikopatologis dalam perspektif Islam bermuara pada syirik karena ia menjadi sumber penganiayaan (*zhulm*) diri yang berat (QS. Lukman: 13), sumber rasa takut (QS. Ali Imran: 151), sumber dari segala kesesatan dan dosa yang tak terampuni, padahal dosa merupakan sumber konflik batin (QS. An-Nisa': 48, 116) tidak memiliki penolong dalam menyelesaikan sesuatu



(QS. Al-Maidah: 72), seburuk-buruk makhluk (QS. Al-Bayyinah: 6), dimurkai dan dikutuk Tuhan (QS. Al-Fath: 6) semua aktifitas baiknya tidak dianggap (QS. Az-Zumar: 65).

- 2) **Kufur**; mengingkari terhadap sesuatu yang sebenarnya. Apabila menjangkiti orang mukmin, seperti kufur nikmat, maka tergolong psikopatologi sebab pelakunya tidak tahu diri, tidak sadar diri, dan tidak tahu berterimakasih.
- 3) **Bermuka dua (nifaq)**. Nifaq adalah menampakkan sesuatu yang dipandang baik oleh orang lain, padahal di dalam hatinya tersembunyi keburukan, kebusukan dan kebobrokan. Apa yang ditampakkan tidak sama dengan qalburnya. Nifaq merupakan karakter orang munafik yang tergolong psikopatologi. Penderitanya tidak mampu menghadapi kenyataan yang sebenarnya, sehingga dia berdusta jika berbicara, ingkar jika berjanji dan khianat bila dipercaya.
- 4) **Riya'**; yaitu melakukan suatu perbuatan karena pamrih, pamer atau cari muka pada orang lain. Seseorang yang melakukan riya' berarti tidak mampu merealisasikan dirinya dengan baik. Riya' termasuk psikopatologis karena pelakunya berbuat sesuatu hanya untuk mencari muka tanpa memperhitungkan produktifitas dan kualitas amaliahnya. Secara spiritual juga disebut penyakit sebab pelakunya telah menyalahi perjanjian ketuhanan di alam arwah, untuk beribadah kepada-Nya.



- 5) *Marah*; gadab (marah) menunjukkan tingkat kelabilan kejiwaan seseorang karena ia tidak mampu mengendalikan amarahnya. Yang dimaksud di sini adalah ketika kemarahan berkobar tak terkendali maka kesadaran nurani terhalangi yang kemudian mendatangkan sakit hati yang berat.
- 6) *Lupa* (gaflah atau nisyar); yang dimaksud di sini adalah kelupaan yang disengaja terhadap suatu keyakinan, nilai-nilai hidup yang mendasar dan pandangan hidupnya yang mengakibatkan segala tindakannya menjadi tidak teratur, merugikan dan dapat menjerumuskan ke dalam kehancuran. Seperti: lupa mengingat Allah karena dirinya dikuasai setan, melupakan ayat-ayat Allah setelah dirinya beriman dan lupa karena mengikuti hawa nafsu.
- 7) *Waswas* (mengikuti bisikan setan) waswas merupakan bisikan halus dari setan yang mengajak seseorang untuk berbuat maksiat dan dosa yang dapat merusak citra diri dan harga dirinya. Mengikuti waswas sama artinya dengan melanggar fitrah asli manusia yang suci dan baik, sebab waswas berorientasi pada fitrah asal setan yang sesat. Karena itu mengikuti bisikan setan tergolong psikopatologi bagi manusia.
- 8) *Putus asa* atau putus harapan; hilangnya gairah, semangat, sinergi dan motivasi hidup setelah seseorang tidak berhasil menggapai sesuatu. Putus asa dianggap psikopatologi karena ia menafikan



potensi hakiki manusiawi, tidak percaya takdir Allah dan putus asa terhadap rahmat dan karunia-Nya.

- 9) **Rakus** (thama'); rakus adalah penyakit jiwa yang selalu merasa kurang terhadap apa yang dimiliki meskipun apa yang dimiliki lebih dari cukup. Orang rakus dikatakan berpenyakit karena tak menguasai diri, bahkan kebebasan hidup karena dikendalikan hawa nafsunya.
- 10) **Ghurur** (tertipu); percaya atau meyakini sesuatu yang tidak hakiki dan tidak substantif. Ghurur berjangkit pada jiwa manusia antara lain disebabkan oleh keingkaran kepada pertolongan Allah yang Maha Pemurah dan tipu daya kesenangan dunia yang sementara padahal kesenangan yang hakiki hanya milik Allah di akhirat kelak.
- 11) **Membanggakan diri** (ujub) dan sombong (takabbur). Sombong dianggap penyakit sebab pelakunya tak menyadari akan kekurangannya dan memaksa diri memaksa harga diri yang tinggi. Hidupnya tak akan tenang karena ia tak akan rela orang lain memiliki kelebihan, sedang ia sendiri tak berusaha meningkatkan kualitas dirinya.
- 12) **Iri hati dan dengki**; termasuk penyakit mental yang berat sebab pelakunya senantiasa menanggung beban psikologis yang kompleks seperti kebencian, amarah, buruk sangka, pelit dan menghinakan orang lain serta sempit dalam berpikir dan bertindak sehingga ia sulit mengaktualisasikan potensi positifnya dan akan terisolir dari lingkungannya.



- 13) *Menceritakan keburukan orang lain* (ghibah) dan mengadu domba (namimah); ghibah dianggap sebagai penyakit sebab penderitanya tidak sanggup mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Ia sibuk menyebut keburukan orang lain, padahal dirinya memiliki keburukan yang tak jauh beda dengannya, bahkan mungkin lebih buruk lagi.
- 14) *Cinta dunia*, pelit dan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan harta. Cinta dunia maksudnya menjadikan dunia dan isinya sebagai tujuan akhir hidup dan bukan sebagai sarana hidup. Cinta semacam itu tergolong psikopatologi sebab penderitanya tidak sadar akan tujuan hidup yang hakiki. Ciri-ciri penyakit ini adalah penderitanya memiliki sikap dan perilaku materialisme, hedonisme dan egoisme.
- 15) *Memiliki keinginan yang tak mungkin terjadi* (tamanni); dianggap psikopatologi sebab penderitanya tenggelam dalam dunia khayalan yang tidak realistik. Ia berkeinginan besar memiliki sesuatu namun tidak dibarengi dengan aktifitas nyata sehingga hidupnya tidak kreatif & produktif. Akibat dari gejala tamanni ini maka penderitanya tak segan-segan mengambil jalan pintas, seperti: memperdalam angan-angannya dengan mengkonsumsi zat adiktif, mencuri, merampok dan korupsi.
- 16) *Picik dan penakut* (*al-jubn*). Picik atau penakut adalah sikap atau perilaku yang tidak berani menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Ciri-ciri penderitanya



ialah, apabila ia dihadapkan pada suatu masalah, maka ia berpikir dampak negatifnya terlebih dahulu, tanpa sedikitpun mempertimbangkan tingkat kemaslahatannya. Karenanya ia tidak berani bertindak yang seharusnya ia lakukan. Kepicikan seseorang biasanya disebabkan oleh keimanan yang lemah, seperti sikap orang-orang munafik yang tak berani berperang di jalan Allah karena takut mati, tidak mengeluarkan zakat karena takut miskin dan sebagainya.

E. IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN

Dengan memperhatikan tentang gejala penyakit kejiwaan sebagaimana telah dibahas di muka, yang mungkin saja menimpa anak didik kita, maka kita sebagai pendidik harus mengantisipasinya dengan langkah-langkah berikut:

1. Memperhatikan dengan seksama kelainan-kelainan yang diderita anak didik baik di dalam kelas, saat bergaul dan saat merespons setiap tugas-tugas yang diberikan.
2. Mengidentifikasi segenap kelainan-kelainan yang ada
3. Mengadakan pendekatan pada penderita, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencurahkan segenap keluhan dengan bebas agar kita bisa mengungkap masalah yang dialaminya dengan tepat.
4. Berusaha memberikan sugesti, motivasi dan bimbingan yang dapat meneguhkan keimanan dan



- keyakinannya kepada Allah dengan nilai-nilai agama; bahwa masalah dan problema hidup yang diderita bukanlah masalah serius dan dapat diatasi.
5. Tunjukkan kepada penderita sumber apa yang menjadi masalahnya, bagaimana hubungan satu problema dengan problema yang lain yang merupakan rangkaian sebab akibat, dan tunjukkanlah pemecahan praktis terhadap problema itu.
 6. Bilamana benar-benar diyakini bahwa gangguan mental padanya tidak mungkin dapat disembuhkan dengan segala bimbingan konseling yang ada, maka segeralah penderita dianjurkan untuk berkonsultasi dengan psikiater (dokter jiwa) agar mendapat tindakan yang tepat.
 7. Jalin kerjasama dengan orangtua anak didik, agar mereka juga menaruh perhatian dan dapat memberi perlakuan yang tepat dan positif demi kesuksesan pendidikan anak-anaknya,

F. KESIMPULAN

Dari pembahasan psikopatologi di atas, maka pada akhirnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Psikopatologi adalah istilah yang mengacu pada baik studi tentang penyakit mental atau tekanan mental atau manifestasi perilaku dan pengalaman yang mungkin menunjukkan penyakit mental atau gangguan psikologis.
2. Dalam sejarah perkembangannya psikopatologi sebagai sebuah studi tentang penyakit mental

mengalami beberapa fase perkembangan; dari fase awal yang cenderung bersifat primitif dan bercampur dengan keyakinan mistik dan takhayul sampai ke tahap pengetahuan yang bersifat sistematis dan modern.

3. Secara garis besar, psikopatologi dapat dibagi ke dalam dua katagori: *pertama*, psikopatologi yang bersifat *duniawi* dengan menggunakan pendekatan yang telah dirumuskan psikopatologi kontemporer yang memandang bahwa penyebab segala penyakit jiwa adalah dorongan nafsu atau *motive libido* (nafsu birahi) yang ditekan ke bawah sadar; dan *kedua*, psikopatologi yang bersifat *ukhrawi* dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai moral spiritual dan agama dimana psikopatologi ukhrawi memandang bahwa penyebab segala penyakit jiwa adalah dosa.
4. Bahwa pengetahuan psikopatologi yang mendalam dapat menjadi bekal yang positif bagi kita sebagai pendidik dan orangtua untuk mendukung kesuksesan pendidikan yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Tauhid*, terj. Rahmami Astuti, Bandung : Pustaka,1988
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991
- Al-Razi, Abu Bakar Muhammad ibn Zakariya, *Pengobatan Rohani* terjemah Nasrullah & Dedi Muh. Hilman, judul asli "*al-Thibb al-Ruhaniyah*", Bandung: Mizan, 1995
- Arifin , H.M., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Di Sekolah dan Di Luar Sekolah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Atkinson, Rita L. dkk.,*Pengantar Psikologi*, terj. Widjaja Kusuma, judul asli "*Introduction to Psychology*", Batam : Interaksara, tt.
- Badri, Malik B., *Dilema Psikolog Muslim*, Jakarta: Gune Aksara, 1989
- Chaplin, J.P., *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, judul asli "*Dictionary of Psychology*", Jakarta:Rajawali Pers,1999
- adang Gusyana & Irna Safira Inayah, "Ciri-ciri Seorang Psikopat", dalam <http://unic77.info/ciri-ciri-seorang-psikopat.html> (11 Juni 2012)
- Freud, Sigmund, *A General Introduction to Psychoanalysis*, New York: Garden City Book, 1952
- Jung, Carl Gustav, *Modern man in Search of a Soul*, New York: Harcourt Brace & World Inc., 1963
- Majalah Gatra, *Orang Gila Tanpa Gangguan Mental*, dalam Laporan Utama (Edisi Februari 2006)

- , *Bagaimana Menghadapi Psikopat* (Edisi Februari 2006)
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Theron, Alexander, *Psychotherapy in Our Society*, New Jersey: Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 1963
- , *10 Ciri Pria Psikopat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Zainedin Zaidan, "10 Ciri Pria Psikopat", dalam <http://www.psychologymania.com/2011/09/s-ejarah-psikopatologi-psikologi.html> (19 April 2012)
- Sarnoto, Ahmad Zain, *Mengenal Psikologi Islam, suatu pengantar*, Pustaka Faza Amanah, Bekasi, 2012





Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam

Pendidikan Islam pada awal perkembangannya telah memiliki keunggulan karena coraknya yang tersediri yaitu bersifat komprehensif dengan maksud agar anak didik didorong sehingga mampu untuk menuangkan segala kemampuan

yang dimilikinya. Tujuan dalam pendidikan Islam terdiri dari tujuan keagamaan dan tujuan keduniaan. Kebijakan baru untuk tujuan keduniaan telah dinampakkan dari upaya menonjolkan keterampilan bekerja dalam rangka pendidikan seumur hidup. Kedua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila sistem pendidikan yang berjalan efektif dan sebanding. Investasi sumber daya manusia melalui pendidikan, salah satunya adalah mutu pendidik. Perubahan dalam era glocalisasi dewasa ini nampaknya memerlukan respon proaktif dan antisipatif dari dunia pendidikan terutama dalam pendidikan islam. Pendidik sebagai kunci terlaksananya perubahan perlu mempertimbangkan kondisi tersebut untuk dijadikan dorongan dalam meningkatkan kualitas kinerja melalui perbaikan secara terus-menerus.

Dalam manajemen pendidikan salah satu bidang penting adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu Pendidik seperti guru maupun tenaga kependidikan seperti tenaga administratif. Intensitas dunia pendidikan berhubungan dengan manusia dapat dipandang sebagai suatu perbedaan penting antara lembaga pendidikan/organisasi sekolah dengan organisasi lainnya.

Kata Kunci : SDM dan Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Dalam era global keunggulan suatu bangsa tidak dapat lagi mengandalkan pada sumber daya alam, melainkan harus pada sumber daya manusia, kualitas



SDM menempati kedudukan lebih penting dibanding dengan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan organisasi, maka kehidupan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat dalam berbagai terpaan perubahan dan persaingan.

Pendidikan dalam Islam merupakan pokok utama dalam kelanjutan ketahuidan dan keimanan terhadap ajarannya. Perkembangan pendidikan Islam sejalan dengan berkembangnya Islam itu sendiri, bahkan pendidikan Islam sebenarnya telah dimulai sejak zaman nabi-nabi terdahulu dan disempurnakan oleh nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah. Proses transformasi ilmu secara bilateral telah terjadi setelah perang Badar yaitu dengan pengajaran membaca dan menulis kepada umat Islam sebanyak sepuluh orang oleh tiap tawanan perang pihak musuh. Dasar ajaran Islam sendiri merupakan perintah untuk membaca sebagaimana bunyi ayat pertama yang diturunkan.

Pendidikan Islam pada awal perkembangannya telah memiliki keunggulan karena coraknya yang tersediri yaitu bersifat komprehensif dengan maksud agar anak didik didorong sehingga mampu untuk menuangkan segala kemampuan yang dimilikinya. Tujuan dalam pendidikan Islam terdiri dari tujuan keagamaan dan tujuan keduniaan. Kebijakan baru untuk tujuan keduniaan telah dinampakkan dari upaya menonjolkan keterampilan bekerja dalam rangka pendidikan seumur hidup. Kedua



tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila sistem pendidikan yang berjalan efektif dan sebanding.

Untuk tujuan tersebut sebenarnya telah diupayakan pendidikan Islam yang memadukan kurikulum umum dan agama seperti yang berlangsung saat ini di tingkat Madrasah Aliyah. Tuntutan masyarakat terhadap madrasah ini dapat dikatakan memadai, artinya jika dijalankan secara efektif maka anak didik di Madrasah Aliyah tersebut dapat bersaing ataupun berkemampuan sama dalam mata pelajaran umum dengan keunggulan pelajaran agama yang memadai. Namun fenomena yang terjadi di tingkat perguruan tinggi, kemampuan atas pengetahuan umum (keduniaan) dan keagamaan ini tidak disahuti secara bijaksana. Hal ini dapat dilihat tidak adanya institusi pendidikan tinggi Islam yang memfasilitasi pendidikan yang mengintegrasikan kedua bidang tersebut. Akhirnya Madrasah Aliyah hanya menghasilkan sumber daya manusia yang di tingkat tinggi dimanfaatkan untuk kembali pada tujuan keduniaan semata, hal ini dapat dimaklumi karena di jenjang yang lebih tinggi tidak diperoleh pendidikan agama yang memadai ataupun integrasi ilmu umum dan agama yang mumpuni.

Dalam manajemen pendidikan salah satu bidang penting adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu Pendidik seperti guru maupun tenaga kependidikan seperti tenaga administratif. Intensitas dunia pendidikan berhubungan dengan manusia dapat dipandang sebagai suatu



perbedaan penting antara lembaga pendidikan/organisasi sekolah dengan organisasi lainnya

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas melakukan pembimbingan dan pelatihan. Dalam konteks sistem bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pendidikan nasional tersebut, seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

PEMBAHASAN

1. Sumber Daya Manusia Dalam Islam

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka menjadi khalifah dimuka bumi, hal ini banyak dicantumkan dalam al-Qur'an dengan maksud agar manusia dengan kekuatan yang dimilikinya mampu membangun dan memakmurkan bumi serta melestarikannya. Untuk mencapai derajat khalifah di muka bumi ini diperlukan proses yang panjang, dalam Islam upaya tersebut ditandai dengan pendidikan yang dimulai sejak buaian sampai ke liang lahat.

Menurut Hadawi Nawawi (1994) Sumber daya manusia (SDM) adalah daya yang bersumber dari manusia, yang berbentuk tenaga atau kekuatan (energi atau power). Sumber daya manusia mempunyai dua ciri, yaitu : (1) Ciri-ciri pribadi berupa pengetahuan, perasaan dan keterampilan (2) Ciri-ciri interpersonal yaitu



hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Sementara Emil Salim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan SDM adalah kekuatan daya pikir atau daya cipta manusia yang tersimpan dan tidak dapat diketahui dengan pasti kapasitasnya. Beliau juga menambahkan bahwa SDM dapat diartikan sebagai nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Dengan demikian kualitas SDM ditentukan oleh sikap mental manusia (Djaafar, 2001 : 2).

T. Zahara Djaafar (2001 : 1) menyatakan bahwa bila kualitas SDM tinggi, yaitu menguasai ilmu dan teknologi dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan merasa bahwa manusia mempunyai hubungan fungsional dengan sistem sosial, nampaknya pembangunan dapat terlaksana dengan baik seperti yang telah negara-negara maju, dalam pembangunan bangsa dan telah berorientasi ke masa depan. Tidak jarang di antara negara-negara maju yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan bangsanya adalah bangsa yang pada mulanya miskin namun memiliki SDM yang berkualitas.

Dalam Islam sosok manusia terdiri dua potensi yang harus dibangun, yaitu lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan kedua potensi ini. Jika dilihat dari tujuan pembangunan manusia Indonesia yaitu menjadikan



manusia seutuhnya, maka tujuan tersebut harus memperhatikan kedua potensi yang ada pada manusia. Namun upaya kearah penyeimbangan pembangunan kedua potensi tersebut selama 32 tahun masa orde baru hanya dalam bentuk konsep saja tanpa upaya aplikasi yang sebenarnya. Telah dimaklumi bahwa pendidikan Islam memandang tinggi masalah SDM ini khususnya yang berkaitan dengan akhlak (sikap, pribadi, etika dan moral).

Kualitas SDM menyangkut banyak aspek, yaitu aspek sikap mental, perilaku, aspek kemampuan, aspek intelegensi, aspek agama, aspek hukum, aspek kesehatan dan sebagainya (Djaafar, 2001 : 2). Kesemua aspek ini merupakan dua potensi yang masing-masing dimiliki oleh tiap individu, yaitu jasmaniah dan ruhaniah. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek jasmaniah selalu ditentukan oleh ruhaniah yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia. Untuk mencapai SDM berkualitas, usaha yang paling utama sebenarnya adalah memperbaiki potensi dari dalam manusia itu sendiri, hal ini dapat diambil contoh seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh aspek ruhaniah ini. Dalam hal ini pendidikan Islam memiliki peran utama untuk mewujudkannya.

Tantangan manusia pada millennium ke-3 ini akan terfokus pada berbagai aspek kompleks. Khusus dibidang pendidikan Aly dan Munzier (2001 : 227) menyebutkan bahwa tantangan pendidikan Islam terbagi atas 2, yaitu *tantangan dari luar*, yaitu berupa pertentangan



dengan kebudayaan Barat abad ke-20 dan dari dalam Islam itu sendiri, berupa kejumudan produktivitas keislaman.

Abdul Rachman Shaleh (2000 : 203) menyatakan bahwa untuk menjawab tantangan dan menghadapi tuntutan pembangunan pada era globalisasi diisyaratkan dan diperlukan kesiapan dan lahirnya masyarakat modern Indonesia. Aspek yang spektakuler dalam masyarakat modern adalah penggantian teknik produksi dari cara tradisional ke cara modern yang ditampung dalam pengertian revolusi industri. Secara keliru sering dikira bahwa modernisasi hanyalah aspek industri dan teknologi saja. Padahal secara umum dapat dikatakan bahwa modernisasi masyarakat adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas dan semua aspek hidup masyarakat.

Dalam upaya pembangunan masyarakat, tidak ada suatu masyarakat yang bisa ditiru begitu saja, tanpa nilai atau bebas nilai. Hal ini telah terlihat dengan peniruan dan pengambilan pola kehidupan sosialis, materialistis yang ditiru masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu pembangunan di bidang agama. A. R. Saleh (2000 : 205) menyatakan bahwa pembangunan di bidang agama diarahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang harmonis, semarak dan mendalam, serta ditujukan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, terciptanya kemantapan kerukunan beragama, bermasyarakat dan berkualitas dalam meningkatkan kesadaran dan peran serta akan tanggung



jawab terhadap perkembangan akhlak serta untuk secara bersama-sama memperkuat kesadaran spiritual, moral dan etik bangsa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana kehidupan beragama

Masyarakat yang sedang membangun adalah masyarakat yang sedang berubah dan terkadang perubahan tersebut sangat mendasar dan mengejutkan. Masyarakat yang sedang dibangun berarti masyarakat terbuka, yang memberi peluang untuk masuknya modal, ilmu dan teknologi serta nilai dan moral asing yang terkadang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk itu peran agama diharapkan dapat berfungsi sebagai pengarah dan pengamanan pembangunan nasional. Dalam masyarakat yang sedang berubah ini terdapat objek paling rawan yaitu generasi muda, untuk itu prioritas perhatian pada generasi muda ini perlu ditingkatkan demi keberhasilan pembangunan.

Peningkatan kualitas manusia hanya dapat dilakukan dengan perbaikan pendidikan. A. R. Saleh (2000 : 205) menyatakan ada beberapa ciri masyarakat atau manusia yang berkualitas, yaitu :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia dan berkepribadian
- b. Berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab
- c. Mandiri, cerdas dan terampil
- d. Sehat jasmani dan rohani

- e. Cinta tanah air, tebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial

Generasi yang berkualitas yang akan disiapkan untuk menyongsong dan menjadi pelaku pembangunan pada era globalisasi dituntut untuk meningkatkan kualitas keberagamaannya (dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan agamayang tetap bertumpu pada iman dan aqidah). Dengan kata lain masyarakat maju Indonesia menuntut kemajuan kualitas hasil pendidikan Islam. A. R. Saleh menyatakan bahwa modernisasi bagi bangsa Indonesia adalah penerapan ilmu pengetahuan dalam aktivitas pendidikan Islam secara sistematis dan berlanjut. Tujuan pendidikan nasional termasuk tujuan pendidikan agama adalah mendidik anak untuk menjadi anak manusia berkualitas dalam ukuran dunia dan akhirat.

Untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, ditetapkan langkah-langkah dalam pembinaan pendidikan agama yaitu :

- 1) Meningkatkan dan menyelaraskan pembinaan perguruan agama dengan perguruan umum dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sehingga perguruan agama berperan aktif bagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pendidikan agama pada perguruan umum dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi akan lebih dimantapkan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta pendidikan agama



berperan aktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 3) Pendidikan tinggi agama serta lembaga yang menghasilkan tenaga ilmunan dan ahli dibidang agama akan lebih dikembangkan agar lebih berperan dalam pengembangan pikiran-pikiran ilmiah dalam rangka memahami dan menghayati serta mampu menterjemahkan ajaran-ajaran agama sesuai dan selaras dengan kehidupan masyarakat (A. R. Saleh, 2000 : 206)

Berdasarkan upaya diatas, maka dapat dilihat bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama pada 2 jalur, yaitu lembaga pendidikan umum dan keagamaan. Sejalan dengan upaya peningkatan SDM ini H. A. R. Tilaar (1999 : 200-204) dalam memandang tuntutan SDM yang kompetitif di abad 21 sesuai tantangan atau tuntutan masyarakat dalam era ilmu pengetahuan, menyatakan bahwa perlunya :

- 1) *Reformulasi* STAIN/IAIN/UIN sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Islam, hal ini dilihat dari relevansinya terhadap tuntutan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional masih bersifat sektoral dan visinya yang terbatas
- 2) *Nilai Agama Sebagai Faktor Integratif*, telah terlihat efek pemisahan agama dan sains-teknologi, nilai agama hendaknya dijadikan faktor integratif di dalam mengembangkan fakultas-fakultas ilmu murni setelah transformasi IAIN menjadi Universitas Islam.



2. Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan membuat generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka. Tujuan pendidikan selalu dikaitkan dengan kehidupan suatu bangsa, falsafahnya, dasar serta ideologinya dalam rangka perbaikan individu, keluarga maupun masyarakatnya

Endang Saifuddin Azhari (1976 dalam Azra, 2000 : 6) memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai “proses bimbingan (pimpinan, tuntutan, usulan) oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, intuisi dan sebagainya) dan raga objek didik dengan bahan-bahan materi tertentu, pada waktu tertentu, dengan metode tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam

Sedangkan Yahya Qahar (dalam Prasetya, 2000 : 20), berpendapat bahwa filsafat yang bergerak di lapangan pendidikan yang mempelajari proses kehidupan dan alternatif proses pendidikan dalam pembentukan watak. Sedangkan M. Natsir menyatakan bahwa ideologi pendidikan Islam menyatakan, “Yang dinamakan pendidikan Islam ialah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya (Azra, 2000 : 13).

.Pendidikan Islam dibangun atas prinsip-prinsip pokok yang membentuk karakteristiknya, yaitu :



- 1) Penciptaan yang bertujuan, dengan maksud bahwa pendidikan merupakan bentuk ibadah dengan interaksi pada alam, manusia sebagai fokus dan keimanan sebagai tujuan.
- 2) Kesatuan yang menyeluruh, yaitu kesatuan perkembangan individu, masyarakat dan dunia serta kesatuan umat manusia sebagai karakteristik universalitas. Ditambah kesatuan pengetahuan yang mencakup berbagai disiplin ilmu dan seni.
- 3) Keseimbangan yang kokoh, yaitu keseimbangan antara teori dan penerapan, bagi individu dan masyarakat, serta antara fardhu 'ain dan fardhu kifayah baik keagamaan maupun keduniaan (Aly dan Munzier, 2000 : 55-68).

Pendapat ini diperkuat oleh Zakiyah Darajat yang menyatakan bahwa pendidikan Islam banyak ditujukan pada perbaikan mental yang akan diwujudkan dalam amal perbuatan, baik sendiri maupun orang lain. Di sisi lain pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoretis saja, tetapi juga praktis. Dengan kata lain pendidikan Islam memadukan antara pendidikan iman dan pendidikan amal serta pendidikan individu dan masyarakat (Hasan, 1994 : 166)

Dengan melihat isinya, pendidikan Islam dapat dinyatakan sebagai pendidikan keimanan, ilmiah, amaliah, moral, dan sosial. Semua kriteria tersebut terhimpun dalam firman Allah SWT ketika mensifati kerugian manusia yang menyimpang dari pendidikan Islam baik individu maupun keseluruhan.

3. Tugas pendidik sebagai bagian dari SDM dalam pendidikan Islam

Menurut Sutari Iman Barnadib sebagaimana yang dikutip Dwi Siswoyo dkk, pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Pendidik adalah orang yang dengan sengaja membantu orang lain untuk mencapai kedewasaan (Dwi Siswoyo,, 2007:119). Di lingkungan sekolah penyebutan nama pendidik adalah guru. Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebut guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Abdul Mujib dkk, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Hal tersebut karena tujuan pendidikan islam yang utama adalah untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Jika pendidik belum mampu membiasakan diri dalam peribadatan pada peserta didiknya, maka ia mengalami kegagalan dan tugasnya, sekalipun peserta didiknya memiliki prestasi akademis



yang luar biasa. Hal itu mengandung arti akan keterkaitan antara ilmu dan amal shaleh.(Abdul Mujib, dkk, 2010 :90)

Dalam perkembangan berikutnya, tugas pendidik tidak hanya bertugas sebagai pengajar, yang mendoktrin peserta didiknya untuk menguasai seperangkat pengetahuan dan *skill* tertentu. Namun tugas dan fungsi pendidik dapat disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Sebagai pengajar (instruksional), yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan.
- b. Sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah SWT menciptakannya.
- c. Sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. .(Abdul Mujib, dkk, 2010 :91)

4. Manajemen SDM dalam pendidikan Islam

Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri



serta seluruh potensi yang dimilikinya. Guru sebagai komponen SDM dalam pendidikan dituntut memiliki kemampuan professional dalam pendidikan Islam memiliki syarat ahli dalam bidangnya dan memiliki kode etik (akhlak karimah).

Untuk dapat menjadi tenaga professional dalam pendidikan Islam maka guru sebagai pendidik perlu peningkatan profesionalisme, yang berguna untuk pembentukan karakter peserta didik dan penanaman nilai-nilai akhlak yang melibatkan ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk itulah manajemen pembinaan pendidik menjadi sangat penting dilakukan seiring dengan era global saat ini, apalagi peserta didik yang menginjak remaja sudah banyak yang terkoyak secara mental dan spiritualnya.

Manajemen pembinaan guru diartikan sebagai daya upaya untuk meningkatkan keilmuan, wawasan, loyalitas, kemampuan dan mendorong pendidik melalui berbagai cara agar bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang maksimal.

Pengembangan pembinaan pendidik dilihat dari sudut manajemen SDM dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan berbasis kompetensi (*Competency Based Performance Management/CBPM*) dan pendekatan berbasis kinerja (*Performance Based Performance Management/PBPM*). Pendekatan berbasis kompetensi melakukan pengembangan kinerja melalui peningkatan kemampuan pegawai/guru untuk

melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan peran dan tugasnya, sedangkan pendekatan berbasis kinerja melakukan pengembangan pegawai/guru melalui implementasi praktek-praktek terbaik (*best practice*) dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan bagi peningkatan kualitas pendidik dalam pendidikan Islam melalui pembinaan antara lain :

a. Meningkatkan keilmuan

Penilaian terhadap pendidik adalah proses pengukuran dan perbandingan prestasi kerja pendidik dengan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan. Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Masalah yang sering terjadi dalam penilaian pendidik yaitu kejenuhan karir dalam sebuah sekolah yang kurang berkembang. Lebih-lebih jika sosok kepala sekolah memberikan penilaian yang kurang menyenangkan kepada pendidik yang telah bersusah payah dalam kinerja. Untuk itu, pendidik perlu mendapatkan stimulasi dari pekerjaan mereka, terutama dari kepala sekolah dalam memimpin dan bekerja sama dengan pendidik. Sebagaimana menurut Tilaar, kepala sekolah (manajer) pendidikan islam bukan hanya menguasai



kemampuan dan keterampilan memimpin tetapi juga dituntut padanya dua hal yaitu, sebagai pemimpin yang dapat mengejawantahkan nilai-nilai islam di dalam sistem pendidikan islam dan pemimpin yang memiliki dan menguasai nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai permintaan zaman.(H.A.R Tilaar, 2000:159)

b. Pembinaan/ pengembangan pendidik

Pembinaan atau pengembangan pendidik merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik yang ada. Tujuan kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berfikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan keterampilannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Menurut Magginson sebagaimana yang dikutip oleh alwi, pengembangan sumber daya manusia (guru) yang ada berupa pendidikan, pelatihan dan bimbingan.(Alwi S., 2001:88-89) Kata "pengembangan" (*development*) adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan potensi dan efektifitas. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan sumberdaya manusia (guru) dalam konteks ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Handoko, yakni upaya lebih luas dalam memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian.(Handoko Hani, , 2003:77)

Aktualisasi nyata yang berhubungan dengan aspek-aspek pengembangan kinerja pendidik, seperti mengikutkan guru-guru dalam forum-forum ilmiah seperti pendidikan dan latihan (umum dan keagamaan), seminar, istighosah, silaturahmi antar guru, MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) atau kegiatan lain yang menunjang profesionalisme pendidik. Selain itu juga perhatian unsur pimpinan dalam melakukan pembinaan, pengarahan dan motivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.

c. Budaya religius

Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dengan dasar ini maka semua kegiatan pendidikan jadi bermakna. Apabila agama islam menjadi *frame* bagi dasar pendidikan islam, maka semua tindakan kependidikan dianggap suatu ibadah, sebab ibadah merupakan aktualisasi diri (*self-actualization*) yang paling ideal dalam pendidikan islam.

Budaya religius meliputi sekumpulan nilai agama yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh masyarakat disekitar sekolah (warga sekolah). Nilai yang dimaksud tersebut adalah suatu keyakinan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai sesuatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi



kehidupannya. Nilai islam juga mendasari perilaku, tradisi, kebiasaan dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh masyarakat disekitar sekolah (warga sekolah).

Dengan menyatukan antara pembinaan dan peningkatan kualitas guru dan menerapkan manajemen kinerja berbasis budaya religius maka dapat bermanfaat dalam menemukan sistem manajemen kinerja yang efektif, dalam rangka peningkatan kualitas pendidik yang berlandaskan ajaran islam, sehingga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi menuju terciptanya pendidikan islam yang diperhitungkan dimasyarakat

KESIMPULAN

Dalam menciptakan SDM yang bermutu sesuai tantangan globalisasi saat ini Pendidikan Islam memainkan peranan penting dalam pembinaan SDM khususnya kepribadian, sikap dan mental manusia berlandaskan agama selain potensi intelektualitasnya.

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses bimbingan yang dibangun atas prinsip-prinsip pokok, berupa penciptaan yang bertujuan, kesatuan yang menyeluruh dan keseimbangan yang kokoh. Pendidikan Islam memandang perlunya aspek dunia dan akhirat, ilmu dan amal atau teori dan praktek.

Pendidikan Islam berperan dalam memecahkan permasalahan SDM jika didukung perguruan tinggi Islam yang mampu menyahuti aspirasi tamatan institusi



pendidikan Islam di tingkat bawah, selanjutnya mempersiapkan SDM untuk diterjunkan kembali pada masyarakat.

Pengembangan pendidik sebagai SDM dalam pendidikan Islam merupakan faktor yang amat menentukan pada keberhasilan melestarikan dan mentransformasikan nilai ilahiyah dan nilai insaniyah dalam proses pendidikan dan pembelajaran di era perkembangan pengetahuan yang sangat cepat dewasa ini. Kinerja pendidik pada dasarnya menggambarkan kemampuan suatu profesi yang berkaitan dengan peran dan tugas sebagai pendidik. Termasuk profesi guru pendidikan Islam untuk terus menerus melakukan upaya peningkatan kompetensi dan pembinaan peserta didik pada ketakwaan dan berakhlak karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keihisanan. Sehingga perlunya sistem manajemen kinerja berbasis religius untuk peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan agar tercipta insan kamil (manusia sempurna), yaitu manusia yang mampu menyelaraskan kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual



DAFTAR PUSTAKA

- Aly, H. N. dan Munzier, H. (2000). **Watak Pendidikan Islam**. Jakarta : Friska Agung Insani.
- Azra, Azyumardi. (2001). Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta : Kalimah.
- Abdul Mujib, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta : Kencana, 2010).
- Alwi S., *Manajemen Sumberdaya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*. Edisi I. (Yogyakarta:BPFE, 2001)
- Djaafar, T. Z. (2001). **Pendidikan Non Formal Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan**. Padang : Penerbit FIP UNP
- Dwi Siswoyo,dkk.*Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta : UNY Press, 2007
- Gary Dessler. *Manajemen Sumber Daya Manusia.*, terj. Benyamin Molan.(Jakarta: Prenhallindo, 1997)
- Hasan, Chalijah. (1994). **Dimensi-dimensi Psikologi Pendidikan**. Surabaya : Al Ikhlas.
- Handoko Hani *Manajemen*. Edisi 2. (Yogyakarta: BPFE, 2003)
- H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Renika Cipta, 2000)
- Husaini Usman. *Manajemen Pendidikan*. (Yogyakarta :UNY Press, 2004)
- Mukhtar, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : Misaka Galiza, 2003)

- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen*. (Bandung: Rosda Karya, 1999)
- _____, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: CV. Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Prasetya. (2000). **Filsafat Pendidikan : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS**. Bandung : Pustaka Setia.
- Shaleh, A. R. (2000). **Pendidikan Agama dan Keagamaan : Visi, Misi dan Aksi**. Jakarta : Gemawindu Pancaperkasa.
- Tilaar, H. A. R. (1999). **Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21**. Magelang : Tera Indonesia.
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006)





Urgensi Peningkatan Mutu Pengelolaan Pesantren Dalam Era Global

Hal yang paling urgent yang harus dibenahi oleh pesantren sebagai langkah antisipatif tersebut adalah pembenahan pola manajemen, sebab pola manajemen pesantren cenderung dilakukan secara insidental dan kurang memperhatikan tujuan-tujuannya yang telah disistematisasikan secara hirarkis.

Sistem pendidikan pesantren biasanya dilakukan secara alami dengan pola manajerial yang tetap (sama) dalam tiap tahunnya. Perubahan-perubahan mendasar dalam pengelolaan pesantren agaknya belum terlihat.

A. Pendahuluan

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Indonesia, agaknya tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren telah menjadi semacam *local genius*. Di kalangan umat Islam sendiri pesantren telah dianggap sebagai model institusi keilmuannya, yang oleh Martin Van Bruinnesen dinilai sebagai salah satu tradisi agung (*great Tradition*) (Fajar, 1999:113). Kata Nurkholis Majid dalam Raharjo (1985:3), Andaikan saja negeri ini tidak mengalami penjajahan, kata Nurcholis Madjid, tentu pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren. Sehingga perguruan tinggi tidak akan berupa UI, IPB, ITB, UGM, dan lain-lain, tetapi mungkin Universitas Tremas, Krapyak, Al-Munawariyah, Bangkalan, Lasem dan sebagainya.

Sejarah juga telah membuktikan kontribusi pesantren dalam rangka turut mendirikan negara Republik Indonesia. Banyak ulama' dan santri yang gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Ulama' bersama santri rela mengisolir diri sambil memotivasi masyarakat untuk tidak bekerjasama dengan penjajah. Pada masa awal gerakan mengisi kemerdekaan sampai masa pembangunan sekarang ini peran pesantren dan ulama' terus meningkat, terutama dalam rangka kerjasama ulama' dan umara' dalam mensukseskan pembangunan bangsa dalam segala bidang sesuai dengan posisi masing-masing (Jamali, 1999:129).

Dalam proses pembelajaran, dahulu pesantren hanya mengedepankan metode pembelajaran



bandongan, sorogan dan wetonan. Namun dalam pesantren modern diperkenalkan metode diskusi dengan memberikan porsi lebih besar kepada para santri untuk menyampaikan gagasan dalam menginterpretasikan sebuah kitab kajian. Begitu juga dalam mengklasifikasi santri, pesantren modern mengintroduksi sistem kelas yang didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki, bukan pada jumlah dan jenis kitab yang telah dikaji. Disamping itu, pesantren modern mulai mengakses teknologi sebagai sarana dan bahasa asing (khususnya Arab dan Inggris) sebagai bahasa pengantar yang memungkinkan santri mampu berkomunikasi dengan komunitas intelektual di dunia luar (Munawar, 2001:100).

Perubahan model dari tradisional menjadi modern memiliki sisi plus dan minus. Sisi plus dari sistem pertama (tradisionalisme) adalah, pada umumnya para santri kuat dalam telaah kitab-kitab warisan ulama' klasik. Mereka menguasai teori bahasa arab secara baik, namun kurang menekankan aspek praktis dari pemanfaatan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Sebaliknya, sistem yang kedua (modern) – pada umumnya- kurang dalam penguasaan kitab-kitab warisan ulama' klasik, namun mereka telah membiasakan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa pengantar keseharian sehingga santrinya lebih mudah dan cepat dalam mengakses serta berkomunikasi dengan para intelektual di dunia luar.

Namun dari pengalaman perjalanan pesantren, baik yang mengarah pada model tradisional maupun modern, memiliki visi yang sama, yakni keajaiban (*istiqomah*) dalam menegakkan nilai-nilai moralitas agama dalam kehidupan di masyarakat. Dunia boleh

berubah, tapi substansi yang diajarkan dan nilai-nilai moralitas tidak boleh luntur diterpa badai dekadensi. Disamping itu pembinaan akhlak dibangun atas dasar teladan yang baik (uswatu al-Hasanah) dari para pengajar. Para santri dalam interaksi sosial keseharian dapat dikontrol –setidaknya terawasi- oleh para guru (*asatidz*). Karena tempat tinggal santri tidak berjauhan dengan tempat tinggal para guru.

Dengan demikian jika terjadi kasus dekadensi moral dikalangan santri maupun *asatidz* dapat lebih cepat dicegah penyebarannya. Barangkali inilah nilai positif dari sistem pendidikan pesantren yang hingga kini masih diidealkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pesantren sebagai *local genius* masih diakui existensi dan kontribusinya dalam membangun bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam memberikan warna pendidikan Islam di Indonesia. Akan tetapi, menghadapi tantangan dunia global dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu dahsyat, pesantren harus segera berbenah diri dan mengambil langkah antisipatif. Pesantren juga dituntut untuk lebih mandiri dan tanggap terhadap tuntutan masyarakat modern yang terus menerus mendambakan kualitas dalam segala hal (Tilaar, 1999:135).

Jika tidak demikian, pesantren tetap akan terkurung dalam orbitnya sendiri, sehingga tidak mampu mengantisipasi perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan poin panca jiwa pesantren yaitu : *mandiri dan bebas*. Mandiri berarti; pesantren tidak pernah menggantungkan hidup kepada belas kasihan orang lain, akan tetapi berusaha sendiri dengan modal keikhlasan dan keyakinan akan kebesaran Allah SWT



yang diiringi dengan usaha maksimal. Bebas berarti Bebas dalam berfikir, berbuat, bebas menentukan masa depan, dalam memilih alternatif jalan hidup didalam masyarakat kelak dengan jiwa besar dan optimistis dalam menghadapi segala problematika kehidupan.

Dari sini, hal yang paling urgent yang harus dibenahi oleh pesantren sebagai langkah antisipatif tersebut adalah pembenahan pola manajemen, sebab pola manajemen pesantren cenderung dilakukan secara insidental dan kurang memperhatikan tujuan-tujuannya yang telah disistematisasikan secara hirarkis.

Sistem pendidikan pesantren biasanya dilakukan secara alami dengan pola manajerial yang tetap (sama) dalam tiap tahunnya. Perubahan-perubahan mendasar dalam pengelolaan pesantren agaknya belum terlihat. Penerimaan santri baru misalnya, masih dilakukan secara “terbuka” untuk semua individu yang mempunyai latar belakang dan kemampuan beragam tanpa mengadakan usaha pre- tes terlebih dahulu. Usaha kategorisasi dan klasifikasi santri secara kualitatif jarang sekali dilakukan (Suwendi, 1999:209).

Pengorganisasian pesantren mulai penyiapan fasilitas dan sumber daya manusia, mengatur berbagai komponen secara cermat sampai kepada pelatihan guru dan staf secara teratur, tampaknya, jarang sekali ditemukan pada pesantren, hanya hal-hal lumrah yang dapat ditemukan dalam kehidupan Pesantren. Dalam struktur dan cara pengelolaan, hingga asset pesantren, dikuasai secara turun- temurun. Ketakutan terhadap kehilangan aset pesantren ini, menyebabkan diserahkannya pengorganisasian pesantren kepada. Efeknya tidak jarang pula para ahli waris memperebutkan pesantren itu agar dia dapat



mempunyai andil disana (Anwar, 1908:201).

Pola-pola manajemen pesantren seperti tersebut diatas sudah seyogyanya mulai dirubah ke arah manajemen modern yang lebih mengedepankan kualitas dan kepuasan pelanggan, yang lebih dikenal dengan *Total Quality Manajemen* (TQM). Prinsip-prinsip konsep manajemen ini juga telah dipakai oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di Indonesia dengan istilah *Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Sekolah* (MPMBS). Prinsip-prinsip tersebut adalah : (1)Fokus pada kualitas atau mutu (2)Perencanaan dan pengambilan keputusan yang dimulai dari bawah (*bootom up planning and decision making*) (3)manajemen yang transparan (4) Pemberdayaan masyarakat (5)Peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) (Tjiptono, 2002:41). Selanjutnya dengan mendasarkan pada kelima prinsip tersebut, maka aspek aspek yang perlu ditata dengan lebih baik oleh pesantren anantara lain : (1) perencanaan dan evaluasi (2) kurikulum (3) proses belajar mengajar (4) ketenagaan (5) Peralatan dan perlengkapan (6) keuangan (7) pelayanan siswa (8) hubungan pesantren dan masyarakat (9) iklim pesantren (Depdiknas, 2001:21).

Menurut Sobirin Naji dalam (Raharjo : 1985:147), penerapan *Total Quality Manajemen* ini bukanlah suatu hal yang dipaksakan, akan tetapi memang sudah menjadi keharusan, jika pesantren tetap ingin membuktikan kualitasnya ditengah- tengah serbuan model-model pendidikan baru, dengan tanpa melepaskan karakteristik khasnya. Hal ini juga sebagai wujud dari statemen yang tidak asing lagi di kalangan pesantren yaitu mempertahankan tradisi lama yang



masih signifikan dan mengambil tradisi baru yang lebih bermanfaat (*al muhafadzah ala qadim al salih wa al akhdzu bi al jadid al aslah*).

B. Urgensi Pengelolaan Pesantren

1. Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Griffin (1990: 6) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: “Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner”

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*),



dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).

Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring

aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2. Fungsi Pengelolaan

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam *The Liang Gie* (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

a. Perencanaan (Planning)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

Cropper (1998: 1) berpendapat:

Planning is the basis from which all other function are spawned. Without a congruent plan, organizations usually lack a central focus.

Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan.

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:

1. Apa yang dilakukan?
2. Siapa yang melakukan?
3. Di mana akan melakukan?
4. Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
5. Bagaimana melakukannya?
6. Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum? (Suharsimi Arikunto, 1993: 38)

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaanya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (manager) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari

proses pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: Organizing is grouping activities, assigning activities an providing the authority necessary to carry out the activities.

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota- anggota organisasi.



c. Pengarahan (Actuating)

Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128).

Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk



mengetahui:

- a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
- b. Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.
- c. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.
- d. Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

Tujuan pengawasan adalah:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk



memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

B. Pesantren dan tantangan perubahan global

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dikatakan sebagai tempat belajar yang otomatis menjadi pusat budaya Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara *de facto* tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Itulah sebabnya Madjid (1997:3) mengatakan bahwa dari segi historisitas, pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-Islaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indegenous*).

Subandi (1999) mendeskripsikan pondok pesantren sebagai berikut: *The term pesantren derives from the word santri, meaning a student who studies Islamic religious teaching. Pesantren is a place for santri. Sometimes Pesantren are called pondok (dormitory). Often the words are also put together: Pondok Pesantren. Most Pesantren are located in small towns or villages within a very pleasant surrounding, although some are found in urban areas. Typically, a complex of Pesantren consists of a large mosque in the center, surrounded by the house of the Kyai (the leader, the teacher and most often the owner of the Pesantren), and dormitories for santri.*

Sementara itu, Spuskeman mendeskripsikan keadaan pesantren sebagai berikut: *Pesantren are Islamic boarding schools, with a curriculum emphasizing religious teachings. The leadership of a pesantren lies in the hands of the 'kyai' (religious teacher). Most of these religious teachers*

practice a form of Islam indigenous to Indonesia that is tolerant of other religions. Though most are not fundamentalist, many pesantren are characterized by authoritarian control and limited exposure to outside ideas.

Secara historisitas, pesantren merupakan cikal bakal pendidikan Islam di Indonesia yang menelurkan berbagai macam corak dan pola pendidikan Islam yang saat ini ada, seperti madrasah salafiyah, madrasah diniyah, madrasah tsnawiyah, madrasah ibtidaiyyah, madrasah aliyah, ma'had 'aly, madrasah huffadz, dan madrasah lainnya dalam kemasan yang lain pula seperti majlis taklim, halaqah, majlis pengajian dan sebagainya pula. (Azra, 1996: 71). Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang asli. Pendidikan ini semula merupakan pendidikan agama Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia pada abad ke-13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin terarur dengan munculnya tempat-tempat pengajian dan kemudian berkembang menjadi tempat penginapan para pelajar (santri). Selanjutnya, tempat ini dinamakan pesantren.

Tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam yang membicarakan tiga masalah pokok, yaitu Tuhan, manusia dan alam setelah dikotomi mutlak antara Tuhan (*Khaliq*) dengan makhluk, termasuk bentuk-bentuk hubungan antara ketiga unsur tersebut yang bersifat menyeluruh. Selain itu produk pesantren diharapkan memiliki kompetensi tinggi untuk mengadakan responsif terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada. (Madjid: 1997: 18)



Dalam sejarah perkembangannya, fungsi pokok pesantren adalah mencetak ulama dan ahli agama Islam. Hingga dewasa ini fungsi pokok itu tetap terpelihara dan dipertahankan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, selain kegiatan pendidikan dan pengajaran agama beberapa pesantren telah melakukan pembaharuan dengan mengembangkan komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti ditambahkan pendidikan sistem sekolah, adanya pendidikan kesenian, pendidikan bahasa asing (Arab, Jerman dan Inggris), pendidikan jasmani serta pendidikan ketrampilan. Walaupun demikian, secara historis pesantren memiliki karakter utama, yaitu:

1. Pesantren didirikan sebagai bagian dan atas dukungan masyarakat sendiri.
2. Pesantren dalam penyelenggaraan pendidikannya menerapkan kesetaraan santrinya, tidak membedakan status dan tingkat kekayaan orang tuanya.
3. Pesantren mengemban misi menghilangkan kebodohan, khususnya *tafaqquh fid dien* (mendalami ilmu agama) dan mensyiarkan agama Islam (Maksum: 2003: 7).

Sebagai pemimpin pesantren, seorang kyai banyak memainkan peran perantara bagi umat Islam dengan memberi mereka pemahaman tentang apa yang terjadi pada tingkat nasional. Kepemimpinan kyai secara umum sedang mengalami perubahan dan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam situasi dan pandangan sosio politik umat Islam. Perubahan ini mempengaruhi persepsi umat Islam mengenai peran kepemimpinan kyai (Turmudzi: 2004: 3).

Di beberapa tempat, pesantren memiliki beberapa kelemahan antara lain pertama, kebanyakan pesantren masih *rigid* (kaku) dengan mempertahankan pola salafiyah yang dianggapnya masih berupa *sophisticated* (ilmu-ilmu tasawuf) dalam menghadapi persoalan eksternal. Hal ini disebabkan antara lain pola kepemimpinan pesantren masih sentralistik dan hirarkhis yang terpusat pada satu orang kyai saja. Akibat yang paling fatal, jika kyai wafat dan tidak ada anak yang mau serta mampu mengurus pesantren yang dimilikinya, maka tak pelak pesantren tersebut akan redup. Kedua, kelemahan dibidang metodologi. Para ustadz maupun kyai sendiri kurang memiliki improvisasi dan inovasi dalam metode pengajarannya. (Daulay, 2001: 19)

C. Penutup

Manajemen pengelolaan pondok pesantren merupakan salah satu kelemahan pondok pesantren pada umumnya yang harus diberdayakan dalam pembinaan pondok pesantren. Ini memang dimungkinkan terjadi karena pemahaman bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional, sehingga pengelolaan manajemennya kurang serius diperhatikan dan sangat konvensional



DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim. ed. (2005). *Manajemen pesantren*. LKiS. Yogyakarta
- A.Tabrani Ruslan et.al. (1989). *Pendekatan dalam proses pengajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Ahmad Syalaby. (1987). *al-Tarbiyah al-islamiyah, nudzumuha falsafatuha tarikhuha*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mashriyah
- Azyumardi Azra. (1996). *Pendidikan islam tradisi dan modernisasi menuju millenium baru*. Jakarta: Logos Ilmu Wacana
- Bassand, Michel (1984). *Direction of change: modernization theory, research and reality*. New York: Free Press
- Berg, Rudolf Van Der. (2002). *Teacher meanings regarding educational practice dalam Review educational research. Volume 72. No.4*.
- Bruinessen, Martin Van (1999). *Kitab kuning*. Bandung: Mizan Burnham, John West. (1992). *Managing quality in school*. Prentice Hall.
- Daft, I. Richard. (1991). *Management*. Dyden press. Orlando. New York.
- Dawam Ainurrafiq. (2004). *Manajemen madrasah berbasis pesantren* Yogyakarta: Listafariska
- Endang Turmudi. (2004). *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS
- Fakih Muhammad. (2001). *Kepemimpinan islam*. Yogyakarta. UII Press
- Feigenbaum. (1992). *Kendali mutu terpadu*. Jakarta:

Erlangga

Fuad Riyadi. (2001). *Kampung santri*. Yogyakarta : Ittaqa Press

Haidar Putra Daulay. (2001). *Historisitas dan eksistensi pesantren*. Yogyakarta: Tiara Wacana
http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/27/suatu_opini_mengenai_reformasi_s.htm

Husaini Usman. (2004). *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Ismail, ed., (2002). *Dinamika pesantren dan madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jamal Ma'ruf Asmani. (2003). *Menggagas pesantren masa depan: geliat suara santri untuk indonesia baru*. Yogyakarta: Qirtas

Junaidi Abdusy Syakur dkk. (2003). *Madrasah salafiyah III*. Yogyakarta: Lana usaha

Koontz, Harold et.al. (1984). *Management*. McGraw-Hill, Inc.

Maksum Mochtar. (1999). *Madrasah, sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Maksum, (2003). *Pola pembelajaran di pesantren*. Jakarta. Departemen Agama RI

Mastuhu. (1994). *Dinamika sistem pendidikan pesantren*. Jakarta: INIS Maykuri Abdillah. (1997). *Peningkatan kualitas pendidikan madrasah*. Jurnal Madrasah, Vol 1, No 2

Milles, B Mathew & Huberman, A.M. (1994). *Analisis data kualitatif*. Judul asli: *Qualitative data analysis*. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia Press

- Nanang Fattah. (2001). *Landasan manajemen pendidikan*. Bandung: remaja Rosda Karya
- Nasution. (2001). *Manajemen mutu terpadu (total quality management)*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurcholis Madjid. (1997). *Bilik-bilik pesantren*. Jakarta: Paramadina
- Sadler, Philip. (1997). *Leadership*. London: Kogan page.
- Sallis, Edward (1993). *Total quality management in education*. London: Kogan Page
- Schoderbek, Peter P. (1988) *Management*. Amerika: Harcourt Brace Jovanovich
- Siagian, Sondang P.(2005). *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Spokesman. (2002). Artikel dalam *State Department Funded Training for Indonesian Islamic School*.
[.http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/13615](http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/13615)
- Steenbirink, Karel A. (1986). *Pesantren madrasah sekolah*. Jakarta: LP3ES
- Sulthon Masyhud, dkk. (2003). *Manajemen pondok pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka
- Syaukani HR. (2001). *Pendidikan paspor masa depan*. Jakarta: Nuansa Madani
- Yunus. (2005). Artikel dalam *Revitalizing pesantren's role in era of globalized education*. <http://usinfo.state.gov>
- Zainal Arifin Thoha. (2003). *Runtuhnya singgasana kiai NU, pesantren, kekuasaan: Pencarian tak kunjung usai*. Yogyakarta: Kutub.
- Zamarkhsyari Dhofier. (1982). *Tradisi pesantren, studi tentang pandangan hidup kiai*. Jakarta: LP3ES





PROFIL PENULIS



Ahmad Zain Sarnoto, Lahir di dusun soka Kelurahan Nusadadi kecamatan Sumpiuh, kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 28 Maret 1974. Kini anak buruh petani dari dusun terpencil dikabupaten Banyumas ini aktif sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Himpunan Konsultan Pendidikan Indonesia (HiKPI), Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Antarangsa (ADPENDISA), Direktur FAZA AMANAH *Management & Education Consultant*, Direktur Lembaga Kajian Islam dan Psikologi (eLKIP), Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Masyarakat Peduli Pendidikan (Education Care Society). Tugas utama sebagai Dosen tetap Program studi Doktor Ilmu Al-

Qur'an dan Tafsir program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta dengan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut PTIQ Jakarta. Selain sebagai dosen dan konsultan pendidikan, aktif juga memberikan kajian di masjid dan majelis taklim di Bekasi dan sekitarnya. Suami dari Laela Juniarsih ini memiliki Moto hidup "Belajar, Bekerja dan Berdakwah" mencari ridho Allah SWT

